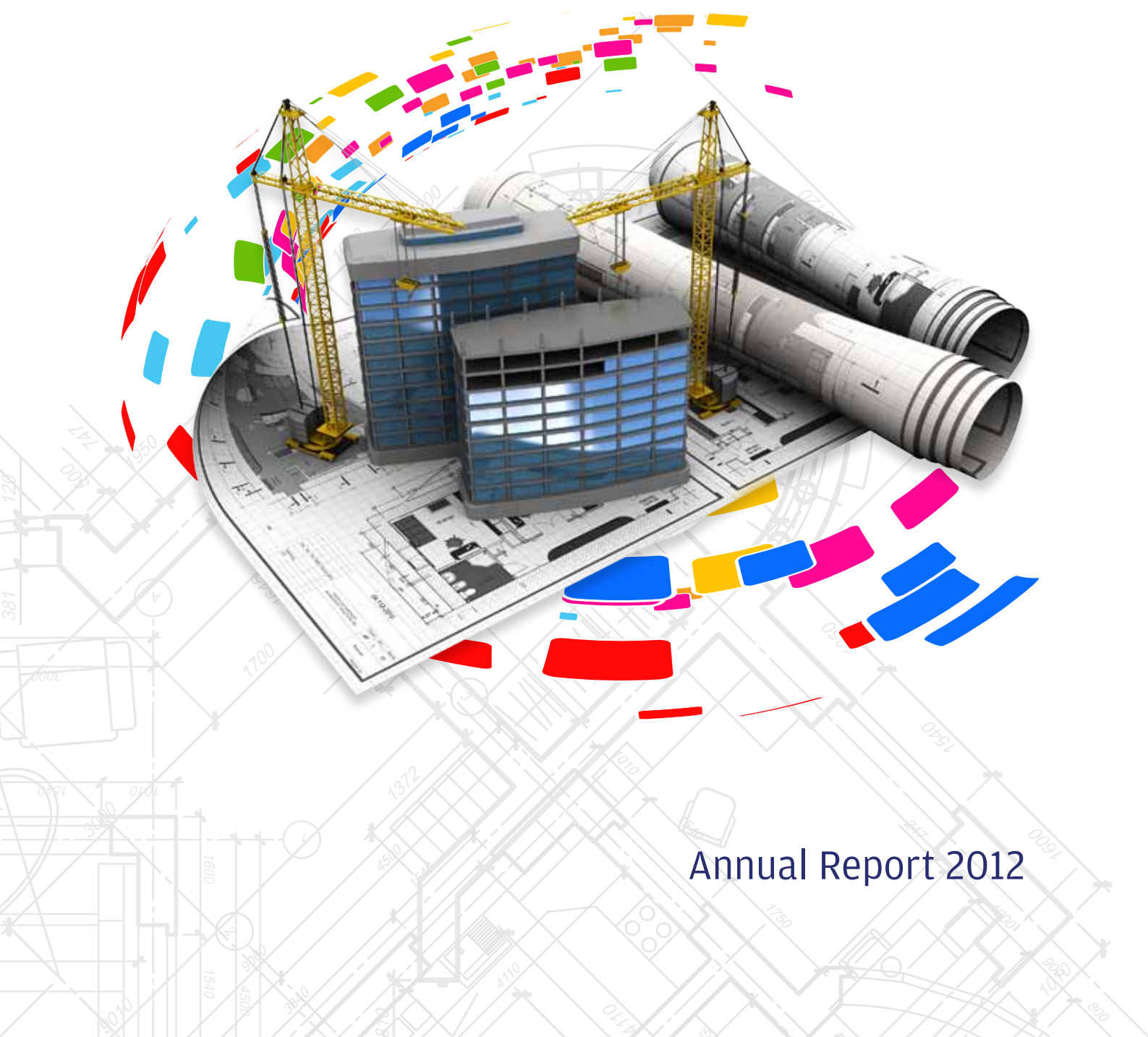
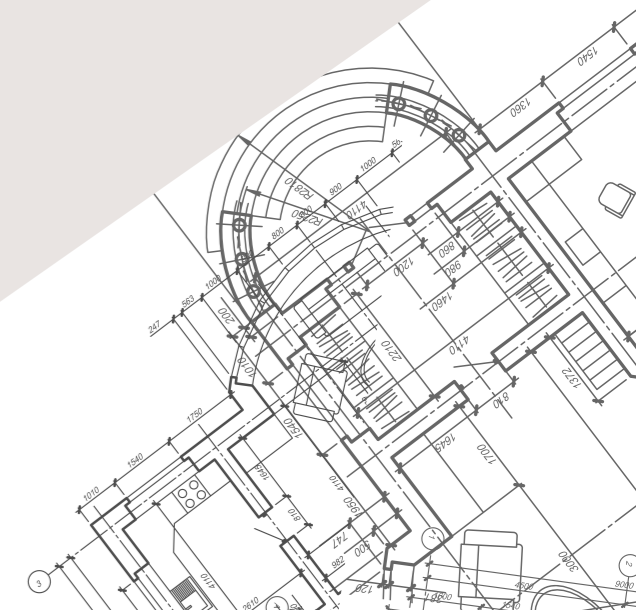


PT. BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)



Annual Report 2012

Empowering Human
Capital to reach Global
Green Construction



Sekilas Kinerja

Performance At A Glance

LAPORAN LABA (RUGI) Profit (Loss) Statement

(dalam jutaan rupiah)

LAPORAN LABA / RUGI	2012	2011	2010	2009	INCOME STATEMENT
Pendapatan Usaha	923.407,08	703.877,06	512.101,04	711.859,95	Revenue
Beban Kontrak	(830.712,70)	(622.655,17)	(439.101,46)	(628.512,64)	Cost of Good Sold
Laba Kotor	171.982,26	109.031,35	93.527,87	105.776,49	Gross Profit
Laba Usaha	119.095,65	65.491,75	55.350,20	73.252,09	Operating Income
Laba Sebelum Pajak	72.245,54	40.007,49	26.339,57	52.736,46	Earning Before Tax
Laba Bersih Setelah Pajak	50.785,92	26.012,73	16.988,89	34.020,17	Earning After Tax

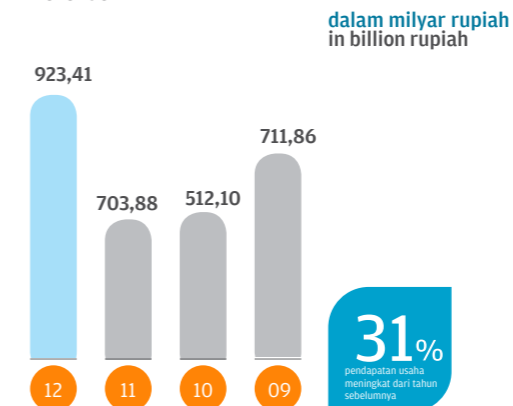
NERACA

NERACA	2012	2011	2010	2009	BALANCE SHEET
Total Aset	912.037,14	640.115,73	647.272,74	637.749,73	Total Assets
Total Liabilitas	696.354,39	478.618,66	511.788,40	519.254,28	Total Liabilities
Ekuitas	215.682,75	161.497,07	135.272,74	118.495,45	Equity

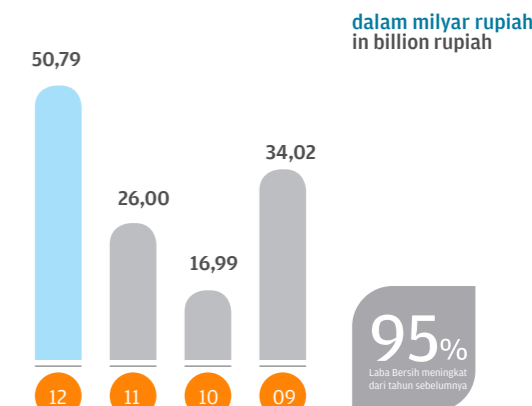
RASIO-RASIO KEUANGAN

RASIO-RASIO KEUANGAN	2012	2011	2010	2009	FINANCIAL RATIO
Laba Sebelum Pajak / Pendapatan	7,82 %	5,68 %	5,14 %	7,41 %	Earning Before Tax/Revenue
Beban Kontrak / Pendapatan	89,69 %	88,46 %	85,75 %	88,29 %	Cost of Good Sold/Revenue
Laba Sebelum Pajak/Total Aset	7,92 %	6,25 %	4,07 %	8,27 %	Earning Before Tax/Total Assets
Rasio Lancar	151,59 %	141,73 %	122,33 %	151,53 %	Current Ratio
Rasio Kas	45,89 %	47,47 %	20,40 %	33,87 %	Cash Ratio
Hutang Terhadap Aset	76,35 %	74,77 %	79,07 %	81,42 %	Debt to Total Asset
Hutang Terhadap Modal	322,86 %	296,36 %	378,34 %	438,21 %	Debt to Equity
Hutang Terhadap Aset Tetap	260,73 %	188,65 %	210,01 %	226,59 %	Debt to Fixed Asset

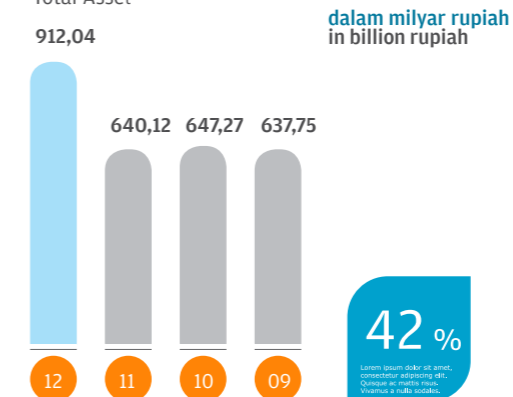
Pendapatan Usaha Revenue



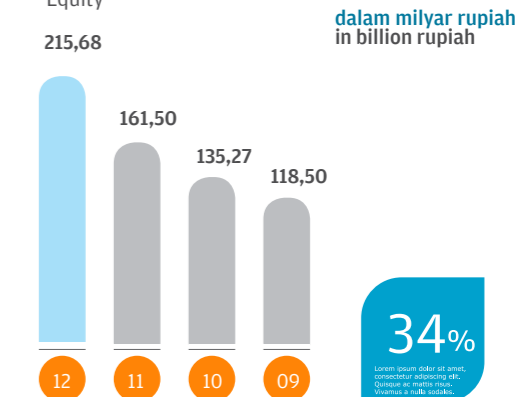
Lab Bersih Setelah Pajak Net Income



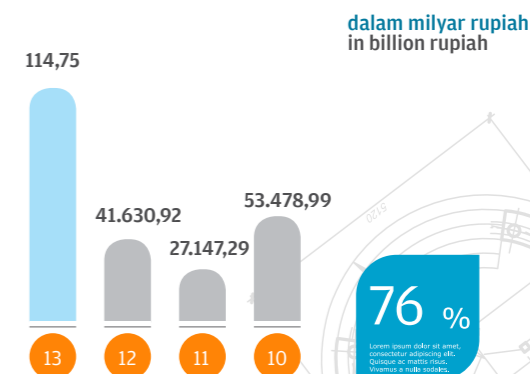
Total Aset Total Asset



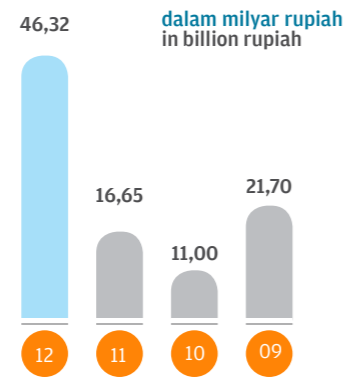
Ekuitas Equity



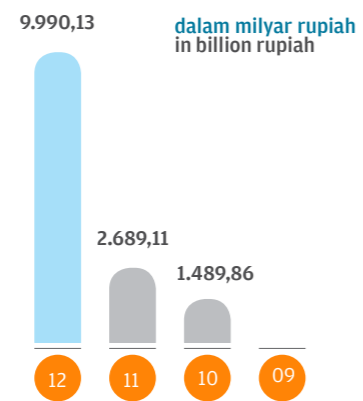
EBITDA EBITDA



Imbal Balik Aset
Return on Asset



Imbal Balik Ekuitas
Return on Equity



SELAYANG PANDANG

At A Glance



PT Brantas Abipraya (Persero) yang selanjutnya disebut Brantas merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor konstruksi. Saat ini, perusahaan yang dikenal sebagai perusahaan konstruksi umum ini tidak hanya menangani proyek-proyek irigasi, tetapi juga telah melaksanakan proyek bergengsi yang terletak di dalam dan di luar negeri. Proyek tersebut, antara lain bendungan, terowongan, jalan dan jembatan, bandara, bangunan, pembangkit listrik, dan banyak lagi.

Sesuai dengan misi perusahaan, dan untuk mengantisipasi pasar bebas di era globalisasi, dimana persaingan akan menjadi sangat sulit dihindarkan, Brantas terus mengembangkan rencana intensif agar menjadi perusahaan terkemuka dalam industri konstruksi. Guna mewujudkan rencana tersebut jajaran manajemen Brantas telah menetapkan visi dan misi korporasi sebagai berikut :

PT. Brantas Abipraya (Limited Liability Company) hereinafter referred to as Brantas is one of State-Owned Enterprises (SOES) in the construction sector. Currently, the company is well-known as a public construction company that does not only handle irrigation projects, but also it has performed a prestigious project in the home country or in overseas. The said projects are among others irrigation, tunnel, road, bridge, airport, construction, electricity power plant, and many more.

In accordance with the company's mission, and to anticipate a free market in the globalization era, where competition will be considerably avoidable, then Brantas keeps developing an incentive plan to become a well-known company in the construction industry. To actualize such a plan, the management of Brantas has defined vision and mission of the corporation as follows:

Visi : Menjadi perseroan nasional terkemuka dalam industri konstruksi.

Misi :

- Menyediakan produk dan jasa enjinerig dan pelaksanaan konstruksi yang bermutu tinggi dengan layanan terbaik bagi para pelanggannya.
- Menghasilkan laba, membangun citra, mengembangkan profesionalisme usaha berdasarkan prinsip-prinsip GCG (Good Corporate Governance), manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (K3) serta pelestarian lingkungan.
- Peduli kepada usaha kecil, menengah dan koperasi serta masyarakat sekitar.

Keinginan menjadi perusahaan terkemuka dalam industri konstruksi ini harus didukung oleh fondasi yang kuat berupa strategi korporasi yang efektif dan komprehensif yang didukung oleh keuangan yang mapan, sistem manajemen yang baik serta SDM yang handal yang memiliki komitmen tinggi terhadap Perusahaan. Untuk itulah, perseroan memiliki motto "Semangat Memberikan Yang Terbaik" atau "Spirit of Giving The Best".

Perseroan menyadari sepenuhnya bahwa untuk memenangkan persaingan, seluruh staf harus ditingkatkan kemampuan mereka agar dapat bekerja secara efisien dan efektif sehingga dapat memenuhi tenggang waktu dan kualitas kerja yang baik untuk tiap proyek yang dikerjakan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Dengan begitu Perseroan dapat meningkatkan kinerja dan citra perusahaan. Pengembangan perusahaan selama ini telah berjalan pada track yang ada dan itu terbukti membuahkan berbagai prestasi yang

Vision: To become a well-known national company in the construction industry.

Mission:

- Providing engineering product and services and a high quality construction implementation with the best services for its customers.
- Generating profit, developing image and business professionalism based upon GCG (Good Corporate Governance) principles, occupational health and safety (OHS) and environmental conservation.
- Caring to small, medium enterprises and cooperatives as well as people surrounding the company.

A desire to become a well-known company in the construction industry should be supported by a strong foundation in the form of an effective and comprehensive strategy supported by a stable finance, good management system either reliable HR which has a high commitment towards the Company. Hence, the company has a motto "Spirit of Giving The Best".

The company realizes that to win a competition, all staffs should improve their abilities so that they work efficiently and effectively in order to comply with grace period and good work quality for each project which is performed in accordance with the cost spent. As a matter of fact, the company can enhance its performance and image. The company development has been insofar running on the existing track and it is proven of generating various achievements admitted by numerous parties. Such achievements have

diakui banyak pihak. Prestasi itu berhasil diraih antara lain karena Brantas mengembangkan dan menerapkan secara konsisten sistem manajemen mutu berdasarkan ISO 9000 di semua unit kerja / usaha.

Setelah berhasil menerapkan sistem secara konsisten untuk beberapa kali, Brantas berhasil mendapatkan jaminan mutu ISO 9001:2000 sejak 22 Januari 1998. Sertifikat tersebut diberikan oleh Lloyd's Register Quality Assurance. Untuk mempertahankan prestasi yang sudah diraih, Perusahaan mengembangkan sistem berdasarkan pada kebijakan mutu. Semua anggota dan personil Brantas akan selalu melakukan pekerjaan dengan semangat untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen. Guna menghadapi tantangan ke depan yang makin kompleks, pada tanggal 12 Desember 2011, perusahaan mendirikan PT Brantas Energi yang bergerak di bidang pembangunan, perindustrian, perdagangan dan jasa dalam bidang ketenagalistrikan dan energi alternatif, dengan nilai investasi sebesar Rp. 51,480,000,000 atau setara dengan kepemilikan sebesar 99%.

been successfully achieved among others due to Brantas develops and applies consistently the quality management system based upon ISO 9000 in all working units/businesses.

After achieving such success in applying a consistent system, Brantas has several times obtained a quality assurance of ISO 9001:2000 since January 22, 1998. The certificate is provided by Lloyd's Register Quality Assurance. To maintain the achievement, the Company develops the system based upon a quality policy. All members and personnel of Brantas will always perform the work under a spirit to give the best services for the customers. To face a challenge ahead that is very competitive, on December 12, 2011, the company has established PT Brantas Energy having line of business in development, industrial, trading and services in the field of electrical and alternative energy under an investment value of Rp 52,480,000,000,- or equalize to the shareholding of 99%.



7%

Pencapaian tahun ini

Achievement of This Year

Pendapatan Usaha Meningkat

Increased Business Revenue

Kinerja manajemen didorong untuk meningkatkan pendapatan. Tahun ini pendapatan mencapai 923,41 Miliar meningkat 31,19 % dibanding tahun 2011 sebesar 703,88 Miliar

31,19 %

The management performance is supported to increase the revenue. This year, the revenue achieved 923,41 Billion increased 31,19% compared to 2011 worth 703,88 Billion.

Tahun 2012	923,41 miliar
Tahun 2011	703,88 miliar

Laba Bersih Meningkat

Increased Net Profit

Kenaikan pendapatan diikuti dengan kenaikan laba yang cukup signifikan. Laba tahun 2012 tercapai sebesar 50,79 miliar, meningkat 95,27 % dibandingkan tahun 2011 sebesar 26,01 Miliar

95.27 %

The increase in revenue is followed by the increase in profit which is significant enough. The profit in 2012 achieved 50,79 billion, increased 95,27 % compared to 2011 worth 16.99 billion.

Tahun 2012	50,79 Miliar
Tahun 2011	26,01 Miliar

Aset Meningkat

Increased Asset

Jumlah total aset tahun 2012 tercapai sebesar 909,97 miliar, meningkat 42,16 % dibandingkan tahun 2011 sebesar 640,12 Miliar

95.27 %

In 2012, total asset reach 909.97 billion, increasing 46.61% compared to that of 2011 which was 640.12 billion.

Tahun 2012	909,97 Miliar
Tahun 2011	640,12 Miliar

Jumlah Pembayaran Pajak Meningkat

Increased Tax Payment

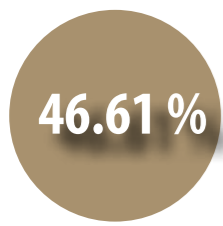
Pertumbuhan perusahaan salah satunya diukur dari jumlah pajak disetor. Tahun 2012, PT Brantas mencatat jumlah pembayaran pajak sebesar 114,77 miliar, meningkat 7,75% dibanding tahun 2011 sebesar 106,51 miliar.

7,75 %

One of growth indicator of company is the amount of tax payment, in 2012 Brantas recorded the tax payment amount at 114.77 billion, increased 7,75% compared to 2011 worth 106.51 billion

Tahun 2012	114,77 Miliar
Tahun 2011	106,51 Miliar

Kontrak Baru Meningkat Increase in New Contract

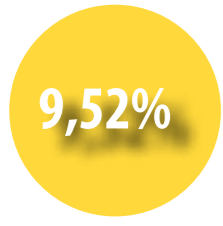


Perusahaan bertekad untuk menggenjot pendapatan dengan mengikuti lebih banyak lelang untuk memperoleh proyek baru. Kontrak baru pada tahun 2012 sebesar 2.353.27 miliar meningkat tajam 46,16 % dari tahun 2011 sebesar 1.605,12 miliar.

The company has a strong intention to boost the revenue by participating in numerous bids to obtain a new project. The new project in 2012 worth 2,353.27 billion increased significantly 123.59% from 2011 worth 1,605.12 billion.

Tahun 2012	2.353,27 Miliar
Tahun 2011	1,605.12 Miliar

Jumlah SDM Bertambah Increased Human Capital

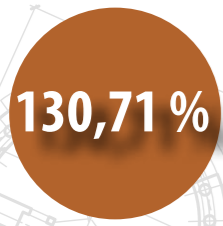


Untuk menjawab tantangan bisnis konstruksi yang terus berkembang, PT Brantas menambah jumlah tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja tahun 2012 adalah 322, meningkat 9,52% dibanding tahun 2011 yang berjumlah 294 tenaga kerja.

To meet the challenges of a growing construction business, PT Brantas increase the amount of labor. The number of workers in 2012 was 322, an increase of 9.52% compared to the year 2011, amounting to 294 workers.

Tahun 2012	322 pekerja
Tahun 2011	294 pekerja

Pengelolaan Dana PKBL Meningkat Increased Fund Management of Community Development And Partnership Program



Pengelolaan dana PKBL pada tahun 2012 adalah sebesar 484,50 juta, meningkat 130,71% dibanding tahun 2011 sebesar 210,00 juta

The fund management of Community Development and Partnership Program in 2012 was 484,50 juta, increased 130,71% compared to 2011 which worth 210.00

Skor KPI melebihi target KPI Score Exceed the Target



Skore Indeks pencapaian Perusahaan direncanakan mencapai 100, namun pada realisasinya tercapai 101.22, melebihi target 1,22%

Key Performance Indicator was targeted at 100, but the it realized at 101.22, this exceed 1,22%

Tingkat Kesehatan Perusahaan Company's Health Rank



Tingkat kesehatan perusahaan tahun 2012, Brantas memperoleh predikat "AA" dengan capaian skor 93,75 untuk kinerja perusahaan dan masih bertahan dalam kategori "sehat" Jika dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar 94,25 pencapaian skor turun 0.53 %

The company's health rank in 2012, Brantas predicate "AA" with a performance score of 93.75 for the performance of the company and still survive in the category of "healthy" When compared with the year 2011 was 94.25 down 0.53% achievement score

Peningkatan Tanggung Jawab Social Perusahaan Increased CSR



Dalam tahun 2012, Perusahaan mengalokasikan dana CSR sebesar 661,83 juta, meningkat 30,60% dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar 166,45 juta.

In the year 2012, the Company allocates CSR funds amounting to 661.83 million, an increase of 30.60% compared with the year 2011 amounted to 166.45 million.



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility

Aspek ekonomi dalam tanggung jawab sosial perusahaan yang dikelola secara profesional menjadi penting. Tidak semata-mata mendapatkan keuntungan (profit), tetapi juga memberikan perhatian kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat (people) dan kelestarian lingkungan (planet).

Economic aspect in the Corporate Social Responsibility that is professionally managed becomes an important thing. It does not only acquire profit, but also it pays attention to the people prosperity enhancement and environmental conservation (planet).

Aspek Ekonomi

Memaksimalkan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar proyek diwujudkan melalui penyaluran dana program kemitraan sebesar Rp. 210 juta dengan daya serap 100% di tahun 2012

Economic Aspect

Maximizing the economic empowerment for community surrounding the project is actualized by fund distribution of partnership program worth Rp 210 million under absorption of 100% in 2012.

Aspek Sosial

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi proyek secara berkesinambungan telah memberi kontribusi sosial berupa bantuan pendidikan sebesar Rp 195 juta.

Social Aspects

An effort to improve the community prosperity surrounding the project location in a sustainable manner has given a social contribution in the form of education aid worth Rp 195 million.



JEJAK LANGKAH

Milestone

1980

PT Brantas Abipraya didirikan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi nasional. Dari hasil pemekaran proyek Induk pengembangan wilayah Sungai Brantas (Proyek Brantas), menjadi Profit Oriented

PT Brantas Abipraya established as a company engaged in the field of national construction. Parent of the division of project development Brantas River region (Brantas Project), a Profit Oriented



1990

PT Brantas Abipraya mendapatkan kepercayaan untuk mengerjakan pekerjaan dalam bidang non pengeiran (jalan, jembatan, gedung, dan bandar udara)

PT Brantas Abipraya get the confidence to do the work in the field of non pengeiran (roads, bridges, buildings, and airports)



1992

Di usia 12 tahun PT Brantas Abipraya membangun PLTA kota Panjang, Bangkinang, Riau. Dengan menerapkan metode RCC (Roller Compacted on Create). Metode pertama dalam proyek pembangunan dam di Indonesia

At the age of 12 years of PT Brantas Abipraya build hydropower Long city, Bangkinang, Riau. By applying the method of RCC (roller compacted on Create). The first method in dam construction project in Indonesia



1995

Manajemen PT Brantas Abipraya memindahkan kantor dari Kota Malang ke Jakarta untuk menunjang kegiatan dan mendekatkan dengan pusat pemerintahan

Management of PT Brantas Abipraya moved his offices from Malang to Jakarta to support the activities and closer to the center of government



2008

Dengan pindahnya kantor pusat PT Brantas Abipraya, perusahaan ini makin berkembang dan mendapat piagam penghargaan sebagai salah satu wajib pajak patuh dari Direktorat Jenderal Pajak hingga sekarang

Result of the displacement of the headquarters of PT Brantas Abipraya, this company is growing and award plaque sebagai got one abiding taxpayers of the Directorate General of Taxation until now

2010

PT Brantas Abipraya mendapat piagam penghargaan dari majalah Info Bank, sebagai perusahaan BUMN dan Konstruksi terbaik berdasarkan pada kinerja pertumbuhan usahadan rasio keuangan

PT Brantas Abipraya mendapat plaque from magazines Info Bank, a state-owned company and the best construction on growth performance usahadan Based on the financial ratios



2011

Asosiasi Konstruksi Indonesia (AKI) meng- anugerah-kan penghargaan sebagai kontraktor Indonesia yang mengerjakan bendungan terbanyak. Dep. Konstruksi Indonesia (PU) mempercayakan proyek konstruksi kategori bangunan gedung lebih dari 8 lantai (green building)

Indonesian Construction Association (AKI) uses award-grace-kan as Indonesian contractors are working on the highest dam. Dep. Construction Indonesia (PU) entrust the building construction project category over 8 floors (green building)



2012

PT Brantas Abipraya, dipercaya untuk mengerjakan proyek Underpass Cibubur, dengan menggunakan Jacking System. Sistem ini merupakan teknologi yang pertama kali diterapkan di Indonesia.

PT Brantas Abipraya, trusted to carry out the Underpass Cibubur Project by implementing Jacking System Technology. The Technology is the first one to be implemented in Indonesia.



IKHTISAR KEUANGAN

Financial Highlights

Laporan Posisi Keuangan Komparatif

Statement of Comparative Financial Position

Dalam juta rupiah

In million of rupiah

LAPORAN LABA / RUGI	2012	2011	2010	2009	INCOME STATEMENT
ASET					ASSET
Aset Lancar					Current Assets
Kas dan Setara Kas	195.249.957.121	129.552.744.554	67.290.407.480	91.316.084.047	Cash and Cash Equivalents
Piutang Usaha					Accounts Receivable
Pihak Yang Berelasi	129.255.350.037	111.481.992.970	79.505.138.632	86.578.558.382	Its related parties
Pihak Ketiga	5.026.100.564	5.041.096.222	26.912.503.142	7.723.247.913	Third Party
Piutang Lain - Lain					Receivables - Other
Pihak yang berelasi	2.400.306.934				
Pihak Ketiga	9.662.968.661	12.092.398.654	4.971.369.418	4.443.538.808	Third Party
Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja					Gross Claims To Employer
Pihak Yang Berelasi	194.421.124.709	45.516.604.103	137.496.285.902	158.314.711.339	Its related parties
Pihak Ketiga	35.474.430.282	183.321.224	459.760.200	11.812.399.442	Third Party
Persediaan	24.201.265.150	31.057.815.057	26.785.142.231	7.923.375.797	Inventory
Uang Muka	15.283.201.671	14.607.526.324	19.533.440.743	6.972.376.705	advance
Beban Dibayar Dimuka	14.892.196.471	29.904.619.524	33.924.579.699	14.890.689.710	Prepaid Expenses
Pajak Dibayar Dimuka	11.408.534.886	4.867.056.370	5.270.217.088	16.141.180.761	Prepaid Taxes
Jaminan	7.681.578.007	2.102.288.227	1.426.375.447	2.472.138.470	assurance
Total Aset Lancar	644.957.014.493	386.407.463.230	403.575.219.983	408.588.301.375	Total Current Assets
Aset Tidak Lancar					Noncurrent Assets
Properti Investasi	-	151.989.480.000	151.554.480.000		Investment Property
Aset Tetap - Nett	263.346.574.876	101.718.787.028	89.543.790.174	74.506.052.431	Fixed Assets - Nett
Aset Lain-Lain - Nett	-		2.599.248.969	154.655.378.969	Other Asset
Total Aset Tidak Lancar	267.080.127.147	253.708.267.028	243.697.519.143	299.161.431.400	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET	912.037.141.640	640.115.730.258	647.272.739.126	637.749.732.775	TOTAL ASSETS
LIABILITAS					liabilities
LIABILITAS JANGKA PENDEK	-				Short-Term Liabilities
Hutang Usaha	-				Accounts Payable
Pihak Yang Berelasi		6.347.335.660	8.102.112.761	4.478.478.146	Its related parties
Pihak Ketiga	236.166.116.293	118.484.714.796	82.629.833.822	99.389.906.255	Third Party
Hutang Bank - Jatuh Tempo Satu Tahun	55.854.216.551		39.654.612.650	22.510.283.595	Bank Loans - One Year Maturity

Hutang Non Bank	-	100.560.000.000	110.000.000	50.085.974.773	Non-Bank Debt
Hutang Lain-lain - Pihak yang Berelasi	78.161.100				
Hutang Pajak	7.516.701.888	2.927.546.201	4.102.843.517	7.079.215.855	Taxes Payable
Uang Muka Pemberi Kerja - Jatuh Tempo Satu Tahun	85.401.031.535	20.485.299.993	75.335.984.097	32.162.720.316	Advances Employer - One Year Maturity
Pendapatan Diterima Dimuka	6.477.679.344	5.167.248.884	2.899.201.202	5.571.190.563	Revenue Received in Advance
Beban Yang Masih Harus Dibayar	25.534.569.810	11.266.757.872	10.304.547.576	22.332.562.460	Accrued Expenses
Hutang Sewa Pembiayaan - Jatuh Tempo Satu Tahun	9.433.066.341	7.398.975.738	6.776.397.224	980.690.647	Finance Lease Payables - One Year Maturity
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	425.461.542.862	272.637.879.144	329.915.532.850	269.643.819.836	TOTAL SHORT-TERM LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PANJANG					Long-Term Liabilities
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	10.968.966.747	9.600.069.532	11.383.674.819	11.936.710.124	Post-Employment Benefits Liability
Hutang Bank - Setelah Dikurangi Bagian Yang Jatuh Tempo Satu Tahun	221.090.729.604	136.469.931.211	100.486.293.704	139.280.144.184	Bank Debt - Net of Current Maturities of The One Year
Uang Muka Pemberi Kerja - Setelah Dikurangi Bagian Yang Jatuh Tempo Satu Tahun	31.235.638.551	55.569.939.429	65.953.255.797	86.130.719.088	Employer Advances - Net of Part A One-Year Maturity
Hutang Sewa Pembiayaan - Setelah Dikurangi Bagian Yang Jatuh Tempo Satu Tahun	7.597.512.067	4.340.838.875	4.049.638.875	12.262.891.286	Finance Lease Payable - Net of Current Maturities of The One Year
Total Liabilitas Jangka Panjang	270.892.846.969	205.980.779.047	181.872.863.195	249.610.464.682	Total Long-Term Liabilities
EKUITAS					Equity
Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk					The Equity Attributable to Owners of Parent Entity
Modal Saham - nilai nominal Rp 1.000.000 per saham					Capital Stock - par value of Rp 1,000,000 per share
Modal dasar - 40.000 saham					Authorized - 40,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor 161.555 dan 10.000 saham	161.555.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	Issued and paid 10,000 shares
Penyertaan Modal Negara	-	151.554.480.000	151.554.480.000		State Capital
Cadangan	7.584.891.200	7.585.411.200	7.585.411.200	7.585.411.200	status
Saldo Laba (Rugi)	42.602.004.393	(7.642.819.247)	(33.655.548.118)	(50.644.442.943)	reserve
Jumlah Ekuitas Yang Dapat Didistribusikan					
Kepada Pemilik Induk	211.741.895.593				
Kepentingan Non Pengendali	3.940.856.215				
TOTAL EKUITAS	215.682.751.808	161.497.072.067	135.484.343.082		TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	912.037.141.640	640.115.730.258	647.272.739.126	637.749.732.775	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

IKHTISAR KEUANGAN

Financial Highlights

Laporan Laba / (Rugi) Komperhensif

Profit / (Loss) Comprehensive

URAIAN	2012	2011	2010	2009	DESCRIPTION
PENDAPATAN USAHA	923.407.084.230	703.877,057,479	512,101,037,657	711.859.953.039	OPERATING REVENUES
BEBAN LANGSUNG	830.712.702.765	622,655,166,860	439,101,461,451	628.512.643.700	DIRECT COSTS
LABA KOTOR - SEBELUM BAGIAN LABA					GROSS PROFIT - PROFIT BEFORE
JOINT OPERATION	92.694.381.465	81,221,890,619	72,999,576,206	83.347.309.339	JOINT OPERATION
BAGIAN LABA JOINT OPERATION	79.287.874.503	27,809,457,827	20,528,291,730	22.429.180.616	THE PROFIT JOINT OPERATION
LABA KOTOR	171.982.255.968	109,031,348,446	93,527,867,935	105.776.489.955	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA					OPERATING EXPENSES
Pegawai	34.477.233.654	27,334,941,706	24,097,834,707	20.139.915.259	employee
Umum	12.962.941.263	11,611,670,886	11,142,853,165	10.370.719.588	general
Penyusutan	2.550.745.340	1,623,433,757	807,714,785	742.534.150	shrinkage
Pemasaran	2.299.506.290	2,969,553,404	2,129,265,928	1.271.232.300	marketing
Pengembangan	596.181.418				
Jumlah Beban Usaha	52.886.607.965	(43,539,599,753)	(38,177,668,586)	(32.524.401.296)	Total Operating Expenses
LABA USAHA	119.095.648.003	65,491,748,693	55,350,199,350	73.252.088.659	OPERATING PROFIT
Pendapatan (Beban) Lain-Lain					INCOME (EXPENSE) OTHER
Pendapatan Lain-Lain	10.801.747.931	19,707,285,869	11,092,073,739	5.064.056.550	Miscellaneous Income
Beban Lain-Lain	17.698.362.577	6,446,180,127	(9,359,244,643)	(9.960.684.746)	Miscellaneous Expenses
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-Lain	6.896.614.646	13,261,105,742	1,732,829,097	(4.896.628.195)	Total Income (Expenses) Other
LABA SEBELUM BEBAN BUNGA DAN PAJAK PENGHASILAN	112.199.033.357	78,752,854,436	57,083,028,447	68.355.460.464	EARNINGS BEFORE INTEREST AND TAXES
BEBAN BUNGA	(39.953.492.170)	(38,745,368,608)	(30,743,456,331)	(15.619.001.114)	INCOME
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	72.245.541.187	40,007,485,828	26,339,572,115	52.736.459.349	INTEREST EXPENSE
(BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN					INCOME BEFORE INCOME TAX
Pajak Final	(21.459.618.217)	(13,994,756,956)	(9,350,677,290)	(18.634.669.107)	(EXPENSE) INCOME TAX BENEFIT
Pajak Kini					Final tax
Pajak Tangguhan	(21.459.618.217)	13,994,756,956	9,350,677,290		Current Tax
LABA TAHUN BERJALAN	50.785.922.970	26,012,728,872	16,988,894,825	34.020.167.108	

Realisasi pendapatan 3 tahun terakhir

Realization of revenue last 3 years

Dalam jutaan rupiah

In millions of rupiah

URAIAN	2012	2011	2010	2009	DESCRIPTION
Pendapatan Usaha					revenues
Jasa Konstruksi	910.532,63	689.352,45	494.405,90	701.820,77	Construction Services
Jasa Peralatan	12.874,46	14.524,61	17.795,14	10.039,18	Equipment Services
Jumlah Pendapatan Usaha	923.407,08	703.877,06	512.101,04	711.859,95	Total Operating Revenues
Pendapatan Lain-lain	10.801,75	19.707,29	11.092,07	5.064,06	Other Income
Total Pendapatan	1.857.615,92	723.584,35	523.193,11	716.924,01	Total Revenue

Beban Perusahaan 3 tahun terakhir

The company expenses the last 3 years

Dalam jutaan rupiah

In millions of rupiah

URAIAN	2012	2011	2010	2009	DESCRIPTION
Beban Operasional					Operating Expenses
Beban Kontrak	830.712,70	622.655,17	439.101,46	628.512,64	Load Contracts
Beban Usaha :					Operating Expenses:
Pegawai	34.477,23	27.334,94	24.097,83	20.139,92	employee
Umum	12.962,94	11.611,67	11.142,85	10.370,72	general
Penyusutan	2.550,75	1.623,43	807,71	742,53	shrinkage
Pemasaran	2.299,51	2.969,55	2.129,27	1.271,23	marketing
Pengembangan Usaha	596,18				
Jumlah Beban Usaha		43.539,60	38.177,67	32.524,40	Total Operating Expenses
Jumlah Beban Operasional		666.194,77	477.279,13	661.037,04	Total Operating Expenses
Beban Non Operasional					Non Operating Expenses
Beban Lain - lain	17.698,36	6.446,18	9.359,24	9.960,68	Other Expenses - Other
Beban Bunga	39.953,49	38.745,37	30.743,46	15.619,00	Interest Expense
Jumlah Beban Non Operasional		45.191,55	40.102,70	25.579,68	Total Non Operating Expenses
TOTAL BEBAN PERUSAHAAN		711.386,32	517.381,83	686.616,72	TOTAL Expenses Company

IKHTISAR KEUANGAN

Financial Highlights

Laporan Arus Kas 3 Tahun Terakhir

Dalam jutaan rupiah

URAIAN	2012	2011	2010	2009	DESCRIPTION
Arus Kas dari (untuk) Aktivasi Operasi	29.817,42	90.053,98	4.051,70	24.858,98	Cash Flow from (to) Operating Activities
Arus Kas dari (untuk) Aktivasi Investasi	(9.951)	(25.484,45)	(23.246,30)	(17.254,83)	Cash Flow from (to) Investing Activities
Arus Kas dari (untuk) Aktivasi Pendanaan	45.205,78	(2.307,20)	(4.831,08)	24.798,20	Cash Flow from (to) Financing Activities
Kenaikan Bersih Kas & Setara Kas	65.072,20	62.262,34	(24.025,68)	(32.402,34)	Net Increase in Cash & Cash Equivalents
Kas & Setara Kas pada awal periode	130.177,76	67.290,41	91.316,08	58.913,74	Cash & Cash Equivalents at beginning of period.
Kas & Setara Kas pada akhir periode	195.249,25	129.552,74	67.290,41	91.316,08	Cash & Cash Equivalents at end of periode

Laporan Perubahan Ekuitas

Dalam jutaan rupiah

URAIAN	2012	2011	2010	2009	DESCRIPTION
Saldo per awal periode	151.555,00	135.484,34	118.495,45	(67.079,20)	Balance at the beginning of periode
Laba bersih tahun berjalan	50.816,30	26.012,74	16.988,89	34.020,17	Net income current year
Penyertaan Modal Pemerintah	-	-	-	151.554,48	Government Equity

Rasio Keuangan Selama 5 Tahun Terakhir

Dalam jutaan rupiah

URAIAN	2012	2011	2010	2009	DESCRIPTION
RENTABILITAS / RENTABILITY					PROFITABILITY / RENTABILITY
Laba Sebelum Pajak / Pendapatan	7,83%	5,68 %	5,14 %	7,41 %	Profit Before Tax / Revenue
Beban Kontrak / Pendapatan	89,95%	88,46 %	85,75 %	88,29 %	Cost of Revenue / Revenue
Laba Sebelum Pajak / Total Asset	7,94%	6,25 %	4,07 %	8,27 %	Income Before Tax / Total Asset
LIKUIDITAS / LIQUIDITY					LIQUIDITY / Liquidity
Rasio Lancar	66,05%	141,73 %	122,33 %	151,53 %	Current Ratio
Rasio Kas	45,97%	47,47 %	20,40 %	33,87 %	Cash Ratio
SOLVABILITAS / SOLVABILITY					SOLVENCY / SOLVABILITY
Rasio Hutang Terhadap Aset	130,85%	74,77 %	79,07 %	81,42 %	Liabilities/Assets
Rasio Hutang Terhadap Modal	324,16%	296,36 %	378,34 %	438,21 %	Liabilities/Equity
Rasio Hutang Terhadap Aset Tetap	260,23%	188,65 %	210,01 %	226,59 %	Liabilities/Fixed Assets

Cash Flows Graph 3 Years

In millions of rupiah



Sambutan Dewan Komisaris

The Board of Commissioner's Report

Djoko Murjanto

Komisaris Utama | President Commissioner



“Ini merupakan salah satu indikasi bahwa kebijakan dan strategi yang diterapkan selama tahun 2012 telah berada di jalur yang benar, dalam rangka memberikan kontribusi positif bagi Negara. Hasil tersebut merupakan buah dari kerja keras dari seluruh jajaran Direksi dan karyawan untuk memberikan yang terbaik, sesuai motto perusahaan.”

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa PT. Brantas Abipraya pada tahun 2012 telah mengalami peningkatan kinerja dan atas nama Dewan Komisaris menyampaikan penghargaan kepada Dewan Direksi dan seluruh jajaran PT Brantas Abipraya atas terbitnya Laporan Tahunan 2012, sebagai bagian dari upaya manajemen untuk memberikan informasi yang terbuka dan transparan kepada seluruh stakeholder. Transparansi ini merupakan salah satu sikap yang dituntut dalam pengelolaan usaha yang sehat berdasarkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Secara umum, sekali pun masih di bawah target-target yang dicanangkan dalam RKAP, hasil-hasil yang telah dicapai oleh PT Brantas Abipraya di tahun 2012 menunjukkan peningkatan signifikan dan mendapatkan kepercayaan (trust) dari

Praise and thank God we pray to Almighty God that PT. Abipraya Brantas in 2012 has increased the performance and in the name of the Board of Commissioners to thank the Board of Directors and all levels of PT Brantas Abipraya the rising of the Annual Report 2012, as part of an effort to provide information management in an open and transparent to all stakeholders. Transparency is one of attitude required in the management of a healthy order based on the principles of Good Corporate Governance (GCG).

In general, even if still below the targets promised in RKAP, the results achieved by PT Brantas Abipraya in 2012 showed an increase signifikan and gain the confidence (trust) of all the Stake Holder compared to previous years. This is one indication that the

semua Stake Holder dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ini merupakan salah satu indikasi bahwa kebijakan dan strategi yang diterapkan selama tahun 2012 telah berada di jalur yang benar, dalam rangka memberikan kontribusi positif bagi Negara. Hasil tersebut merupakan buah dari kerja keras dari seluruh jajaran Direksi dan karyawan untuk memberikan yang terbaik, sesuai motto perusahaan.

Namun demikian, Dewan Komisaris juga masih mencatat adanya beberapa hal yang perlu mendapat perhatian sebagai bahan pembelajaran, yaitu:

- Program diversifikasi pemasaran belum sepenuhnya berhasil, terlihat dari masih sangat dominannya pasar-pasar dari Pemerintah pada umumnya dan Kementerian PU pada khususnya.
- Produktivitas yang masih belum tercapai

policies and strategies adopted for the year 2012 has been on the right track, in order to provide a positive contribution to the country. The result is the fruit of hard work from the whole range of Directors and employees to give their best, according to company motto.

However, the Board of Commissioners is also still recording of a few things that need to get attention as learning materials, namely:

- Marketing diversification program has not been fully successful, highly visible from the still dominant markets of the Government in general and in particular the Ministry of PU.
- Produktivitas who have not achieved the

Laporan Dewan Komisaris

The Board of Commissioner's Report

dari target yang telah ditetapkan dan masih terdapat proyek-proyek yang rugi, baik karena kurang-cermatan perhitungan tender, kegagalan mengatasi problem sosial, kelemahan dalam administrasi kontrak maupun sebab-sebab lainnya.

Dewan komisaris menyadari sepenuhnya, bahwa jajaran manajemen telah berupaya maksimal untuk mengatasi hal-hal tersebut di atas. Banyak factor eksternal juga menjadi kendala untuk mengatasi problem-problem tersebut. Untuk itu, seluruh jajaran agar terus mengupayakan terciptanya inovasi-inovasi yang kreatif dan tidak terjebak pada kebiasaan-kebiasaan lama yang barangkali saat ini tidak lagi efektif untuk diterapkan.

Tantangan ke depan akan semakin besar. Visi dan misi perusahaan harus menjadi motivasi utama setiap jajaran untuk menghasilkan kinerja terbaik. Kondisi perekonomian global bukan merupakan hambatan, tetapi harus dijadikan tantangan dan peluang berharga untuk mengembangkan perusahaan sesuai visi dan misi yang luhur itu.

Pembenahan-pembenahan yang selama ini telah dilakukan agar terus dilanjutkan dan disempurnakan. Penerapan manajemen risiko, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem-sistem yang dianut oleh perusahaan-perusahaan yang lebih maju, agar dioptimalkan sesuai dengan kemampuan perusahaan. Kendala-kendala yang dihadapi untuk penerapan system tersebut hendaknya tidak dijadikan penghalang, tetapi harus dicarikan solusi pemecahannya agar dapat berguna bagi perusahaan.

targets that have been set and there are still projects a loss, either because of lack of tender-cermatan calculations, failure to overcome the social problem, the weakness in contract administration or other reasons.

The Board of Commissioners fully realized, that the management ranks have been working to overcome the things mentioned above. Many external factors also an obstacle to overcome problem-the problem. For the whole range to continue to empower the creation of creative innovations and not stuck in old habits are probably no longer effective at this time to apply.

The next challenge will be getting bigger. Vision and mission of the enterprise should be the main motivation of each range to produce the best performance. Global economic condition was not an obstacle, but it should be a challenge and a valuable opportunity to develop appropriate business vision and noble mission that.

Out improvements over the years have done to continue to be extended and enhanced. Risk management practices, utilization of information technology and systems embraced by enterprises that are more advanced, so that is optimized according to their ability. Constraints encountered in implementation of the system should not be a barrier, but its solution should be sought in order to be useful solutions for enterprises.

Akhirnya, kami mengharapkan agar Laporan Tahunan ini dapat dijadikan sarana untuk proses pembelajaran berkelanjutan yang pada akhirnya mampu meningkatkan kompetensi perusahaan untuk terus tumbuh dan berkembang menjadi perusahaan nasional yang terkemuka dalam industri konstruksi.

Pada kesempatan ini Dewan Komisaris menyampaikan terima kasih kepada Direksi dan segenap karyawan atas dukungan dan kerja sama yang telah ditunjukkan dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing. Semoga Tuhan selalu menyertai kita semua.

Finally, we hope that this Annual Report can be used as a means for continual learning process that ultimately will improve enterprise competency to continue to grow and develop into a national enterprise at renowned in the construction industry.

On this occasion to thank the Board of Commissioners to the Board of Directors and all employees of the support and cooperation that was shown in carrying out their respective functions. May God always be with us all.



Djoko Murjanto
Komisaris Utama | President Commissioner

Laporan Dewan Komisaris

The Board of Commissioner's Report



Eko Subekti
Komisaris
Commissioner

Djoko Murjanto
Komisaris Utama
President Commissioner

Ramli Ibrahim
Komisaris
Commissioner

HR Adhy Duriat Soemono
Komisaris
Commissioner



Laporan Dewan Direksi

The Board of Director's Report

“ Peluang pasar konstruksi di Indonesia masih cukup terbuka, walaupun dengan tingkat persaingan yang semakin ketat.....

Brantas Abipraya berhasil meraih pendapatan usaha atau sales lebih dari Rp. 923,41 milyar, meningkat 31% dibanding tahun 2011 ”



Bambang E. Marsono
Direktur Utama | President Director

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Walaupun kondisi perekonomian dunia sepanjang tahun 2012 secara umum belum bisa lepas dari pengaruh krisis ekonomi berkepanjangan yang melanda negara-negara di kawasan Eropa. Namun kita masih pantas bersyukur bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih cukup menjanjikan. Seiring dengan hal tersebut, pertumbuhan sektor konstruksi juga cukup signifikan khususnya terkait dengan pembangunan proyek-proyek infrastruktur. Sehingga peluang pasar konstruksi di Indonesia masih cukup terbuka, walaupun dengan tingkat persaingan yang semakin ketat akibat proses pengadaan yang semakin transparan.

Di tengah suasana persaingan yang semakin ketat tersebut, Brantas Abipraya berhasil meraih pendapatan usaha atau sales lebih dari Rp.

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Although global economic conditions throughout 2012 in general have not been able to escape the effects of a prolonged economic crisis that hit countries in the European region. But we should still be thankful that Indonesia's economic growth is still quite promising. Along with this, the growth of the construction sector is also quite significant particularly in relation to the construction of infrastructure projects. So that the construction market opportunities in Indonesia is still quite open, although the level of competition is getting tougher due to the procurement process more transparent.

In the midst of increasing competition, the Brantas Abipraya earned operating revenues or sales of more than Rp. 923.41 billion, an increase

of 31% compared to the year 2011. While net profit reached Rp 50, 84 billion, an increase of almost 100% compared to the year 2011. Besides Brantas Abipraya successfully defended the performance of this Decree in accordance No.KEP-100/MBU/2002 state, which in 2012 achieved the title of Brantas Abipraya Healthy similar to AA with the 2011 Healthy predicate also AA. All these achievements obtained thanks to the hard work of all management and employees, as well as the support of all stakeholders Abipraya Brantas. For it was on this occasion we would like to thank all stakeholders Brantas Abipraya the support given to us over the years. We hope this support will continue for years to come. In line with the vision of the company, which is a leading national company in the construction industry, to support business growth,

of 31% compared to the year 2011. While net profit reached Rp 50, 84 billion, an increase of almost 100% compared to the year 2011. Besides Brantas Abipraya successfully defended the performance of this Decree in accordance No.KEP-100/MBU/2002 state, which in 2012 achieved the title of Brantas Abipraya Healthy similar to AA with the 2011 Healthy predicate also AA. All these achievements obtained thanks to the hard work of all management and employees, as well as the support of all stakeholders Abipraya Brantas. For it was on this occasion we would like to thank all stakeholders Brantas Abipraya the support given to us over the years. We hope this support will continue for years to come. In line with the vision of the company, which is a leading national company in the construction industry, to support business growth,

Laporan Dewan Direksi

The Board of Director's Report

Sejalan dengan visi perusahaan, yaitu menjadi perseroan nasional terkemuka dalam industri konstruksi, guna menunjang pertumbuhan usaha, Brantas Abipraya secara terus menerus melakukan evaluasi dan pembenahan sumber daya perusahaan. Pada tahun 2012 ini, pembenahan lebih diutamakan pada sumber daya manusia dan sumber daya keuangan. Upaya tersebut diharapkan akan dapat dilihat hasilnya pada tahun 2013 mendatang.

Untuk menunjang pertumbuhan perolehan kontrak, telah dilakukan upaya diversifikasi pasar. Sepanjang tahun 2012 Brantas Abipraya telah berhasil memasuki pasar-pasar baru di antaranya: pasar proyek EPC dari PT. Perhutani, PTPN IV dan PTP XIV, Institut Pertanian Bogor, Pemda Riau dan beberapa owner swasta, khususnya untuk proyek-proyek PLTM.

Demikian, semoga apa yang dapat kami capai sepanjang tahun 2012 ini akan merupakan awal bagi langkah besar Brantas Abipraya untuk menuju masa depan yang lebih baik.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Brantas Abipraya continuous evaluation and improvement of the company's resources. In 2012, improvements are preferred in the human resources and financial resources. The effort is expected to be able to see the results in the year 2013.

To support the growth of the acquisition contract, has made efforts to diversify the market. Throughout the year 2012 Abipraya Brantas has successfully entered new markets including: EPC project market of PT. Perhutani, PTPN IV and PTP XIV, Bogor Agricultural University, The Government and some private owner, especially for micro power projects.

So, hopefully what we can accomplish throughout the year 2012 will be the start for Brantas Abipraya big step towards a better future.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh



Bambang E. Marsono
Direktur Utama | President Director

Ekodjati Tunggulgeni
Direktur Operasi II
Operation Director II

Bambang E. Marsono
Direktur Utama
President Director

C. Thomas Pangaribuan
Direktur Operasi I
Operation Director I

Sukarno Jososaputro
Direktur Keuangan dan SDM
HRD & Finance Director

Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2012

Responsibility Statement on Annual Report 2012

Laporan Tahunan ini, berikut laporan keuangan dan informasi lain yang terkait, merupakan tanggung jawab Manajemen PT Brantas Abipraya (Persero) dan telah disetujui oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan membubuhkan tandatangannya masing-masing dibawah ini.

This Annual Report along with financial statement and other related information constitute responsibility of the Management of PT Brantas Abipraya (Persero) and have been approved by all members of the Board of Commissioners and Board of Directors by signing respectively hereunder.

Jakarta, Maret 2012
PT Brantas Abipraya (Persero)


Djoko Murjanto
Komisaris Utama | President Commissioner


Eko Subekti
Komisaris | Commissioner



Komisaris | Commissioner
Adhy Duriat Soemano


Komisaris | Commissioner
Ramli Ibrahim


Bambang E. Marsono
Direktur Utama | President Director


Ekodjati Tunggulgeni
Direktur Operasional II | Operational Director II


C. Thomas Pangaribuan
Direktur Operasional I | Operational Director I


Sukarno Jososaputro
Direktur Adm dan Keuangan | HRD & Finance Director





Riwayat Perusahaan

Company History in Brief



Sejarah Brantas sebagai perusahaan konstruksi nasional berawal dari hasil pemekaran Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Kali Brantas yang lebih dikenal dengan sebutan Proyek Brantas. Gagasan pengembangan proyek Brantas tersebut bermula dari pemikiran almarhum Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Ir. Sutami dalam inspeksi kerjanya pada tahun 1970.

The history of Brantas as a national construction company has been initiated from a blossoming outcome of the River Brantas Area Development Project better known as Brantas Project. An initiative on Brantas project development was initiated from the initiative of the late Minister of Public Works and Electricity, Ir. Sutami in the inspection of his work in 1970.

Dalam inspeksi tersebut, Ir. Sutami mengemukakan tentang perlunya dipersiapkan suatu wadah untuk mengelola proyek-proyek yang akan segera selesai seperti Proyek Karangates dan Proyek Selorejo. Setelah melalui berbagai persiapan maka berdirilah Brantas berdasarkan akta notaris Kartini Muljadi, S.H., No. 88 tanggal 12 November 1980.

In the said inspection, Ir. Sutami uttered about the importance to manage projects that would be over such as Karangates and Selorejo Projects. After various preparations were carried out, then Brantas was established based upon a notarial deed of Kartini Muljadi, S.H., No.88 dated November 1980.

Riwayat perusahaan

Company History in Brief

Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir dengan akta notaris Tjipto Pranowo, S.H., di Jakarta No.15 tanggal 12 Agustus 2008. Perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dan HAM dengan Surat Kepmen No.AHU.62129.AH.01.02 tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Brantas yang berdiri menjadi sebuah perusahaan yang berbasis profit oriented ini waktu didirikan berkantor pusat di Malang, Jawa Timur. Seiring dengan perkembangan perusahaan, manajemen terus berbenah dan mendapatkan kepercayaan untuk mengerjakan berbagai macam proyek. Setelah 10 tahun berdiri, perusahaan mulai mendapatkan kontrak pekerjaan dalam bidang non pengairan (non water resources project) seperti bidang proyek jalan dan jembatan, proyek gedung dan proyek bandar udara.

Dalam usianya yang ke-12, tepatnya pada tahun 1992, Brantas berhasil menorehkan prestasi yang monumental. Itu ditandai dengan adanya kepercayaan untuk membangun PLTA Kotapanjang, Bangkinang, Riau. PLTA dengan tipe On Create Gravity Dam ini dalam pembangunannya diterapkan metode RCC (Roller Compacted on Create). Metode ini menjadi yang pertama digunakan dalam proyek pembangunan dam di Indonesia.

Seiring dengan perputaran zaman dan makin beratnya tantangan yang dihadapi, pada tahun 1995 manajemen memutuskan untuk memindahkan kantor, dari Malang ke Jakarta. Ini harus dilakukan guna menunjang kegiatan perusahaan agar dapat lebih berkembang dan pendekatan pada pusat pemerintahan.

The Company's articles of association has been amended several times, the recent one has been amended by the notarial deed of Tjipto Pranowo, S.H., in Jakarta No.15 dated August 12, 2008. The said amendment was approved by the Minister of Justice and Human Right under his Decree No.AHU.62129.AH.01.02 year 2008 concerning Approval on the Deed of Amendment to the Company's Articles of Association.

Brantas which has been established to become an oriented-profit based company, at the time of establishment, the head office was located in Malang, East Java. In line with the company improvement, the management keeps restructuring and gaining a trust to carry out various kinds of projects. After 10 years of its establishment, the company has commenced obtaining a work contract in the field of non-water resources project such as road, bridge, construction and airport projects.

At the age of 12 years, in 1992, Brantas successfully achieved a monumental achievement. It was marked by obtaining a trust to build PLTA (Water Power Plant) of Kotapanjang, Bangkinang and Riau. In its development, this PLTA under the type On Create Gravity Dam applies RCC (Roller Compacted on Create) method. Such method becomes the first one that is used in the dam construction project in Indonesia.

In line with a cycling era and hard challenge to be faced, in 1995, the management decided moving the office from Malang to Jakarta. It should be carried out in order to support the company activities so that it will develop more and close to the central government.

Keputusan memindahkan perusahaan ke Jakarta, merupakan keputusan yang tepat. Buktinya keberadaan Brantas makin diakui dan dipercaya oleh banyak pihak dengan makin berkembangnya perusahaan. Penilaian yang positif dari stakeholder dan lembaga terkait pun muncul. Pada tahun 2008, Brantas mendapatkan piagam penghargaan sebagai salah satu wajib pajak patuh dari Direktorat Jenderal Pajak dan penghargaan ini terus berlanjut hingga tahun 2012.

Tidak berhenti di situ, pada usianya yang ke-30, pada tahun 2010, Brantas mendapatkan piagam penghargaan sebagai perusahaan BUMN dan konstruksi terbaik. Penilaian itu didasarkan pada kinerja pertumbuhan usaha dan rasio keuangan dari majalah Info Bank.

Setahun kemudian, Brantas pun mendapat penghargaan dari AKI (Asosiasi Konstruksi Indonesia) sebagai kontraktor Indonesia yang paling banyak mengerjakan bendungan. Ini jelas menunjukkan prestasi yang menggembirakan sekaligus bukti bahwa Brantas sudah berjalan tepat pada jalurnya.

Atas profesionalisme yang ditunjukkan seluruh karyawan Brantas disertai dengan hasil proyek yang sempurna, maka Konstruksi Indonesia 2011 (Departemen Pekerjaan Umum) memberikan proyek konstruksi kategori bangunan gedung >8 lantai (green building). Dan peresmian gedung kantor pusat oleh Menteri Pekerjaan Umum.

Menatap perkembangan dan tantangan masa depan yang makin kompleks, manajemen membuat langkah strategis pada tahun 2011. Itu diwujudkan dengan melakukan

The decision to move the company to Jakarta is the right decision. As a proof, the existence of Brantas is admitted and trusted by numerous parties which can be seen that the company is getting developed. A positive recognition from the stakeholders and related institutions has also come up. In 2008, Brantas achieved an award as one of obedient taxpayers from Directorate General of Tax and this award is continuously achieved up to 2012.

It doesn't stop on that point, at the age of 30 years, in 2010, Brantas achieved the award as the best construction company. Such valuation is based upon a business growth performance and financial ratio as valuated by Info Bank magazine.

A year later, Brantas also achieved the award from AKI (Indonesian Construction Association) as the Indonesian contractor which works mostly for the dam project. It is obviously indicating a pleased achievement and a proof that Brantas has run on the right lane.

Upon its professionalism as shown to all employees and also a perfect project outcome, therefore, Indonesia Construction 2011 (Department of Public Works) awarded a construction project under category of 8 storied-building so-called green building. And the inauguration of the head office building was inaugurated by the Minister of Public Works.

In 2011, in facing the improvement and the upcoming challenge which is getting complicated, the management created a strategy step. It was actualized by performing a

Riwayat Perusahaan

Company History in Brief

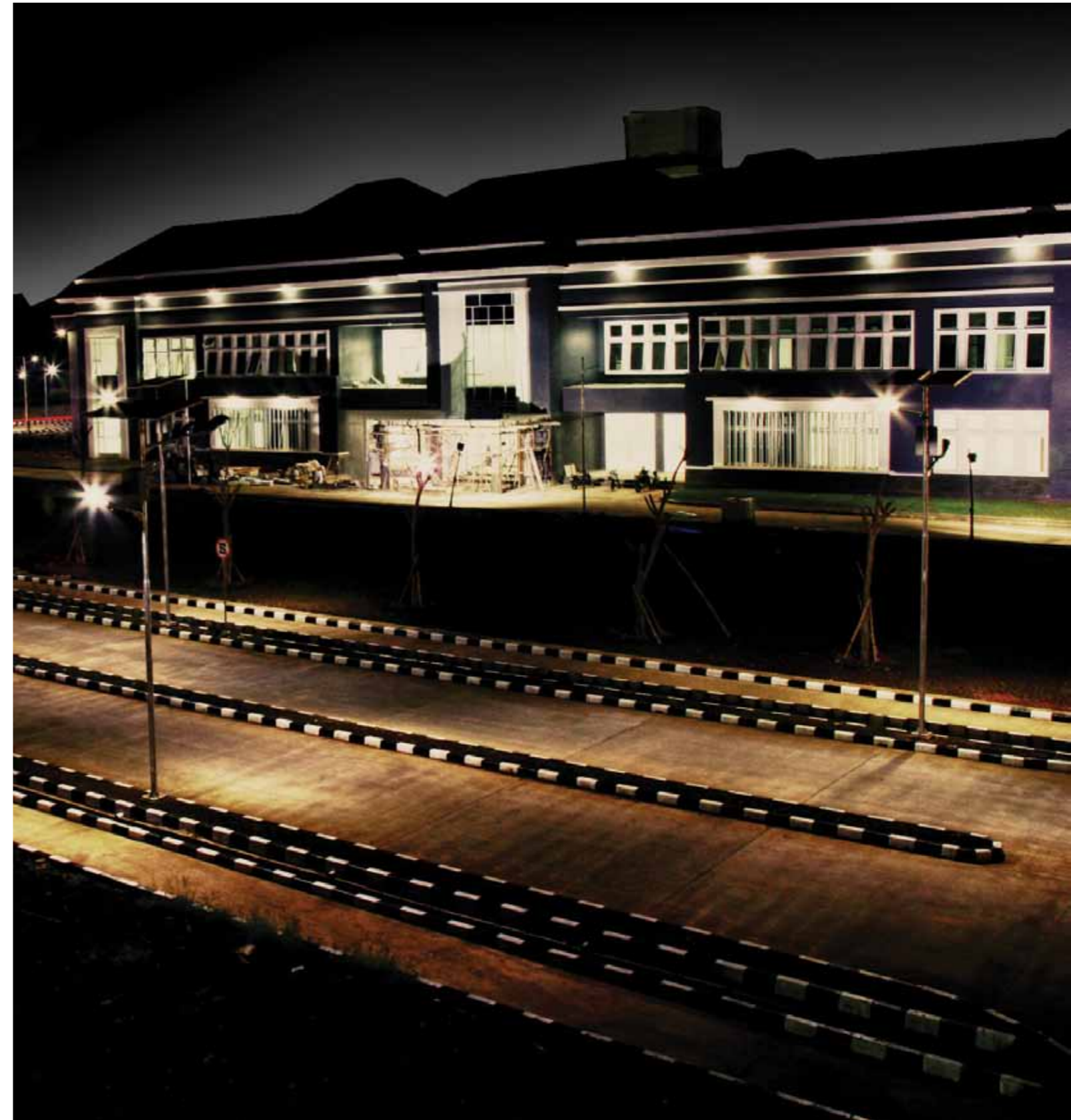
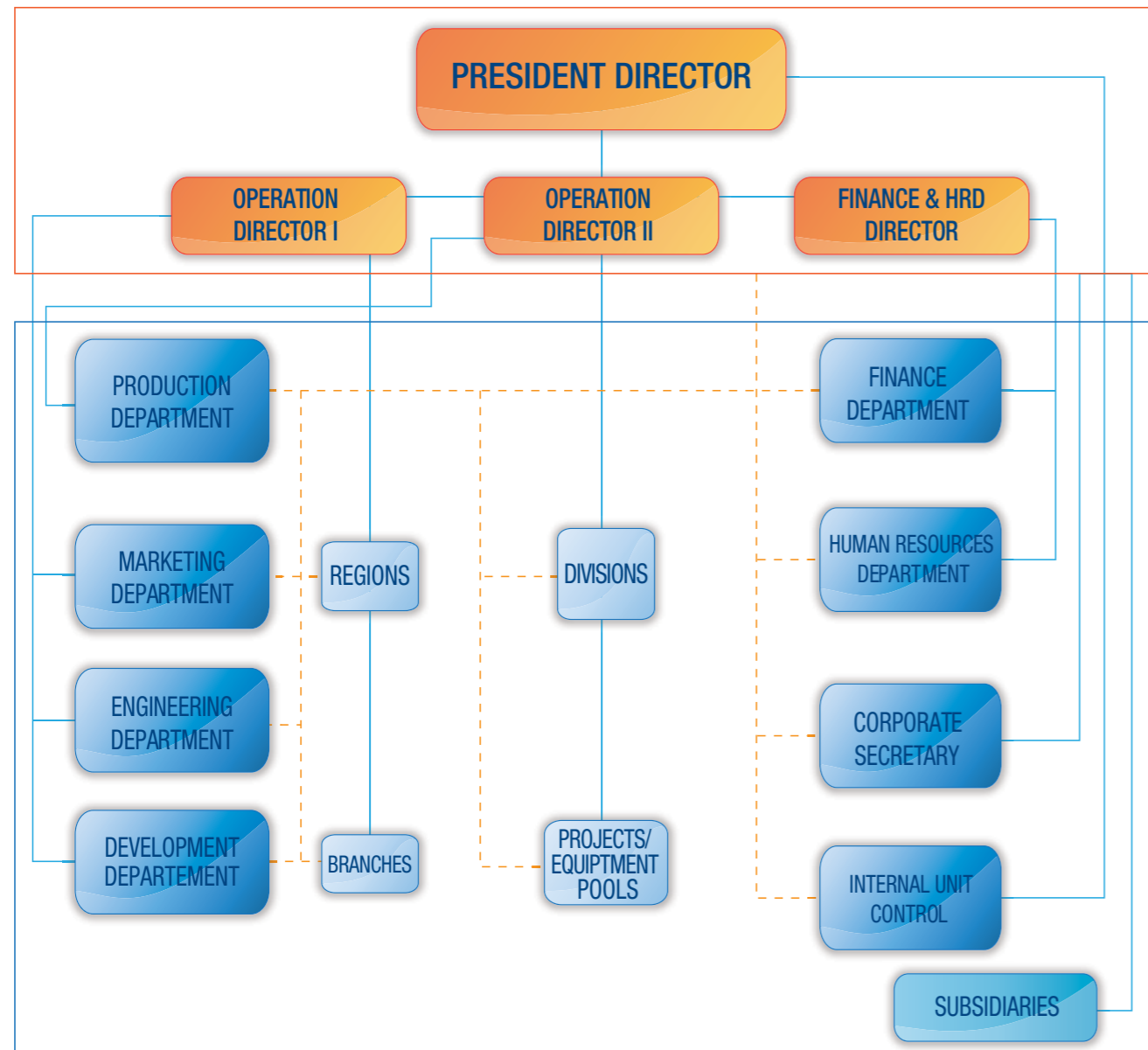
diversifikasi usaha, yakni di bidang investasi PLTM dan membentuk anak perusahaan dengan nama "Brantas Energi".

business diversification, i.e. in the field of PLTM investment and establishing subsidiary named "Brantas Energi".



Struktur Organisasi

Organization Structure



Visi misi & Budaya perusahaan

Vision Mission & Corporate Culture

Visi

“Menjadi Perseroan Nasional terkemuka dalam industri konstruksi”

Misi

- a. Menyediakan produk dan jasa enjiniring dan pelaksanaan konstruksi yang bermutu tinggi dengan layanan terbaik bagi para pelanggannya
- b. Menghasilkan laba, membangun citra, mengembangkan profesionalisme usaha berdasarkan prinsip-prinsip GCG (Good Corporate Governance), manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (K3) serta pelestarian lingkungan
- c. Peduli kepada usaha kecil, menengah dan koperasi serta masyarakat

Motto Perseroan adalah : “Semangat Memberikan Yang Terbaik” atau “Spirit of Giving the Best”

Budaya Perseroan

Sebagai pedoman berperilaku bagi seluruh jajaran Perseroan dalam bekerja dan berinteraksi di dalam lingkungan Perseroan maka PT. Brantas Abipraya telah merumuskan, mengembangkan dan mensosialisasikan Budaya Perseroan, yang terdiri dari Falsafah Kerja dan 7 Nilai.

Falsafah Kerja

Insan Brantas adalah manusia pembelajar, berintegritas dan profesional yang mampu memanfaatkan dan mengembangkan ketrampilan bisnis, manajemen dan teknologi untuk kemajuan Perseroan, kesejahteraan karyawan, kemaslahatan umat manusia dan menjaga kelestarian lingkungan.

Nilai-Nilai dalam Budaya Perseroan :

1. Jujur

- Menyampaikan data / informasi secara transparan, tepat waktu dan benar.
- Tidak menyalahgunakan jabatan, wewenang dan aset Perseroan.
- Menjunjung tinggi etika bisnis yang berlaku umum.
- Obyektif dalam memandang/menilai setiap masalah dan berlaku adil dalam melaksanakan kewajiban dan hak.

Vision

“To become a National well-known company in the construction industry”

Mission

- a. Providing the engineering products and services and high quality construction execution with the best services for its customers.
- b. Generating profit, building image, developing business professionalism based on the GCG (Good Corporate Governance) principles, occupational health safety (OHS) management as well as environmental conservation.
- c. Matter to small and medium enterprises and cooperatives and community

The Company's motto: “Spirit of Giving the Best”

Corporate Culture

As an attitude guideline for the entire levels of the Company in terms of working and interacting within the environment of the Company, then PT. Brantas Abipraya has decided, developed and socialized the Company's Culture covering the Work Philosophy and 7 Values.

The Work Philosophy

Brantas' Human is the learning, integrated and professional human who is capable of utilizing and developing business skill, management and technology for the advancement of the Company, employee's prosperity, human being advantages and of protecting environmental conservation.

Cultural values in the Company:

1. Honest

- Delivering data/information in a transparent,punctual and right manner.
- Not misusing designation, authority and company's asset.
- Highly upholding business ethics.
- Objectively handling each problem and treating fair in exercising obligation and right.

- Berani menyampaikan dan menerima pendapat.

2. Kreatif

- Menjadi insan pembelajar yang mandiri serta aktif menyumbangkan pikiran untuk kemajuan Perseroan.
- Proaktif mengidentifikasi potensi dan mencegah timbulnya masalah serta mampu menemukan solusi yang efektif dan efisien.
- Mampu meningkatkan kualitas produk dan layanan melalui pengembangan teknologi dan metode konstruksi yang unggul.

3. Tangguh

- Memiliki daya juang yang tinggi dan semangat pantang menyerah.
- Mengerahkan seluruh potensi dan daya upaya dalam mengemban tugas dan tanggung jawab.
- Memanfaatkan setiap peluang dan mengendalikan setiap risiko.

4. Tanggung Jawab

- Memenuhi komitmen kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan Perseroan.
- Memenuhi semua rencana kerja dan target-target yang ditetapkan dengan memberdayakan seluruh aset Perseroan secara efektif dan efisien.
- Disiplin menjalankan semua aturan dan memegang teguh rahasia Perseroan.

5. Konsepsional

- Bekerja dengan konsep yang jelas, sistematis dan terukur dengan berpedoman kepada Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) serta Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP).

6. Efisien

- Berperilaku hemat untuk memperoleh sebesar-besarnya keuntungan bagi Perseroan dengan memperhitungkan cost / benefit dalam setiap tindakan.

7. Kerja Sama

- Menyadari interdependensi masing-masing fungsi dalam organisasi.
- Melaksanakan fungsi masing-masing dan membangun sinergi antar fungsi dalam organisasi.
- Memiliki komitmen terhadap keberhasilan unit kerjanya sendiri dan unit kerja lain untuk pencapaian target Perseroan.

- Dare to convey and accept any opinion.

2. Creative

- Becoming an active and independent learning human in contributing idea for the Company's advancement.
- Proactively identifying potency and preventing any problem arising as well as capable of finding an effective and efficient solution.
- Able to improve product quality and services through technology development and reliable construction method.

3. Persistent

- Possessing high struggle and firm spirit
- Activating all potencies and efforts in exercising task and responsibility.
- Utilizing each opportunity and controlling each risk.

4. Responsible

- Fulfilling commitment to the interest parties with the Company.
- Fulfilling all work plans and targets defined by empowering all of the Company's assets in an effective and efficient manner.
- Undertaking all rules in a discipline manner and keeping in secret the Company's secrecy.

5. Conceptional

- Working with a clear, systematical and measured concept based upon the Company Work Plan and Budget (RKAP) and the Company Long-Term Plan (RJPP).

6. Efficient

- Applying economic principles to gain a profit as much as possible for the Company by considering cost/benefit in each act performed.

7. Cooperation

- Realizing interdependency of each function within the organization.
- Executing function respectively and building a synergy between the function and organization.
- Having a commitment towards the success of his/ her working unit and other working units in the achievement of the Company's target.

Rencana, Strategi & Program

Plans, Strategies and Programs

Prakiraan Situasi Dan Kondisi Umum Tahun 2012

Situasi Eksternal

Pasar Industri Konstruksi Nasional tahun 2012 lebih kondusif, dengan volume pembangunan yang lebih besar dibanding tahun 2011, namun demikian pelaksanaan tender proyek pemerintah khususnya di lingkungan Kementerian Pekerjaan umum banyak yang mengalami penundaan sampai triwulan III dan IV tahun 2012.

Dalam tahun 2012 perolehan kontrak baru sebesar 102 % dari RKAP 2012. Kontrak - kontrak baru yang menjadi sasaran diperoleh dalam triwulan IV/2012 + Rp. 672 M dapat diproduksi sangat kecil sehingga peluang untuk memproduksi sangat pendek.

Penjualan yang tercapai tahun 2012 masih dibawah RKAP 2012 diakibatkan adanya kontrak - kontrak carry over 2011 yang belum maksimal produksi akibat dari aspek perubahan design (Proyek Citarum), masalah sosial/pembebasan tanah (pada proyek - proyek Bajulmati, Bendung Bintang Bano dan Acces Road Cisokan, PLTM Cianten). Kontrak - kontrak baru 2012 diperoleh akhir tahun belum produksi karena masih persiapan dan konsekuensi waktu produksi sangat pendek, serta konsekuensi lainnya seperti musim hujan, yang menghambat produksi untuk menghasilkan penjualan tahun 2012 ini lebih tinggi dari target.

Kondisi Internal

a. Finansial
Kondisi Likuiditas Perusahaan tahun 2012 sudah membaik dibanding tahun 2011. Pada tahun 2012, Manajemen berupaya memaksimalkan pendanaan Intern Perusahaan yang bersumber dari dana termin dan uang muka proyek. Disamping itu perusahaan memperoleh fasilitas plafond pinjaman Modal Kerja dan Non Cash Loan dari Lembaga Perbankan (Mandiri, DBS, BNI), disamping tambahan fasilitas dari Lembaga Keuangan Non Bank (SMI). Sehingga aspek finansial pada tahun 2012 telah cukup untuk mensupport produksi proyek.

Forecast for General Situation and Condition of 2012

External Situation

National Construction Industry market in 2012 is more conducive to the development of a greater volume than in 2011, however, government bidding projects particularly in the Ministry of Public Works lot that has been delayed until the third and fourth quarters of 2012.

In the year 2012 a new contract revenue by 102% from RKAP 2012. Contract - New contract acquired in a quarterly target IV/2012 + Rp. 672 m can be produced so small that the chance to be in production very short.

In 2012 sales reached RKAP masih under contract in 2012 resulted from the availability of - contract not carry over a maximum of 2011 production as a result of changes in terms of design (Project Citarum), social problems / release of land (in the project - the project Bajulmati, Curb Star Bano and Acces Road Cisokan , PLTM Cianten). Contract - new 2012 contract yet obtained final production year for preparation and consequences are still very short production time, as well as other consequences such as the rainy season, which inhibit the production of produce sales in 2012 is higher than the target.

Internal Condition

a. Financial
Company Liquidity conditions have improved in 2012 compared to the year 2011. In 2012, Management Intern Company seeks to maximize funding sourced from the fund terms and the project advances. Besides, the company obtained a loan ceiling and Non-Cash Working Capital Loan of Banking Institutions (Mandiri, DBS, BNI), as well as additional facilities of Non-Bank Financial Institution (SMI). So the financial aspect in 2012 enough to support production.

b. Sumber Daya Alat

Sumber daya alat dimiliki belum mencukupi dan sebagian besar telah tua sehingga Perusahaan memulai program peremajaan alat dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 guna menunjang produksi proyek. Pengadaan alat tahun 2012 masih mencapai 70,67 % dari kebutuhan perusahaan karena pembelian alat disesuaikan dengan kebutuhan - kebutuhan proyek, Sisanya akan terus menerus diupayakan dengan investasi maupun mekanisme yang menguntungkan proyek. System Pengadaan peralatan diselaraskan dengan kondisi cash flow Perusahaan. Pengadaan alat ini diutamakan untuk proyek -proyek besar dan proyek - proyek di luar Pulau Jawa yang mana sistem sewa/subkontraktor setempat cukup sulit dan mahal. Pengadaan alat ini melalui analisa dan pertimbangan yang sangat hati - hati.

c. Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM akhir 2012 sebanyak 322 orang terdiri dari SDM yang berpendidikan teknik 224 (69,57 %) orang dan non teknik sejumlah 98 orang atau 30,43 %.

Dari sisi jumlah dibandingkan akhir tahun 2011 terdapat penambahan 26 orang dan perbaikan komposisi teknik/ non teknik menuju ideal yakni 70 : 30. Program rekrut pegawai dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, walaupun pengalaman 2011 sangat sulit memperoleh pegawai yang memenuhi kualifikasi perusahaan.

b. Equipment Resources

Resources and insufficient equipment owned mostly elderly so that the Company began a program of rejuvenation equipment from 2010 to 2012 to support the production of the project. Equipment procurement in 2012 still reached 70.67% of the company's requirements for the purchase of tools tailored to the needs - the needs of the project, the rest will continue to be pursued with a profitable investment projects and mechanisms. Procurement of equipment systems are aligned with the Company's cash flow conditions. The preferred procurement for major projects and projects - projects outside Java island where a lease / local subcontractors and sulit quite expensive. This equipment procurement through analysis and consideration very careful.

c. Human Capital

Number of HR 2012 as many as 322 people end consists of educated human resource techniques 224 (69.57%) and non-technical people some 98 people or 30.43%.

In terms of the amount compared to the end of 2011 there were 26 additions and improvements composition of technical / non-technical to the ideal that is 70: 30. Employee recruitment program can be implemented in a sustainable manner, although the experience of 2011 is very difficult to obtain qualified staff the company.

Asumsi - Asumsi

RKAP tahun 2012 disusun berdasarkan asumsi - asumsi sebagai berikut :

- Tingkat pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2011 sebesar 6,23% (ref: badan pusat statistik)
- Tingkat laju inflasi tahun 2012 sebesar 4,30 % (ref: bps)
- Tingkat suku bunga kredit bank sebesar 10% per tahun
- Nilai tukar US Dollar terhadap rupiah berada pada kisaran Rp. 9.250 per US Dollar.
- Pemerintah tidak menaikkan harga BBM di tahun 2012.

Based Asumptions

CBP in 2012 prepared on the assumption - the assumption as follows:

- National economic growth rate in 2011 was 6.23% (ref: National statistics agency)
- Inflation rate of 4.30% in 2012 (ref: bps)
- Bank loan interest rate of 10% per year
- Exchange rate of U.S. dollar against the rupiah in the range of Rp. 9,250 per U.S. dollar.annum will be non-productive fixed expenses.
- Then government does not increase the fuel price in 2012.

Strategi – Kebijakan Dan Program

Strategi Umum Perusahaan

Tahun 2009 adalah tahun pertama kali penjualan tembus diatas Rp 1000 miliar, dan Perusahaan berhasil membukukan laba bersih setelah pajak diatas target RKAP yaitu sebesar Rp 34 milyar dan berhasil mencapai tingkat kesehatan "Sehat AA". Tahun 2010, Perusahaan banyak sekali menghadapi kendala eksternal yang diluar kendali Perusahaan, antara lain pembebasan tanah yang belum selesai diproyek – proyek besar yang sudah dikontrak, design yang belum selesai pada proyek – proyek besar yang sudah dikontrak, serta terlambatnya tender proyek – proyek baru sampai akhir tahun. Akibat adanya kendala eksternal tersebut diatas maka Perusahaan hanya mampu mencapai volume penjualan sebesar Rp 824 miliar, jauh dibawah target RKAP, sehingga target laba setelah pajak juga tidak tercapai karena beban tetap yang harus ditanggung.

Dengan memperhatikan kinerja Perusahaan tahun 2011, situasi eksternal tahun 2012 yang diharapkan lebih kondusif, dan kondisi internal Perusahaan yang telah lebih sehat sebagaimana telah diuraikan di atas maka Perusahaan menetapkan strategi umum tahun 2012 yang belum beranjak dari strategi tahun sebelumnya yaitu "STABILISATION" dengan mengembalikan target – target Perusahaan pada alur RJPP. Dengan strategi ini Perusahaan akan lebih berkonsentrasi dalam membangun sumber daya Perusahaan, dan meningkatkan daya saing untuk menghadapi pertumbuhan usaha yang lebih besar ditahun-tahun yang akan datang.

Meskipun dalam penetapan target, Perusahaan mentargetkan penjualan tahun 2012 sebesar Rp. 1.55 triliun atau naik 87.95% dari prognosa tahun 2011 sebesar Rp. 824 milyar, tapi hal ini lebih dimaksudkan untuk menangkap peluang-peluang yang sedang terbuka, dan mengembalikan target – target Perusahaan pada alur RJPP.

Tinjauan Pencapaian Per Bidang

a. Bidang Pemasaran

Realisasi kegiatan tender diikuti dalam tahun 2012

Strategy, Policy and Program

General Strategy of the Company

In 2009 was the first sale breaking through over Rp 1,000 billion, and the Company successfully gained the profit after tax over RKAP target worth Rp 34 billion and also successfully attained a health rank under category "Healthy AA". Meanwhile, in 2010, the Company frequently faced an external obstruction beyond the Company control, i.e. unfinished land exemption in the huge projects that was under contract, unfinished design in the huge projects that was under contract, as well as delay on new project bid up to the end of year. Due to the foregoing external obstructions, the Company only reached the sales volume worth Rp 824 billion far below the RKAP target, therefore, the profit target after tax was not successfully attained since the permanent expenses had to be borne.

In observance of the Company performance 2011, and external situation of 2012 are expected more conducive and internal condition of the Company will be healthier as elaborated above, therefore, the Company defines a general strategy for 2012 which has not moved from the previous strategy namely "STABILIZATION" by returning the Company targets on the RJPP track. Along with such strategies, the Company is expected to concentrate more on developing the Company's resources and enhancing competitiveness to face a bigger business growth in the upcoming years.

Even though, in the target determination, the Company has target for the 2012 sales worth Rp 1.55 trillion or increases 87.95% of the 2011 prognosis worth Rp 824 billion, however, it is intended to catch opened opportunities and to return the Company's targets on the RJPP track.

Per Sector Strategy

a. Marketing

Realization of tender activity followed in the year

tercapai 83,93 % dari target RKAP. Realisasi tender yang lebih kecil dibanding rencananya tersebut dikarenakan mundurnya jadwal pelaksanaan tender beberapa proyek ke tahun berikutnya. Persentase kemenangan dicapai sebesar 19,79 % dibanding RKAP sebesar 18,98 %.

2012 reached 83.93% of the target CBP. Realization tender smaller than planned due to delays in the implementation of several projects to tender next year. Achieved a winning percentage of 19.79% compared to 18.98% for CBP.

Tender Activity During 2012

URAIAN	2012	2011	DESCRIPTION
Diikuti 2012	12.170.463,20	7.072.782,81	Attended
Diumumkan	9.685.154,20	6.989.662,08	Published
Dalam Proese / Belum diumumkan	2.485.299,00	883.427,05	Not Published
Dimenangkan	1.916.832,47	1.280.455,38	Won
% Kemenangan	19,79	18,32	% Win
Perolehan Kontrak Baru	2.353.269,19	1.605.119,00	New Deals
Tender	1.916.832,47	1.280.455,38	Tender
Tanpa tender	436.436,72	324.663,62	Without Tender

Tender Activity During 2012

Deal Values in 2012

URAIAN	2012	2011	DESCRIPTION
Kontrak Lama	1.797.948,02	1.866.547,32	Previous Deals
Kontrak Baru	2.353.269,19	1.605.119,00	New Deals
Jumlah	4.151.217,21	3.471.666,32	Total

Deal Values in 2012

Contract Deal per Segment

URAIAN	2012	2011	DESCRIPTION
Pengairan	1.250.793,63	1.061.654,15	Drainage
Jalan dan Jembatan	250.533,54	294.656,80	Road and Bridges
Gedung Bangunan	22.386,19	48.913,64	Building
Kelistrikan	274.234,66	403.116,02	Electricity
Lain-lain		58.206,71	Others

Contract Deal per Segment

Pengairan	1.270.686,71	1.268.910,91	Drainage
Jalan dan Jembatan	703.526,91	121.149,47	Road and Bridges
Gedung Bangunan	215.576,14	123.558,62	Building
Kelistrikan	163.479,43	91.500,00	Electricity
Jumlah Total	4.151.217,21	3.471.666,32	Jumlah Total

Rencana, strategi & program

Plan, Strategies and Programs

b. Bidang Operasi / Produksi

Realisasi produksidalam tahun buku 2012 diuraikan pada tabel berikut:

Target produksi sebesar Rp. 1.900,00 milyar tercapai sebesar Rp. 1.670,60 milyar atau 87,93 %

URAIAN	2012	2011	DESCRIPTION
Produksi dan Kontrak Baru	856,939,22	544.483,65	Production and New Deals
Proyek JO	481,023.65	315.218,98	JO Projects
Proyek Non JO	375,915,56	229,264.66	Non Jo Projects
Produksi dan Kontrak Lama	813,662,14	587.844.11	Production and Previous Deals
Proyek JO	442,383,43	380.658,07	JO Porjects
Proyek Non JO	371,278,70	199.186.04	Non JO Projects
JO Projects	923,407.08	695,877.05	JO Porjects
Non JO Projects	747,194.26	428,450.70	Non JO Projects
Jumlah Total	1.670.601,36	1.132.327,76	Total Amount

Tidak tercapainya target produksi tersebut antara lain disebabkan oleh :

- Kontrak baru tahun 2012 sebagian besar baru diperoleh pada triwulan IV/2012, sehingga kesempatan untuk berproduksi di tahun 2012 sangat kecil,
- Musim penghujan tahun 2012 praktis terjadi sepanjang tahun dengan intensitas curah hujan yang sangat tinggi di beberapa lokasi proyek sehingga sangat mengganggu kecepatan produksi dan mengakibatkan juga naiknya biaya produksi.
- Pembebasan lahan di beberapa proyek besar belum berhasil diselesaikan, sehingga pekerjaan tidak/belum bisa dilaksanakan; misalnya Jalan masuk ke PLTA Cisokan, Bendungan Bintang Bano, Proyek Jabung dan lain - lain,
- Perubahan design proyek berlarut - larut, sehingga proyek tidak berproduksi misalnya Proyek PLTM Ciantem.

c. Bidang Teknologi / Peralatan Produksi

Kegiatan pada bidang teknologi pada tahun 2012 ini difokuskan pada perbaikan dan penyempurnaan teknologi produksi (metode konstruksi) yang telah

b. Operation/Production

Actual production in the 2012 financial year are outlined in the following table: Production target of Rp.

1900.00 billion reached Rp. 1670.60 billion or 87.93%

The production shortfall is caused by:

- New contract in 2012 most of the newly acquired IV/2012 quarter, so the opportunities for production in 2012 is very small,
- Rainy season in 2012 practically occurs throughout the year with rainfall intensity is very high in some locations so that the project is very disturbing production speed and also result in increased production costs.
- Land acquisition in several major projects have not been successfully resolved, so that the work does not / can not be implemented, for example Access to Cisokan hydropower, dam Star Bano, Project Jabung and others - others,
- Changes in project design drawn - so that the project does not produce such micro power projects Ciantem.

c. Technology / Production Equipment

Activities in the field of technology in 2012 is focused on improving and improving production technology (construction method) which has owned the company.

dimiliki perusahaan. Pengembangan teknologi produksi dilakukan oleh perusahaan untuk menghasilkan biaya yang lebih efisien dan meningkatkan kualitas hasil pekerjaan.

Biaya untuk kegiatan dibidang teknologi ini dibebankan langsung pada Biaya Produksi. Metode pelaksanaan yang telah disepakati/ditetapkan pada awal proyek, dalam perjalanan dilakukan review dan dilakukan inovasi agar meningkatkan kualitas produksi, menekan biaya dan menjaga mutu.

Investasi Peralatan produksi berupa peralatan proyek melakukan secara bertahap disesuaikan kemampuan perusahaan dan kebutuhan proyek yang dilaksanakan. Pemeliharaan peralatan dilakukan secara intensif, peralatan tua yang sudah tidak layak diprogramkan dijual/dihapuskan.

d. Penelitian dan Pengembangan

Kegiatan yang dilakukan di tahun 2012 dalam Bidang Penelitian dan Pengembangan antara lain :

- Upaya diversifikasi usaha, dengan membentuk anak perusahaan bergerak dalam bidang Energy
- Membuat dan memperbaiki prosedur-prosedur, petunjuk-petunjuk kerja dan metode konstruksi.
- Upaya pengembangan jasa konstruksi pengerukan dan drilling grouting.

Kegiatan pengembangan usaha difokuskan pada usaha membangun Hidro Power (renewable energy) sebagai investor. Sesuai usulan kepada pemegang saham, perusahaan memutuskan pengembangan investasi melalui anak perusahaan.

e. Bidang Logistik

Mengingat sebagian besar proyek-proyek yang ditangani berada di remote area, maka bidang logistik ini ditangani langsung oleh proyek-proyek untuk material / sub kontraktor yang berada dekat lokasi proyek. Adapun Pengadaan yang terpusat dilakukan Kantor Pusat terbatas pada material - material industri yang nilainya besar seperti besi beton, semen, aspal dan lainnya, juga pengadaan sub kontraktor besar kelas nasional.

Development of production technology by companies to produce more cost efficient and improve the quality of the work.

Costs for this technology in the field of activity charged to Cost of Production. Implementation methods that have been agreed / defined at the beginning of the project, on the way to be reviewed and made innovations in order to improve production quality, reduce costs and maintain quality.

Production equipment in the form of equipment investment projects done gradually adjusted the company's ability and needs of projects implemented. Equipment maintenance is done intensively, old equipment is not feasible programmed sold / written off.

d. Research and Development

Activities carried out in the year 2012 in the field of Research and Development, among others:

- Efforts to diversify the business, by establishing a subsidiary engaged in the Energy
- Create and repair procedures, work instructions and method of construction.
- Efforts to develop the dredging and construction services drilling grouting.

Business development activities focused on building Hydro Power (renewable energy) as an investor. Appropriate proposals to shareholders, the company decided to invest development through subsidiaries.

e. Logistics

Considering most of the projects handled are in remote areas, the logistics are handled directly by the projects for material / sub-contractors who are near the project site. The centralized procurement conducted Headquarters limited to material - great value industrial materials like iron concrete, cement, asphalt and other sub-contractors also supply large national class.

f. Bidang Manajemen Organisasi dan Sistem

Pada tahun 2012 ini Perusahaan terus menerus melakukan penyempurnaan organisasi sebagai pendukung pertumbuhan/perkembangan perusahaan. Restrukturisasi tersebut pada intinya adalah merupakan penyempurnaan sistem sentralisasi, pemisah fungsi Pemasaran dengan fungsi perasi/ Produksi, serta merampingkan organisasi, serta memperpendek birokrasi. Perbaikan dan pembaharuan sistem juga dilakukan di tahun 2012 ini antara lain ; Perkuatan organ pemasaran ditingkat pusat dan Wilayah / Cabang, perbaikan sistim manajemen proyek, perbaikan sistem manajemen ISO 9001 - 2000 dan pembaharuan sertifikat, penerapan sistem manajemen yaitu SMK3 dan OHSAS serta ISO 14001-2004. Disamping itu, dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip-prinsip GCG dan penerapan manajemen resiko perusahaan.

g. Bidang Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai tahun 2012 direncanakan sebanyak 325 orang, namun realisasinya sebanyak 322 orang atau 99,08% dari rencana. Rincian jumlah pegawai pada tabel berikut:

URAIAN	2012	2011	DESCRIPTION
Jumlah Pegawai Awal	294	284	Number of Employee
Penambahan	42	30	Recruitment
Pengurangan	14	20	Turn Over
Jumlah Total	322	294	Total Amount

SDM tahun 2012 sebanyak 322 orang terdiri dari SDM yang berpendidikan teknik 224 (69,57%) orang dan non tehnik sejumlah 98 orang atau 30,43%. Realisasi jumlah pegawai tahun 2012 dibawah target RKAP 2012 sebanyak 325 orang. Jika dibandingkan kondisi pada akhir tahun 2011 jumlah pegawai tersebut mengalami kenaikan karena adanya rekrutmen tenaga sebanyak 42 orang. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga, perusahaan telah melakukan rekrutmen pegawai baru (fresh graduate) pada bulan Maret 2012, dan setelah dilakukan seleksi, calon pegawai terseleksi sebanyak 26 orang.

f. Organization and System Management

In 2012, the Company continuously improve the organization as a supporter of the growth / development of the company. The restructuring at its core is a centralized system refinement, separation functions with functions perasi Marketing / Production, as well as streamline the organization, as well as shortening the bureaucracy. Repair and renewal system is also carried out in the year 2012, among others; Strengthening national level marketing organ and Regional / Branch, project management system improvements, improved management system ISO 9001-2000 and renewal certificate, the application of the management system and OHSAS SMK3 and ISO 14001 - , 2004. In addition, in order to improve the application of the principles of good corporate governance and enterprise risk management implementation.

g. Human Resources

Planned number of employees in 2012 was 325 people, but its realization as many as 322 people or 99.08% of the plan. Details of the number of employees in the following table:

HR in 2012 as many as 322 people consisting of 224 human resources engineering education (69.57%) and non-technical people some 98 people or 30.43%. Realization of the number of employees in 2012 under the CBP 2012 as many as 325 targets everyone. If compared conditions at the end of 2011 the number of employees has increased due to recruitment as many as 42 people. To meet the power requirements, the company has a new recruit employees (fresh graduate) in March 2012, and after the selection, prospective employees selected 26 persons.

Untuk meningkatkan kualitas SDM, PT Brantas Abipraya telah mengintensifkan program pelatihan seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

URAIAN	UNIT	2012	2011	DESCRIPTION
Jumlah Jam Pelatihan	jam	9.385,00	7.995,00	Hours of Training
Biaya Pendidikan dan Pelatihan	jam	1,710.567,10	1,682.103,96	Training & Education Cost

Program pelatihan yang dilaksanakan masih meliputi pelatihan untuk sertifikasi dan pelatihan untuk penunjang keahlian pegawai dan peningkatan kompetensi guna menunjang operasional/kegiatan usaha perusahaan.

h. Bidang Pengawasan Intern

Satuan Pengawasan Intern dalam tahun 2012 ini telah melaksanakan objek audit seperti tabel berikut:

URAIAN	2012	2011	DESCRIPTION
Kantor Pusat (Departemen)	4	3	Head Office
Kantor Divisi	4	-	Division Office
Depo	2	-	Depot
Proyek	12	10	Project Office

i. Bidang Keuangan dan Akuntansi

Meningkatkan ketersediaan modal kerja yang bersumber dari dalam perusahaan (percepatan termin, dan penjualan aset-aset tidak produktif) dan sumber ekstern (kredit bank, supplier) serta meningkatkan pengendalian pembelanjaan proyek, BAU dan pengeluaran-pengeluaran lainnya. Menyempurnakan sistem akuntansi sesuai prinsip-prinsip standar akuntansi, dan mengintegrasikannya dalam program IISCS. Melaksanakan sistem perpajakan dan selalu mengikuti perkembangan / peraturan perpajakan untuk menghindari kerugian akibat pajak.

j. Bidang Investasi

Investasi dilakukan dengan pertimbangan yang sangat berhati-hati, hanya untuk hal-hal yang benar-benar menguntungkan perusahaan dan dengan mempertimbangkan cash flow perusahaan

To improve the quality of human resources, PT Brantas Abipraya has intensified its training program as shown in the table below:

Implemented training programs still include training for certification and training to support employee skills and competencies to support an increase in operational / business activities..

h. Intern Supervision

Intern Supervision Unit in 2012 has been implementing audit objects such as the following table:

i. Finance and Accounting

Improve the availability of working capital is sourced from within the company (acceleration terms, and the sale of non-productive assets) and external sources (bank loans, suppliers) as well as improve control spending projects, BAU and other expenses. Improving the accounting system according to the principles of accounting standards, and integrate it in IISCS program.

Implement the taxation system and keeping / tax laws to avoid losses due to taxes.

j. Investment

Investments are made with consideration to be very careful, only for things that actually benefit the company and taking into account the company's cash flow

Profil Pejabat 1 Tingkat Di Bawah Direksi

The Board Director's Profile

Kantor Pusat

Head Offices

NAMA	JABATAN	UNIT KERJA
Prawinto Aji	Sekretaris Perusahaan	Sekretariat Perusahaan
Subardjono	Kepala SPI	Satuan Pengawasan Intern
Nurtjahja	General Manager	Departemen Pemasaran
Pramono	General Manager	Departemen Teknik
Aman Prayogo	General Manager	Departemen Pengembangan
Sugeng Rochadi	General Manager	Departemen Produksi
Tumpang	General Manager	Departemen Keuangan
Sudiwanto	General Manager	Departemen Sumberdaya Manusia

Kantor Divisi

Division Offices

NAMA	JABATAN	UNIT KERJA
M. Zainul Fatah	Kepala Divisi	Divisi I
Syarif	Kepala Divisi	Divisi II
Sunarko Ambarmojo	Kepala Divisi	Divisi III
Agustinus Sudradjat	Kepala Divisi	Divisi Peralatan

Kantor Wilayah

Regional Offices

NAMA	JABATAN	UNIT KERJA
Agus Subiyantoro	Kepala Wilayah	Wilayah I, Medan
Nurtjahja	Kepala Wilayah	Wilayah II, Jakarta
Dandung Pamularno	Kepala Wilayah	Wilayah III, Surabaya
Herman Dwi Haryanto	Kepala Wilayah	Wilayah IV, Makassar
Yusup Wibisono	Kepala Wilayah	Wilayah V, Samarinda

Anak Perusahaan

Subsidiaries

NAMA	JABATAN	UNIT KERJA
Sutjipto	Direktur Utama	PT Brantas Energi
SEH Suliyantoro	Direktur	PT Brantas Energi

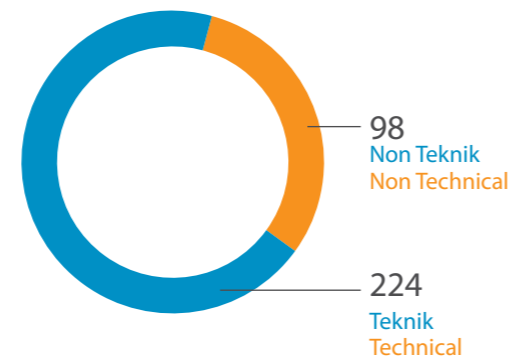
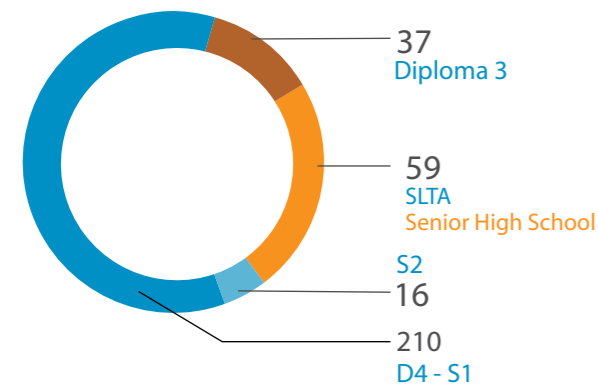


SUMBER DAYA MANUSIA

Human Resources

Sumber daya manusia di PT Brantas Abipraya (Persero) dapat digambarkan dalam berbagai komposisi. Jumlah karyawan hingga akhir 2012 adalah 322 orang, dengan komposisi sebagai berikut :

Human resources of PT Brantas Abipraya (Persero) can be elaborated in various compositions. Total employees up to the end of 2012 are 322 people with the following composition here of:



Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Employee Composition Based on Education Background

Menurut Kompetensi	Jumlah Total	Based On Competence
S2	16	S2
S1	210	S1
D3	37	D3
SLTA	59	Senior High School
JUMLAH	322	TOTAL

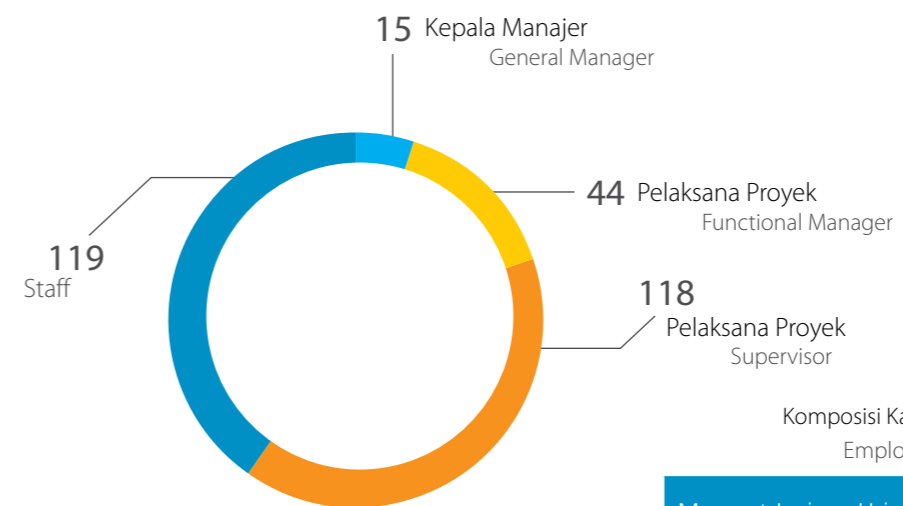
Komposisi Karyawan Berdasarkan Bidang

Employee Composition Based on Field

Menurut Kompetensi	Jumlah Total	Based On Competence
Teknik	224	Technical
Non Teknik	98	Non technical
Jumlah	322	Total

Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Organisasi

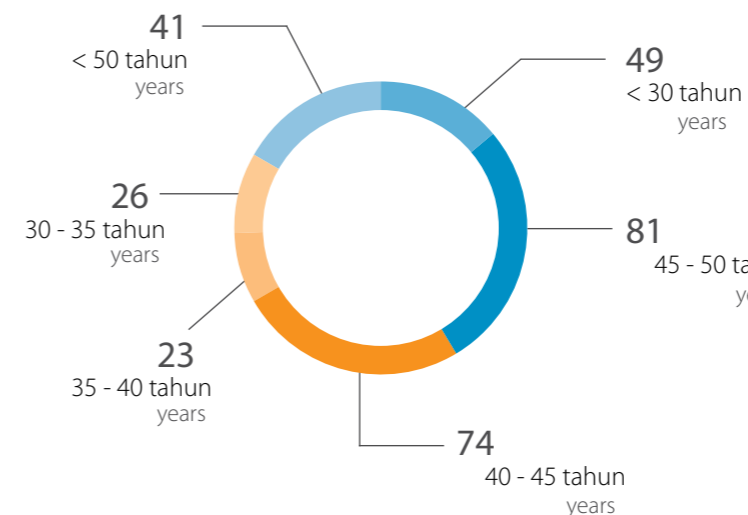
Menurut Jenjang Manajemen	Jumlah Total	Based On Management Level
General Manager	15	General Manager
Functional Manager	44	Functional Manager
Supervisor	118	Supervisor
Staff	119	Staff
Jumlah	296	Total



Komposisi Karyawan Berdasarkan Kelompok Usia

Employee Composition Based on Age

Menurut Jenjang Usia	Jumlah Total	Based on Age
> 50	41	> 50
45 - 50 tahun	81	45 - 50 years
40 - 45 tahun	74	40 - 45 years
35 - 40 tahun	23	35 - 40 years
30 - 35 tahun	26	30 - 35 years
< 30 tahun	49	< 30 years
Jumlah	294	Total



Sumber Daya Manusia

Human Resources



Sumber Daya Manusia, merupakan salah satu aset yang terpenting bagi Perseroan. Oleh karenanya, Perseroan telah menyusun program peningkatan Sumber Daya Manusia, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM melalui pengembangan Sistem Informasi Manajemen SDM, pelatihan dan pengembangan pegawai, serta penugasan pegawai dalam pengambilan gelar S2 baik di Dalam Negeri maupun di Luar Negeri.

Dalam sistem remunerasi pegawai, secara konsisten Perseroan melakukan penilaian karya pegawai setiap tahun. Penilaian tersebut digunakan sebagai dasar untuk menentukan grade setiap pegawai secara tepat dan adil, sehingga pegawai merasa termotivasi untuk memberikan yang terbaik bagi Perseroan. Di samping itu, penerapan reward & punishment juga dijalankan, baik terhadap pegawai secara individu maupun kepada kelompok kerja. Bagi yang memberikan kinerja yang luar biasa, diberikan apresiasi dengan kenaikan grade maupun bentuk lainnya, sedangkan bagi yang menyumbang kinerja kurang, juga diberikan sanksi baik melalui penurunan grade maupun bentuk lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

The Human Resources constitute one of the important assets for the Company. Hence, the Company has composed an improvement program for the Human Resources in terms of quantity or quality. The quality improvement and HR competency are carried out by developing the Information System on HR Management, training and employee development as well as employee assignment in taking the title of Post-Degree either carried out in the home country or in Overseas.

In the employment remuneration system, the Company consistently conducts an employment assessment every year. Such assessment is used as a basic to determine grade for each employee in a right and fair manner so that the employees are motivated to give their best effort for the Company. In addition thereto, an application for reward and punishment are also performed either towards the employee individually or to the working unit. For those giving a remarkable performance are awarded an appreciation by increasing grade or any other form whatsoever, meanwhile, for those contributing a less performance, they are also imposed a sanction in the form of decreasing grade or any other form whatsoever in accordance with applicable provision.

PT Brantas Abipraya (Persero) adalah perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia dan belum mencatatkan sahamnya di pasar modal. Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan dengan Akta Notaris Nomor 15 tanggal 12 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Nanda Tjipto Pranowo, SH., pada Pasal 4 menyebutkan sebagai berikut:

1. Modal dasar perseroan berjumlah sebesar Rp 40.000.000.000,- (empat puluh miliar) yang terbagi atas 40.000 (empat puluh ribu) saham, masing-masing bernilai nominal Rp 1.000.000,-
2. Dari modal tersebut telah ditempatkan/diambil bagian dan telah disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia sebanyak 10.000 saham atau seluruhnya sebesar Rp 10.000.000.000,-
3. 100% dari nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut diatas atau seluruhnya berjumlah Rp 40.000.000.000,- telah disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia ke dalam kas perseroan, dengan cara sebagai berikut:
 - Sebesar Rp 10.000.000.000,- telah ditempatkan dan disetor dengan uang tunai sebagai setoran modal lama
 - Modal dalam portepel Rp 30.000.000.000
4. Penyertaan Modal Pemerintah
Penyertaan modal Negara sebesar Rp 151,554,480,000 berupa tanah Kementerian Pekerjaan Umum seluas 24.464 m² yang terletak di Jl. Yos Sudarso Jakarta Utara sesuai dengan surat Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Pekerjaan Umum No.TN.01.11. Ka.PBMN/751 tanggal 4 Maret 2010 perihal Penyertaan Modal Negara atas Tanah Kementerian Pekerjaan Umum kepada PT Brantas Abipraya (Persero).

PT Brantas Abipraya (Persero) is the company whose shares are owned by the Government of the Republic of Indonesia and its share has not been registered in the capital market. Amendment to the Company's Articles of Association under Notarial Deed Number 15 dated August 12, 2008 drawn up before Notary Nanda Tjipto Pranowo, SH, whereby in Article 4 states as follows;

1. Authorized capital of the company totaling Rp 40,000,000,000,- (forty billion) divided into 40,000 (forty thousand) shares, each at the face value Rp 1,000,000,-
2. Of the said capital has been subscribed/taken up its division and fully paid up by the State of the Republic of Indonesia worth Rp 10,000 shares or entirely Rp 10,000,000,000,-
3. 100% of the face value of each share has been subscribed abovementioned or entirely Rp 40,000,000,000,- has been fully paid up by the State of the Republic of Indonesia
 - Rp 10,000,000,000,- has been subscribed and paid up by cash as a payment for previous capital.
 - Capital in the portfolio Rp 30,000,000,000,-
4. State equity participation amounting to Rp 151,554,480,000 Ministry of Public Works as land measuring 24,464 m², located on Jl. ODOT North Jakarta in accordance with the letter of the Head of State Property Management of the Ministry of Public Works No.TN.01.11. Ka.PBMN/751 dated March 4, 2010 concerning the Investment of the Ministry of Public Works Land PT Brantas Abipraya (Limited).

Sumber Daya Manusia

Human Resources

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT Brantas Abipraya (Persero), per 31 Desember 2012 nilai sebesar Rp 161,554,480,000 dinyatakan sebagai Modal ditempatkan dan disetor.

In accordance with the Regulation of the Government of the Republic of Indonesia Number 63 Year 2010 dated August 24, 2010 The addition of the Investment of the Republic of Indonesia to the Company's Capital Stock (Persero) PT Brantas Abipraya, per December 31, 2012 amounting to Rp 161,554,480,000 was issued to be expressed and paid Capital.



PERUSAHAAN AFILIASI

Affiliated Companies

Nama Name

PT. Brantas Energi

Bidang Usaha Business Fields

Investasi Hydroelectric Power Plant

Status Perusahaan Company Status

Swasta

Pemilik Owner

99 % dimiliki oleh PT Brantas Abipraya (Persero)

1 % Koperasi Karyawan

Tanggal Pendirian Date of Incorporation

12 Desember 2011

Dasar Hukum Pendirian Legal Bases of Incorporation

Akta No 6 Tahun 2011 Suparmin, SH, M. Kes

Susunan Perseroan Office Board

- Komisaris Utama : Suyono
- Sukarno Joso Saputro
- Direktur Utama : Subijpto
- Direktur Keuangan : Drs. Suliyantoro

Kantor Pusat Head Office

Jl. D.I. Panjaitan Kav. 14, Cawang,
Jakarta Timur 13340

Telp : (021) 851 6290

Fax : (021) 851 6095

Email : bap@brantas-abipraya.com

www.brantas-abipraya.co.id



Sertifikat Assurance No. **JKT 0402635**
Masa berlaku Sertifikat s/d 31 July 2011



Assurance Certificate No. **JKT 0402635**
Valid up to July 31, 2011



Sertifikat No. **OSH 00385** dari Sucofindo
Masa berlaku Sertifikat s/d 08 Desember 2011



Certificate No. **OSH 00385** from Sucofindo
Valid up to December 8, 2011



No. Registrasi **EMS 00100** dari Sucofindo
Masa berlaku Sertifikat 29 Maret 2010 s/d 28 Maret 2013



Registration No. **EMS 00100** from Sucofindo
Valid from March 29, 2010 to March 29, 2013



No. Registrasi **CSI.K3.SE.0002/2009**
dari Menteri Tenaga dan Transmigrasi Republik Indonesia

Registration No. **CSI.K3.SE.0002/2009**
From the Minister of Manpower and Transmigration of
the Republic of Indonesia



Regional and Branch Offices:

Head Office

Jl. D.I. Panjaitan Kav - 14
Cawang, Jakarta Timur 13340
Phone : (021) 851 6290
Fax : (021) 851 6095
Website : www.brantas-abipraya.com

Medan

Jl. Kasuari No. 8 Medan 20122
Phone : (061) 845 4391-2
Fax : (061) 845 4393

Jakarta

Jl. D.I Panjaitan Kav -14
Cawang, Jakarta 13340
Phone : (021) 857 6633
Fax : (021) 851 6095

Riau and Sumatra Barat

Jl. Nuri 21 Sukajadi
Pekanbaru-Riau
Phone : (0761) 205 97
Fax : (0761) 205 97

Semarang

Perum Perwira Diponegoro VIII No. 90
Banyumanik - Semarang
Phone : (024) 746 6304
Fax : (024) 746 6304

Palembang

Jl. Dwikora II / Jl. Pertiwi
No. 1274 B Rt. 10 Palembang
Phone : (0711) 369 928
Fax : (0711) 369 928

Banjarmasin

Perumahan Citra Raya Angkasa Blok D No.
9 Landasan Ulin, Banjar Baru 70724
Phone : (0511) 705 865
Fax : (0511) 705 865

Samarinda

Jl. Kebahagiaan No. 23 Samarinda
Phone : (0541) 736 162
Fax : (0541) 736 162

Makassar

Jl. Boulevard Blok A-3 No. 1
Panakkukang Mas, Makasar 90114
Phone : (0411) 454 490
Fax : (0411) 441 840

Surabaya

Jl. Jemur Sari Utara II No. 32
Surabaya 60237
Phone : (031) 841 2335
Fax : (031) 841 2335

Bali

Jl. Turi No.8 Kesiman, Denpasar Timur
Phone : (0361) 228 501
Fax : (0361) 228 501



Tinjauan Industri

Industrial Overview

Tinjauan Industri Industry Overview

Setelah krisis keuangan global yang melanda dunia menjelang akhir tahun 2008, tren pertumbuhan ekonomi dunia mulai merambat naik sepanjang tahun 2009. Meskipun beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Eropa belum menunjukkan pemulihan ekonomi yang bermakna, beberapa negara seperti China dan India serta negara-negara kawasan ASEAN telah memperlihatkan pertumbuhan yang mulai membaik.

Gambaran ekonomi berbagai kawasan di dunia pada tahun 2012 menunjukkan indikasi perlambatan ekonomi global. Krisis utang yang membelit perekonomian di kawasan Eropa dan permasalahan fiskal yang dihadapi Amerika Serikat menjadi faktor penyebab tertahannya ekspansi ekonomi global dan menimbulkan gejolak di pasar keuangan global. Kuatnya indikasi perlambatan ekonomi global mendorong proses lambatnya tekanan inflasi. Seiring dengan meningkatnya risiko perlambatan ekonomi global, laju pengetatan kebijakan moneter di negara berkembang mulai tertahan, sementara kebijakan moneter di negara maju masih cenderung akomodatif untuk menopang aktivitas perekonomian.

Meskipun demikian kondisi ekonomi negara Asia secara umum tetap menunjukkan hasil positif meskipun ada sedikit perlambatan. Perlambatan terjadi pada negara-negara Asia dengan penggerak ekonomi didominasi oleh ekspor, khususnya ke negara-negara maju seperti Eropa dan Amerika Serikat. Potensi krisis yang lebih besar

After the global monetary crisis near the closing of 2008, the world's trend of economic growth started to bounce back during 2009. Nonetheless, such top achievers as the US and Europe have not yet shown any significant rebounds, other powers like China and India, followed with southeastern neighbors have actually waved a good sign of growth.

Economic overview in many parts of the world in 2012 showed an indication of global economic slowdown. The debt crisis that struck European economy and the fiscal faced by the United States impeded the global economic expansion and caused turmoil in the global financial markets. Strong evidence of slowdown affected a slow process of inflation pressure. In line with the increased risk of a global economic slowdown, the pace of monetary tightening in developing countries began to hold back, while monetary policy in advanced economies tended to remain accommodative to support economic activity.

Nonetheless, economic conditions in general, Asian countries continued to show positivity in the face of slight slowdown. The slowdown occurred in Asian countries whose economic locomotives were dominated by exports, especially to the developed countries like Europe and the United States. The potential for an even greater crisis than the global

dari pasar keuangan global juga sempat membuat khawatir investor di Indonesia, baik dalam pasar modal maupun pasar uang.

Akan tetapi dengan besarnya ekonomi domestik dan rasio utang terhadap pendapatan domestik bruto yang rendah, Indonesia relatif paling sedikit terkena dampak apabila terjadi krisis ekonomi global. Dengan dukungan stabilitas makro dan sistem keuangan yang terjaga, kinerja perekonomian Indonesia selama tahun 2012 masih cukup baik. Pertumbuhan ekonomi di Triwulan IV – 2012 tumbuh sebesar 6,5% dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat cenderung menguat. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia, industri konstruksi juga mencatat kinerja yang cukup menggembirakan di tahun 2012, dalam semester pertama sektor konstruksi menorehkan kinerja yang baik, ditandai dgn kenaikan pendapatan sebesar 31,19 % dari Rp 703,89 miliar di tahun 2011 menjadi Rp 923,41 miliar di tahun 2012.

Proyek jalan/jembatan, pendapatannya menurun hingga 44,70 % untuk kontrak lama, namun untuk kontrak baru mengalami kenaikan sebesar 183,11 % . Lompatan yang cukup menggembirakan meskipun ada penurunan nilai pada kontrak lama.

Proyek pengairan membukukan kenaikan 23,96 % di kontrak lama dan 31,11 % di kontrak baru, sementara kelistrikan mencatatkan kenaikan 13,09 % di kontrak lama. Pendapatan proyek - proyek kerjasama operasi KSO atau Joint Operasi tahun 2012 naik 74,39 % dibanding tahun 2011. Berdasarkan total pendapatan, kontribusi terbesar berasal dari proyek pengairan yang mencapai 65,24 % dari total pendapatan di luar proyek Joint Operation atau mencapai Rp 602,40 miliar. Sedangkan dari total pendapatan (termasuk JO) mencapai 36,06 %.

Kenaikan pendapatan tsb menunjukkan masih

financial markets had also alarmed investors in Indonesia, both in the capital and money markets.

However, given the vast domestic economy and low ratio of debt against gross domestic product, Indonesia is relatively the least affected in any event of global economic crisis. Given the support of macro stability and a maintained financial system, Indonesia's economic performance during 2012 remained outstanding. Economic growth in the fourth Quarter - 2012 rose by 6.5% and the exchange rate against the US dollar was strengthened. Given the Indonesia's economic growth, the construction industry also stroke promising performance in 2012, in the first half of the construction sector recorded a well performance, marked with 31.19% revenue increase from Rp 703.89 billion in 2011 to Rp 923.41 billion in 2012.

Project roads / bridges, revenues declined by 44.70% for the old contract, but for a new contract has increased by 183.11%. Leap is quite encouraging despite a decrease in the value of the old contract.

Irrigation projects hit a 23.96% rise in the old contract, and 31.11% in the new contract, while electricity recorded a 13.09% increase in the old contract. The Joint Operation projects' revenues in 2012 increased by 74.39% compared to that in 2011. Referring to the total revenues, the largest contribution was from the irrigation project, reaching 65.24% of the total project revenues other than the Joint Operations or Rp 602.401 billion. In the meantime, the total revenue (including JO) reached 36.06%.

Such revenue increase shows how huge the construction

Analisa Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis

luasnya pangsa pasar konstruksi yang memungkinkan perkembangan yang berkesinambungan dari tahun ke tahun. Diharapkan pertumbuhan konstruksi bisa menjadi penggerak perekonomian Indonesia. Pertumbuhan rata-rata industri konstruksi di Indonesia sebesar 7.50%, trend positif tersebut bisa dikatakan cukup memacu pergerakan ekonomi Indonesia.

market is to enable a sustainable development year by year. It is hoped that the construction growth may inspire the Indonesian economy as a whole. The average growth of construction industry in Indonesia is 7.50%, which can be said to be sufficient to boost Indonesian economy.

Tinjauan Operasi Operation Review

Seiring dengan pertumbuhan industri konstruksi di Indonesia, perolehan kontrak baru Brantas juga mengalami peningkatan yang cukup tajam di tahun 2012 yaitu sebesar Rp 481,2 miliar meningkat 60,42 % dibanding tahun 2011 sebesar Rp 287,32 miliar. Pendapatan (Produksi) di luar proyek JO juga meningkat 31,19 % dari Rp 703,89 miliar tahun 2011 menjadi Rp 923,41 miliar di tahun 2012. Sedangkan pendapatan (produksi) termasuk proyek JO meningkat 0,05% dari Rp 1.132,31 miliar di tahun 2011 menjadi Rp 1.670,61 miliar di tahun 2012. Peningkatan pendapatan tersebut membawa dampak positif bagi pencapaian laba sebelum pajak di tahun 2012 sebesar Rp 72,30 miliar meningkat cukup signifikan yaitu 80,71 % dibanding tahun 2011 sebesar Rp 40,01 miliar.

Berdasarkan neraca dan laba rugi tahun 2012, tingkat kesehatan perusahaan sesuai dengan ketentuan Menteri Badan Usaha Milik Negara yang dinyatakan dalam Surat Keputusan No KEP-100/MBU/2002 tanggal 04 Juni 2002 berada dalam kondisi Sehat (AA) dengan nilai bobot 93,75. Kondisi tersebut sama dengan tahun 2011 dengan bobot 94.25, namun masih dalam kondisi sehat dengan predikat "AA".

Along with the growth of the construction industry in Indonesia, the acquisition of new contracts Brantas also experienced a sharp increase in 2012 amounting to Rp 481.2 billion, up 60.42% compared to the year 2011 amounted to Rp 287.32 billion. Income (production) outside JO projects also increased 31.19% from Rp 703.89 billion in 2011 to Rp 923.41 billion in 2012. While income (production) including JO projects increased 0.05% from Rp 1,132.31 billion in 2011 to Rp 1,670.61 billion in 2012. The increase in revenue is a positive impact on the achievement of pre-tax profit in 2012 amounted to Rp 72.30 billion, a significant increase is 80.71% compared to 2011 amounting to Rp 40.01 billion.

Based on the balance sheet and profit and loss in 2012, the health of the company in accordance with the provisions of the State Owned Enterprises Minister stated in Decree No. KEP-100/MBU/2002 dated June 4, 2002 to be in healthy condition (AA) with a weight value of 93.75. The condition was slightly decreased compared to the year 2011 with a weight of 94.25, but is still in good health with the title of "AA".



Pemasaran

Marketing

Realisasi & RKAP Pemasaran Tahun 2012 & 2011

Realization & RKAP of Marketing in 2012 & 2011

Dalam jutaan rupiah

in million rupiah

Uraian	RKAP Tahun 2012	Realisasi Tahun 2012	Realisasi Tahun 2011	Percentage to		Description
				% RKAP 2012	% Realization 2011	
Lelang yang diikuti	14.500.000,00	12.170.463,20	7.072.782,81	83,93	172,07	Tender followed
Lelang yang diumumkan	9.900.000,00	9.685.154,20	6.989.662,08	97,83	138,56	Tender announced
Lelang yang dimenangkan	1.879.200,00	1.916.832,47	1.280.455,38	102,00	149,70	Tender award
% Lelang yang dimenangkan	18,98 %	19,79 %	18,32 %	18,25	63,91	Tender award
Dalam Proses Belum Diumumkan	4.600.000,00	2.485.299,00	883.427,05	54,03	281,32	Without Tender
Perolehan Proyek Baru	2.079.200,00	2.353.269,19	1.605.119,00	113,18	146,61	New Projects Acquired

Realisasi perolehan Kontrak Baru tahun 2012 sebesar Rp. 2.353.269,19 juta atau mencapai 113,18% dari RKAP sebesar Rp. 2.079.200,00 juta, dan naik dari realisasi tahun 2011 yang sebesar Rp. 1.605.119,00 juta atau 146,61 %.

Realization of New Contract acquisition in 2012 of Rp. 2,353,269.19 million or 113.18% from CBP reached Rp. 2,079,200.00 million, and up from the realization in 2011 that amounted to Rp. 1,605,119.00 million or 146.61%.

Lelang Yang Dimenangkan tahun 2012 sebesar Rp. 1.916.832,47 juta atau mencapai 18,98% dari RKAP sebesar Rp. 1.879.200,00 juta, dan naik sebesar Rp 636.377,09 juta atau 149,70% dari realisasi tahun 2011 yang sebesar Rp 1.280.455,38 juta.

The gain on auction in 2012 Rp1.916,832.47 million, or 18.98% of the CBP is Rp. 1,879.200.00 million, and an increase of Rp 636,377.09 million or 149.70% from the realization in 2011 that amounted to Rp 1,280,455.38 million.

Realisasi kegiatan tender diikuti dalam tahun 2012 tercapai 83,93 % dari target RKAP. Realisasi tender yang lebih kecil dibanding rencananya tersebut dikarenakan mundurnya jadwal pelaksanaan tender beberapa proyek ke tahun berikutnya. Persentase kemenangan dicapai sebesar 19,79 % dibanding RKAP sebesar 18,98 %.

Realization of tender activity followed in the year 2012 reached 83.93% of the target CBP. Realization tender smaller than planned due to delays in the implementation of several projects to tender next year. Achieved a winning percentage of 19.79% compared to 18.98% for CBP.



Analisa Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis

Produksi

Production

Realisasi & RKAP Produksi Tahun 2012 & 2011

Realization & RKAP for Production in 2012 & 2011

Dalam jutaan rupiah

in million rupiah

Uraian	RKAP Tahun 2011	Realisasi Tahun 2011	Realisasi Tahun 2010	Persentase		Description
				% Di atas (di bawah)	% Naik (Turun) Realisasi Tahun 2010	
Kontrak Lama						
Pengairan	505.344	272.270	225.741	(46,12)	20,61	Irrigation
Jalan / Jembatan	195.000	102.546	18.450	(47,41)	455,80	Road/Bridge
Gedung / Bangunan	-	-	-	-	-	Building/ Construction
Kelistrikan	113.810	41.741	40.458	(63,32)	3,17	Electricity
Prasarana Perhubungan	-	-	-	-	-	Transportation Infrastructure
Jasa Lainny	-	-	-	-	-	Other Services
Sub Total	814.154	416.556	284.649	(48,84)	46,34	Sub Total
Kontrak Baru						
Pengairan	225.096	202.040	175.813	(10,24)	14,92	Irrigation
Jalan / Jembatan	155.194	81.748	12.246	(47,33)	567,55	Road/Bridge
Gedung / Bangunan	-	3.533	-	-	-	Building/ Construction
Kelistrikan	-	-	-	-	-	Electricity
Lain - Lain	5.556	-	21.598	(100,00)	(100,00)	Transportation Infrastructure
Jasa Lainnya	-	-	17.795	-	(100,00)	Other Services
Sub Total	385.846	287.321	227.452	(25,53)	26,32	
Total (Tanpa Proyek JO)	1.200.000	703.877	512.101	(41,34)	37,45	Total (Excl. JO Projects)
Produksi Proyek JO	350.000	428.451	312.621	22,41	37,05	JO Project Production
Total	1.550.000	1.132.328	824.722	(26,95)	37,30	TOTAL

Realisasi Produksi tahun 2012 sebesar Rp 923.407,08 juta atau hanya mencapai 71,03 % dari RKAP tahun 2012 yang sebesar Rp 1.300.000,00 juta, dan naik dari realisasi tahun 2011 sebesar Rp 853.020,02 juta atau 131,19 %, diluar realisasi produksi proyek-proyek kerja sama operasi (Joint Operation / JO) sebesar Rp 747.194,28 juta. Sehingga total realisasi produksi tahun 2012 termasuk proyek-proyek JO sebesar Rp 1.670.601,36 juta, dibawah RKAP tahun 2012 sebesar Rp 1.900.000,00 atau hanya mencapai 87,93 dari RKAP tahun 2012.

Tidak tercapainya Produksi / Pendapatan disebabkan : Kontrak baru tahun 2012 diperoleh pada triwulan keempat 2012 sehingga kesempatan untuk berproduksi sangat sempit. Musim penghujan tahun 2012 praktis terjadi sepanjang tahun dengan intensitas curah hujan yang sangat tinggi sehingga sangat mengganggu kecepatan produksi dan mengakibatkan juga naiknya biaya produksi.

Pembebasan lahan di beberapa proyek besar belum berhasil diselesaikan, sehingga pekerjaan tidak / belum bisa dilaksanakan, misalnya Jalan masuk ke PLTA Cisokan, Bendungan Bintang Bano, dan lain – lain.

Realization of Production in 2012 amounted to Rp 923,407.08 million or only reached 71.03% of the CBP in 2012 which amounted to Rp 1,300,000.00 million, and up from the realization in 2011 of Rp 853,020.02 million or 131.19%, beyond realization of projects production operation (Joint operation / JO) of Rp 747,194.28 million. So that the total actual production in 2012 including projects JO Rp 1,670,601.36 million, under CBP in 2012 of Rp 1,900,000.00 or 87.93 of RKAP only reached in 2012.

Failure to achieve production / income due to: new contract in 2012 acquired in the fourth quarter of 2012, so the opportunity to produce very narrow. Rainy season in 2012 practically occurs throughout the year with rainfall intensity is so high that very disturbing production speed and also result in increased production costs.

Land acquisition in several major projects have not been successfully resolved, so that the work does not / can not be implemented, for example, Access to Cisokan hydropower, dam Star Bano, and others - others.

Analisa Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis

Tinjauan Keuangan

Financial Overview

Hasil Usaha

Realisasi & RKAP Laba / Rugi Tahun 2012 & 2011

Realization & RKAP for Profit/Loss in 2012 & 2011

Returns

Uraian	RKAP Tahun 2012	Realisasi Tahun 2012	Realisasi Tahun 2011	Persentase Terhadap		Description
				RKAP 2012	REALISASI 2011	
				%	%	
Pendapatan Usaha	1.300.000,00	923.407,08	703.877,06	71.03	131.19	Profit
Beban Langsung	46.000,00	830.607,26	439.101	18.06	189.16	Direct Cost
Laba Kotor Usaha	173.000,00	171.963,59	109.031,35	99.40	157.72	Gross Profit
Bagian Laba JO	36.000,00	79.163,77	27.809,45	219.90	284.66	JO Profit Share
Laba Kotor Usaha setelah JO	165.000	109.031	93.528	66.08	116.58	Gross Profit after JO
Beban Usaha	46.000,00	52.885,42	43.539,60	114.97	121.47	Business Cost
Laba Usaha	133.606,00	119.078,17	66.491,75	89.13	179.09	Business Profit
Pendapatan (Biaya) Lain-lain	(10.000,00)	(6.827,63)	13.261,10	68.28	(51.49)	Other Revenue (Cost)
Laba (rugi) sebelum beban bunga dan PPh	123.000,00	115.260,64	78.752,86	93.71	146.36	Profit (loss) before tax and interest
Beban Bunga	40.000,00	39.953,49	38.745,37	99.88	103.12	Interest
Laba Sebelum PPh	83.000,00	72.297,05	40.007,49	87.10	180.71	Profit before tax
Beban Pajak	28.000,00	21.459,62	13.994,76	76.64	153.34	Tax
Laba (Rugi) Bersih	66.000,00	50.837,44	26.012,73	77.03	195.43	Net Profit (Loss)

Realisasi laba bersih tahun 2012 perusahaan sebesar Rp 50.837,44 juta berada dibawah RKAP tahun 2011 sebesar Rp 66.000 juta atau hanya mencapai 77,03 % dan naik dari realisasi laba bersih tahun 2011 sebesar Rp 26.012,73 juta atau naik menjadi 195,43% %.

Realization of the company's net profit in 2012 amounted to USD 50837.44 million under the CBP in 2011 amounting to Rp 66,000 million or only reached 77.03% and up from actual net income in 2011 amounted to USD 26,012.73 million or up to 195.43%.

Tidak tercapainya target penjualan tersebut disebabkan oleh:

- Terlambatnya perolehan kontrak – kontrak baru tahun 2012
- Kondisi cuaca / hujan yang ekstrem
- Beberapa lokasi proyek tidak bisa dikerjakan karena pembebasan lahan belum selesai
- Adanya perubahan design proyek yang sangat mendasar, sehingga proyek tersebut belum dapat dikerjakan

Non-achievement of such sales target is due to:

- Delayed new contract acquisition for 2012
- Extreme condition/rainy weather
- Some of project locations cannot be accessed for land acquisition issues
- Material change of project design that no activities can be done

Posisi Keuangan Konsolidasi

Realisasi & RKAP Posisi Keuangan Tahun 2012 & 2011

Consolidated Financial Position

Realization & RKAP Financial Position Year 2012 & 2011

Uraian	RKAP Tahun 2012	Realisasi 2012	Realisasi 2011	Persentase terhadap		Description
				RKAP 2012	REALISASI 2011	
				%	%	
Aset Lancar	470.929,43	642.729,67	386.407,46	136.48	166.33	Current Asset
Entitas Arak Perusahaan	71.000,00	-	-			
Aset Tidak Lancar	151.554,48	3.733,55	151.989,48	2.46	2.46	Non-Current Asset
Aset Tetap	85.088,93	236.495,57	84.427,40	277.94	280.12	Fixed Asset
Aset Leasing	29.080,48	27.016,13	17.291,39	92.90	156.24	Leasing Asset
Aset La in-la In	2.599,25	-	-			Other Asset
Jumlah Aset	810.252,57	909.974,91	640.115,73	112.31	142.16	Asset Amount
Liabilitas Lancar	184.726	272.929	329.916	147.75	82.73	Current Liability
Liabilitas Tidak Lancar	258.000	205.690	181.873	79.72	113.10	Non-Current Liability
Liabilitas Jangka Pendek	315.410,00	415.114,73	265.238,90	131.61	156.51	Short Term Liability
Hut a rig Leasing	24.900,00	17.030,58	11.739,82	68.40	145.07	Leasing Liability
Liabilitas Jangka Panjang	257.000,00	263.295,33	201.639,94	102.45	130.58	Long Term Liability
Ekuitas	212.942,57	214.534,27	161.497,07	100.75	132.84	Equity
Total Liabilitas & Ekuitas	810.252,57	909.974,91	640.115,73	112.31	142.16	Total Liability and Equity

Analisa Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis

Realisasi Jumlah aset tahun 2012 sebesar Rp 909.974,91 juta berada diatas RKAP tahun 2012 sebesar Rp 810.252,57 juta atau naik sebesar 136,48% dari RKAP tahun 2011, dan naik 166,33% dibanding realisasi tahun 2011 sebesar Rp. 386.407,46. Realisasi total aset diatas target RKAP, hal ini disebabkan penambahan modal dari PMN dan entitas penyertaan anak perusahaan, serta tingginya piutang usaha atas proyek – proyek loan yang belum dapat cair pada akhir tahun.

Realization of total assets in 2012 amounted to Rp 909,974.91 million is above the CBP in 2012 of Rp 810,252.57 million, an increase of 136.48% from the CBP in 2011, and up 166.33% compared to the year 2011 amounting to Rp. 386,407.46. Realization of total assets above the target CBP, this is due to the addition of PMN and capital investment subsidiary entities, and high trade receivables of the project - the project loan that can not be liquid at the end of the year.

Investasi

Realisasi & RKAP Investasi 2012 & 2011

Investment

Realization & RKAP Investment 2011 & 2010

Uraian	RKAP 2012	Realisasi 2012	Realisasi 2011	Persentase Terhadap		Description
				RKAP 2012	REALISASI 2011	
				%	%	
Tanah	-	-	-	-	-	Land
Bangunan	-	-	15.054,86	-	-	Buildings
Peralatan Proyek	28.000,00	20,143,35	7,374.04	71,94	273,17	Project Equipments
Peralatan Umum	-	-	-	-	-	General Equipments
Penyertaan Anak Perusahaan	-	-	51.480,00	-	-	Subsidiaries
Peralatan Kantor	2.000.00	15.055	18.357	11,93	(17,99)	Office Equipments
Invesatasi untuk Peralatan proyek & Bangunan Gedung Baru	30.000,00	20.143.35	22.428,90	67,14	89,81	Investment for project equipment and new Buildings
Invesatasi untuk Penyertaan Anak Perusahaan	20.000,00	20.000,00	51.480,00	100,00	38,85	Investment on Subsidiaries
TOTAL	50.000,00	40.143,35	73.908,90	80,29	100,00	TOTAL

Realisasi Investasi tahun 2012 sebesar Rp 40.143,35 juta dibawah RKAP tahun 2012 sebesar Rp 50.000 juta atau hanya 80% nya dan juga masih dibawah realisasi 2011 sebesar Rp 73.908,90 juta atau hanya 54,31 % dari realisasi tahun 2011.

Realization of investment in 2012 amounted to USD 40143.35 million under the CBP in 2012 amounting to Rp 50,000 million, or just 80% and its realization is still below 2011's Rp 73908.90 million or only 54.31% of the realization in 2011.

Sumber dana untuk investasi tersebut diambil dari akumulasi penyusutan dan leasing. Kenaikan investasi diatas RKAP dikarenakan adanya penyertaan pada anak perusahaan yang dilakukan pada Desember 2012.

Source of funds for the investment are taken from accumulated depreciation and leasing. CBP rise above investments due to investments in subsidiaries are carried out in December 2012.

Kinerja keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) nomor: KEP-100/MBU/2002 tanggal 04 Juni 2002 PT. BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) untuk tahun 2011 dengan skor 94,25 dikategorikan Sehat (AA).

Financial performance based on Decree of State Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) number: KEP-100/MBU/2002 dated June 4, 2002 PT. BRANTAS Abipraya (continued) for the year 2011 with a score of 94.25 categorized Healthy (AA).

Realisasi & RKAP Kinerja Keuangan tahun 2012 & 2011

Realization & RKAP for Financial Performance in 2011 & 2010

Kategori Kinerja	RKAP 2012	REALISASI 2012	REALISASI 2011	PROSENTASE TERHADAP		PERFORMANCE CATEGORRY
				RKAP 2012 (%)	REALISASI 2011 (%)	
Aspek Keuangan	65,75	63,75	64,25	96,96	99,22	Financial Aspect
Aspek Operasional	15	15	15	100,00	100,00	Operational Aspect
Aspek Administrasi	15	15	15	100,00	,00,00	Administrative Aspect
Jumlah	95,75	93,75	94,25	97,91	99,47	TOTAL
TINGKAT KINERJA	SEHAT	SEHAT	SEHAT			
	(AAA)	(AA)	(AA)			

Analisa Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis

Aspek Keuangan

Financial aspects

Realisasi & RKAP Penilaian Aspek Keuangan
2012 & 2011

Realization & RKAP Financial Aspect
Assessment in 2012 & 2011

Indikator	RKAP 2012	Realisasi 2012	Realisasi 2011	
Likuiditas		Liquidity		
Current Ratio	135,67	151,39	122,33	Current Ratio
Quick Ratio	129,77	145,69	114,21	Quick Ratio
Rasio Kas	33,39	45,97	20,40	Cash Ratio
Profitabilitas		Profitability		
Profit Margin	6,38	4,33	3,19	Profit Margin
Rentabilitas	44,88	44,92	7,25	Rentability
Imbal Balik Atas Ekuitas (ROE)	25,83	31,06	15,92	Return On Equity (ROE)
Leverage				
Total Hutang Terhadap Ekuitas	280,50	328,36	530,04	Total Debt to Equity
Total Aset terhadap Total Hutang (Solvabilitas)	135,65	130,85	126,47	Total Asset to Total Debt (Solvability)
Aktifitas		Activity		
Fixed Asset Turn Over	1.113,31	1.642,37	895,05	Fixed Asset Turn Over
Receivables Turn Over	482,34	458,89	774,98	Receivables Turn Over
Average Collection Period of Recivable	75,67	79,54	47,10	Average Collection Period of Recivable



Analisa Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis

Ringkasan Kinerja Keuangan Berdasarkan Key Performance Indicators

Kategori Kinerja	Bobot KPI	Pencapaian Target
CUSTOMER	12,00	12,38
BISNIS PROSES	13,00	12,98
KUALITAS	3,00	3,00
SDM	12,00	14,34
LEADERSHIP	12,00	11,94
FINANCIAL PERFORMANCE	42,00	42,20
Total Skor KPI (TSK)	100,00	101,22

Kinerja Keuangan Berdasarkan Target-Target Key Performance Indicators (Kpi)

Berdasarkan surat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) nomor : S-676/MBU/2004 tanggal 22 Desember 2004 perihal Penerapan Key Performance Indicators (KPI) , dan berdasarkan RUPS Pengesahan RKAP Perusahaan Tahun 2012 Nomor : RIS-05/D3.MBU/2011 tanggal 12 Januari 2012 yang memuat Kontrak Manajemen antara PT. Brantas Abipraya (Persero) dan Kuasa Pemegang Saham PT Brantas Abipraya (Persero). KPI dan Kontrak Manajemen merupakan komplemen dari penilaian tingkat kesehatan BUMN, sehingga Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor : KEP 100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 masih berlaku.

Financial Performance Overview Based on Key Performance Indicators

Financial Performance-Based Target Target Key Performance Indicators (Kpi)

Based on Letter of Ministry of State-Owned Enterprise (BUMN) Number: S-676/MBU/2004 dated 22 December 2004 regarding Application of Key Performance Indicators (KPI), and based on GMOS for Endorsement of Enterprise RKAP of 2012 Number: RIS-05/D3.MBU/2011 dated 12 January 2012 specifying a Management Contract between PT. BrantasAbipraya(Persero) and Authorized Shareholder of PT BrantasAbipraya (Persero). KPI and Management Contract constitute a complement of the SOE soundness assessment that the Ministerial Decree of SOE Number: KEP 100/MBU/2002 dated June 4, 2002 remains applicable.

Realisasi pencapaian target sebagaimana tertuang dalam kontrak manajemen sebesar 101,22 dari target 100 atau mencapai 101,22%, sehingga secara keseluruhan dikategorikan diatas KPI yang ditargetkan dalam RUPS. Pencapaian nilai kinerja berdasarkan aspek customer pada tahun 2012 sebesar 0.38 % yang berarti diatas bobot yang ditargetkan sebesar 12 %, sedangkan pada aspek bisnis proses sebesar 12,98 % yang berarti dibawah bobot yang ditargetkan sebesar 13 %, aspek kualitas sebesar 3 % yang berarti mencapai bobot yang ditargetkan sebesar 3%, aspek SDM sebesar 14,348 % yang berarti diatas bobot yang ditargetkan sebesar 12%, aspek leadership sebesar 11,34 % yang berarti dibawah bobot yang ditargetkan sebesar 12 %, dan aspek financial performance sebesar 42,20 % yang berarti dibawah dari bobot yang ditargetkan sebesar 42%.

BAGIAN LABA JOINT OPERATION

Bagian Laba Joint Operation selama tahun 2012 sebesar Rp 79.163,77 juta lebih tinggi sebesar Rp 43.163,77 juta atau 45,58 % bila dibandingkan dengan RKAP yang sebesar Rp 36.000 juta. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2011 sebesar Rp 27.809,46 juta, terdapat kenaikan sebesar Rp 51.354,31 juta atau 35,47 %.

Realization of the target as set out in the management contract for 101.22 from reaching the target of 100 or 101.22%, so overall categorized above the targeted KPI in the GMS. Achievement of performance based aspects of customer value in 2012 was 12:38% which means on a targeted weight sebesar 12%, while on the business aspects of the process, which means 12.98% below the target weighting of 13%, the quality aspects of 3% which means achieving weight targeted at 3%, HR aspect of 14.348% which means above the target weight of 12%, amounting to 11.34% aspects of leadership which means below the target weighting of 12%, and financial aspects of performance of 42.20% which means that under from the target weight by 42%.

PROFIT SHARE OF JOINT OPERATION

Joint Operation Profit for the year 2012 amounted to USD 79163.77 million higher at USD 43,163.77 million or 45.58% when compared to CBP's Rp 36,000 million. Meanwhile, when compared with the year 2011 amounted to USD 27809.46 million, there is an increase of USD 51,354.31 million or 35.47%.



Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Good Corporate Governance

PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN PT. BRANTAS ABIPRAYA

Pedoman Good Corporate Governance (GCG) PT. Brantas Abipraya (Persero) merupakan penjabaran dari kaidah-kaidah GCG, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik GCG pada Badan Usaha Milik Negara, Anggaran Dasar Brantas (yang perubahannya telah disahkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-62129.AH.01.02 Tahun 2008), Visi dan Misi Perseroan serta praktik-praktik terbaik dalam GCG.

Pedoman GCG ini merupakan dasar dan acuan dalam pengelolaan Perseroan. Diharapkan seluruh aktivitas Perseroan akan selaras dengan standar GCG. Pedoman GCG memuat prinsip-prinsip yang berlaku bagi seluruh aktivitas Perseroan. Brantas akan secara konsisten menginformasikan Pedoman GCG ini kepada seluruh pihak yang berkepentingan sehingga dapat memahami dan memaklumi standar kerja Perseroan yang sesuai dengan GCG.

Pedoman GCG ini merupakan acuan bagi peraturan Perseroan yang lebih detail sesuai dengan kebutuhan unit-unit organisasi dalam Perseroan. Mengingat lingkungan bisnis yang dinamis, maka Brantas akan selalu mengkaji Pedoman GCG ini secara berkesinambungan sebagai upaya mencapai standar kerja yang terbaik bagi Perseroan.

GOOD CORPORATE GOVERNANCE AT PT. BRANTAS ABIPRAYA

The Good corporate Governance (GCG) Guidelines of PT. Brantas Abipraya (Persero) entail a broad description of GCG rules, Law Number 1 of 1995 regarding Limited Liability Company, Ministerial Decree of State-Owned Enterprise Number Kep-117/M-MBU/2002 regarding Application of GCG Practices in State-Owned Enterprise, Articles of Association (of which its amendment is authorized by the Minister of Law and Human Rights through a Decree Number AHU-62129.AH.01.02 of 2008), corporate Vision and Mission and best practices of GCG.

This GCG Guidelines constitutes a foundation and hint for the company management. A fine-tuned company activity with such GCG standard is expected. The GCG Guidelines contains principles that apply to the entire company activities. Brantas will consistently inform the GCG Guidelines to all related parties in order to grasp knowledge and understanding of the corporate standard of the work in conformity to the GCG.

This GCG Guidelines must be referred for more detailed company regulations matching the needs of the organizational units under the Company. Given the dynamic business environment, Brantas will at all time review the GCG Guidelines on continual basis in order to achieve the best work standard for the Company.

Keberhasilan penerapan GCG ini bukan hanya karena tersedianya sarana/acuan tata kelola Perseroan seperti Pedoman GCG, Pedoman Etika dan Perilaku (Code of Conduct), Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter), Piagam Satuan Pengawasan Intern (Internal Audit Charter), dan sebagainya, melainkan terletak pada komitmen dari pimpinan tertinggi Perseroan yang diikuti oleh seluruh staf dan karyawan serta didukung oleh Dewan Komisaris. Pedoman GCG ini merupakan acuan langkah awal dalam pengelolaan Perseroan yang sehat dan beretika serta memberikan gambaran yang objektif dan transparan kepada stakeholders Perseroan.

Manajemen dan seluruh karyawan Persero Brantas mempunyai komitmen bersama menjalankan proses bisnis mengacu kepada persyaratan standar Sistem Manajemen Mutu ISO-9001:2000, OHSAS 18001:1999 dan SMK3, ISO 14000, serta prinsip-prinsip GCG, untuk membangun Perseroan yang tangguh dan mampu memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan, keuntungan dan nilai tambah bagi Pemegang Saham, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan bagi para karyawannya serta mampu memenuhi harapan Stakeholder lainnya.

A. Keselamatan, Kesehatan & Keamanan Lingkungan (K3L)

Manajemen dan seluruh karyawan bertanggung jawab dan terlibat langsung di dalam pemeliharaan dan penyempurnaan K3L di area kerjanya masing-masing, dengan maksud untuk:

A successful application for this GCG is not only due to availability of corporate governance facility/reference such as GCG Guidelines, Code of Conduct, Audit Committee Charter, Internal Audit Charter, and the like, but also the corporate top leader as followed by the entire staffs and employees with a full support of the Board of Commissioners. This GCG Guidelines constitutes a reference for the primary steps in sound and ethical management while providing the Company stakeholders with an objective and transparent overview.

The Brantas management and employees share a commitment to provide the business process with reference to the certified Quality Management System requirement of ISO-9001:2000, OHSAS 18001:1999 and SMK3, ISO 14000, as well as the GCG principles in order to build a strong Company that is able to provide services for the customer's satisfaction, profit and added value for the Shareholders, improved competence and wealth for the employees while meeting the expectation of other Stakeholders.

A. Environmental Safety, Health & Security (K3L)

The management and employees are responsible and directly involved in the nurturing and perfection of K3L in their respective working areas for the purpose of:

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Good Corporate Governance

- Mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan kerja
- Mengeliminasi kerugian waktu dan sumber daya Perseroan yang diakibatkan oleh K3L
- Memelihara dan menyempurnakan Keamanan Kerja, Keselamatan, Kesehatan Karyawan dan Lingkungan.

B. Mutu Produk dan / atau Pelayanan

Kendali proses dan mutu secara efektif dan efisien ditetapkan dan secara terus menerus disempurnakan. Setiap pemilik proses di semua tingkatan harus bertanggung jawab untuk melaksanakan, mengendalikan dan menyempurnakan mutu prosesnya dalam memenuhi persyaratan pelanggan.

C. Biaya

Pengendalian biaya didasarkan pada pengendalian proses, aktifitas (proses) yang tidak memberi nilai tambah dan yang tidak sesuai, akan disempurnakan secara terus menerus dengan maksud untuk :

- Memelihara dan menyempurnakan mutu proses dan mutu produk
- Menurunkan biaya proses
- Meningkatkan nilai tambah

D. Penyerahan

Tim manajemen proyek melaksanakan dan menyerahkan pekerjaan dengan tepat waktu, tepat jumlah dan tepat mutu seperti disyaratkan dalam kontrak, serta peraturan-peraturan lain yang terkait.

- Avoiding any accident and health disorder at work
- Eliminating possible corporate time and resources losses due to K3L
- Nurturing and perfection of Environmental and Employment Security, Safety, and Health.

B. Quality Product and/or Service

Effective and efficient quality and process control is defined and refined on continual basis. Each of the process owners at respective levels must be responsible for the implementation, control, and refinement of their process quality to meet the customers' requirements.

C. Cost

The cost control is based on the process control in which any unsuitable activity with fewer added values will be continually perfected for the purpose of:

- Nurturing and perfection of quality process and product
- Reducing the process cost
- Improving added value

D. Delivery

The project management team will implement and deliver works in such a timely manner at an appropriate quantity and quality as required by the contract as well as other applicable rules and regulations.

E. Sumber Daya Manusia

Membangun sikap mental dan kompetensi seluruh karyawan sesuai dengan budaya Perseroan dan prinsip manajemen yang baik, untuk mencapai Sasaran Perseroan serta harapan Stakeholder.

Dalam setiap aktivitasnya, Brantas senantiasa mengacu kepada prinsip-prinsip GCG

PRINSIP-PRINSIP GCG

A. Transparansi (Tranparancy)

Transparansi ialah keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai Perseroan. Transparansi ini diwujudkan oleh Brantas dengan selalu berusaha untuk memelopori pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan kepada berbagai pihak yang berkepentingan serta dalam pengungkapannya tidak terbatas pada informasi yang bersifat wajib. Pengungkapan informasi tersebut dilakukan Brantas dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disarankan oleh praktik terbaik GCG.

Implementasi prinsip transparansi yang dilakukan PT Brantas Abipraya antara lain :

1. Laporan Tahunan Brantas memuat informasi penting dalam pengelolaan Perseroan, antara lain tetapi tidak terbatas kepada :
 - a. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Usaha, dan Strategi Perseroan;
 - b. Kondisi keuangan hasil audit oleh eksternal auditor

E. Human Resources

Building the employees' mental attitude and competence in accordance with the corporate culture and sound management principles toward achieving the corporate targets and Stakeholders' expectation.

In each of its activities, Brantas keeps referring to the GCG principles

GCG PRINCIPLES

A. Transparency

Transparency signifies openness in disclosing material and relevant information as to the Company. This is embodied by Brantas through its best efforts at all time to pioneer the disclosure of both financial and non-financial information to whomever it may concern without limiting to that with obligatory nature. Such disclosure of information is applied by Brantas while remain in compliance with the applicable rules and regulations and as suggested by the GCG best practices.

In relation to the principle of transparency, PT Brantas Abipraya reflects it in several issues as follows:

1. Brantas Annual Report entails material information with respect to company management, including but not limited to:
 - a. corporate Vision, Mission, Objective, Target, and Strategy;
 - b. Financial condition audited by External Auditors

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Good Corporate Governance

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> c. Susunan pengurus (Direksi dan Komisaris) d. Informasi Pemegang Saham Pengendali e. Kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dan Perseroan lainnya yang memiliki benturan kepentingan f. Sistem manajemen risiko g. Sistem pengawasan dan pengendalian internal h. Sistem dan pelaksanaan GCG dan tingkat kepatuhannya i. Kejadian-kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi Perseroan j. Biodata anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris k. Remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris l. Rapat-rapat yang diadakan oleh Direksi dan Dewan Komisaris | <ul style="list-style-type: none"> c. Organization Structure (the Board of Directors and the Board of Commissioners) d. Majority Stakeholders Information e. Shareholding by the members of both the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as their relatives and other Companies having conflict of interests f. Risk management system g. Internal control system h. GCG system and implementation and compliance level i. Key issues affecting the company condition j. Curriculum vitae of the members of both the Board of Directors and the Board of Commissioners k. Remunerations of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners l. Meetings held by the Board of Directors and the Board of Commissioners |
|---|---|
2. Perseroan akan mengungkapkan informasi penting kepada stakeholder antara lain:
- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> a. Laporan triwulanan yang berisi laporan rutin manajemen, disampaikan kepada Pemegang Saham b. Prosedur pengadaan dan hubungan dengan rekanan; c. Ketaatan dalam pembayaran pajak; | <ul style="list-style-type: none"> a. Quarterly Report containing regular management description, submitted to the Stakeholders b. Procedures for procurement and relationship with partners; c. Tax compliance; |
|---|---|

- d. Mekanisme manajemen SDM, sesuai dengan PKB.

- d. HR management mechanism in accordance with the PKB.

B. Keadilan (Fairness)

Keadilan ialah kesetaraan dalam pemenuhan hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Brantas menjamin bahwa setiap pihak yang berkepentingan mendapatkan perlakuan yang adil sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Implementasi Brantas pada prinsip keadilan antara lain :

1. Pemegang Saham berhak menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Perseroan akan memperlakukan semua rekanan secara adil dan transparan;
3. Perseroan akan memberikan kondisi kerja yang baik dan aman bagi setiap pegawai sesuai dengan kemampuan Perseroan dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
4. Perseroan akan memperlakukan setiap pegawai secara adil dan bebas dari bias karena perbedaan suku, agama, asal-usul, jenis kelamin atau hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan kinerja.

C. Akuntabilitas (Accountability)

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ dan seluruh jajaran Perseroan sehingga pengelolaan Perseroan terlaksana secara efektif. Brantas meyakini bahwa akuntabilitas

B. Fairness

Fairness signifies the equal satisfaction of rights of the stakeholders arising from agreement as well as applicable laws and regulations. Brantas warrants that any concerned party is treated as fair to the broadest extent of applicable laws and regulations.

The implementation of fairness principles at Brantas includes as follows:

1. The stakeholders have rights to attend and vote in the GMOS (General Meeting of Shareholders) subject to applicable rules;
2. The Company will ensure a fair and transparent treatment to its partners;
3. The Company will ensure a good and secure working condition for every employee subject to corporate ability and applicable laws and regulations.
4. The Company will ensure a fair and unbiased treatment to its employees regardless of their race, faith, origin, gender and other unrelated backgrounds to performance.

C. Accountability

Accountability signifies a clarified function, performance and liability of the Organ and the Company at all levels toward an effective corporate implementation. Brantas believes that it closely relates to an embodiment of a

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Good Corporate Governance

berhubungan dengan keberadaan sistem yang mengendalikan hubungan antara individu dan / atau organ yang ada di Perseroan maupun hubungan antara perseroan dengan pihak yang berkepentingan.

Brantas menerapkan prinsip akuntabilitas sebagai salah satu solusi mengatasi agency problem yang timbul sebagai konsekuensi logis perbedaan kepentingan individu dengan kepentingan Perseroan maupun kepentingan Perseroan dengan pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas dapat dicapai melalui pengawasan efektif yang mendasarkan pada keseimbangan kekuasaan antara Organ Perseroan (RUPS, Komisaris dan Direksi).

RUPS sebagai organ tertinggi yang memegang semua kekuasaan yang tidak diberikan kepada organ yang lain. Komisaris melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat. Direksi bertanggung jawab dalam pengurusan Perseroan. Sedangkan akuntabilitas seluruh jajaran Perseroan berarti setiap orang bertanggungjawab atas setiap tugas yang diamanatkan kepadanya.

Brantas menerapkan akuntabilitas dengan mendorong seluruh individu dan / atau organ Perseroan menyadari hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya.

Implementasi Brantas pada prinsip Akuntabilitas adalah :

1. Perseroan menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ Perseroan (Direksi, Dewan Komisaris, SPI, SEKPER dan Organ Struktural lainnya) dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perseroan (corporate values), dan strategi Perseroan.

system that controls over relationship between individuals and/or organs within the Company and between the Company and other related parties.

Brantas applies this principle as one solution to agency problems arising as a logical consequence of diverse interests either between individuals and the Company or between the Company and other related parties. The accountability can be achieved through an effective control building upon a balanced power among the company organs (GMOS, the Board of Commissioners, and the Board of Directors).

Being the highest in the hierarchy, the GMOS holds a full power which is not given to any other organs. The Board of Commissioners undertakes control and endorsement tasks. Meanwhile, the Board of Directors is responsible for the company management activities. On the other hand, the corporate accountability at all levels indicates that each person is responsible for respective job assigned to him/her.

Brantas applies the accountability by encouraging corporate personnel and/or organs to recognize their rights and obligations, tasks and responsibilities and authorities.

The implementation of accountability principles at Brantas includes as follows:

1. The Company defines a clear job description for each of the company organs (the Board of Directors, the Board of Commissioners, SPI, Corporate Secretary and other Structural Organs) and employees in accordance with the corporate values and strategy.

2. Perseroan terus berupaya agar semua organ Perseroan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.
3. Perseroan menciptakan sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan Perseroan.
4. RUPS antara lain berwenang untuk mengesahkan rencana jangka panjang, rencana anggaran tahunan, menyetujui laporan tahunan, menetapkan pembagian keuntungan dan deviden yang dibayarkan
5. Rincian tugas Dewan Komisaris sebagaimana butir 1 sekurang-kurangnya mencakup pengawasan terhadap pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberi nasihat kepada Direksi termasuk rencana pengembangan, rencana jangka panjang, rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan, pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar dan tindak lanjut Keputusan RUPS.
6. Rincian tugas Direksi sebagaimana butir 1 meliputi pengurusan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas Perseroan untuk menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.

D. Pertanggungjawaban (Responsibility)

Pertanggungjawaban yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan Perseroan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

2. The Company keeps striving for the best efforts both the company organs and the employees build capacity that suits their tasks, responsibilities, and functions in the GCG implementation.
3. The Company creates an effective internal control system throughout the company management.
4. The GMOS authorities includes validating the long-term and annual budget plans, approving the annual report, and determining the share of paid profit and dividend
5. The Board of Commissioners' job description as mentioned above at least includes the provision of control over the company management carried out by the Board of Directors and recommendation for the same including the development plan, long-term plan, work plan and corporate annual budget, implementation of articles of association and follow-up of the GMOS Resolutions.
6. The Board of Directors' job description as mentioned above includes the company management activities in line with the agreed purposes and objectives and continues to improve efficiency and effectiveness of the Company in order to operate, maintain and manage the corporate wealth.

D. Responsibility

Responsibility in this particular signifies the suitability of the company management with applicable laws and regulations and sound company core values. Brantas is responsible for

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Good Corporate Governance

prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Brantas bertanggung jawab untuk mematuhi hukum dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, perpajakan, persaingan usaha yang tidak sehat, kesehatan dan keselamatan kerja, dan lain sebagainya.

E. Kemandirian (Independency)

Kemandirian adalah sesuatu keadaan dimana Perseroan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh / tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat. Kemandirian ini oleh Brantas diimplementasikan dengan selalu menghormati hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab serta kewenangan masing-masing Organ Perseroan. Brantas meyakini bahwa dengan implementasi prinsip kemandirian secara optimal, seluruh Organ Perseroan dapat bertugas dengan baik dan maksimal dalam membuat keputusan dan pengelolaan yang terbaik bagi Perseroan.

Implementasi Brantas pada prinsip kemandirian antara lain :

1. Diantara organ Perseroan saling menghormati hak, kewajiban, tugas, wewenang serta tanggungjawab masing-masing, tidak saling mendominasi satu sama lain.
2. Selain organ Perseroan tidak boleh mencampuri pengurusan Perseroan;
3. Komisaris, Direksi serta pegawai perseroan dalam pengambilan keputusan selalu menghindari terjadinya benturan kepentingan.

complying with the applicable laws including regulations with respect to employment, taxation, business competition, health and safety, and others.

E. Independency

This principle reflects a state in which the Company is managed in such a professional manner without conflict of interest and influence/duress by any party whatsoever potentially violating either applicable laws or sound corporate principles. At Brantas, it is applied by respecting the rights and obligations, tasks and responsibilities and authorities of each of the company organs. Brantas believes that given an optimized implementation of this principle, the entire company organs are able to perform well at their best in the company decision making as well as management.

The implementation of independency principles by Brantas includes as follows:

1. Mutual respect between company organs in terms of their respective rights and obligations, tasks and responsibilities and authorities rather than dominating each other.
2. No other than the company organs may interfere with the company management;
3. Avoidance of conflict of interests between the Boards of Commissioners and the Board of Directors as well as employees in the decision making process.

STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

A. PEMEGANG SAHAM DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Pengertian :

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ Persero yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Persero dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. Pemegang Saham PT Brantas Abipraya adalah Negara Republik Indonesia. Menteri Negara BUMN bertindak selaku RUPS dan Pemegang Saham PT Brantas Abipraya (Persero).

Umum :

1. RUPS dalam Perseroan terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya yang disebut RUPS Luar Biasa yang dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
2. RUPS merupakan forum bagi Komisaris dan Direksi untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas serta kinerjanya kepada Pemegang Saham.
3. RUPS menyetujui/mengesahkan Laporan Tahunan, RKAP, dan RJPP dengan tepat waktu.

STRUCTURE OF CORPORATE GOVERNANCE

A. SHAREHOLDERS AND GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMOS)

Definition:

The General Meeting of Shareholders (GMOS) is a company organ with the highest controlling power having every authority unlike that given to either the Board of Directors or the Board of Commissioners. The Shareholder of PT Brantas Abipraya is the Government of the Republic of Indonesia. The Minister of State-Owned Enterprise shall act as the GMOS and Shareholder of PT Brantas Abipraya (Persero).

General:

1. The GMOS comprises both annual and extraordinary GMOS in which the latter may be held from time to time as deemed necessary.
2. The GMOS serves as a forum for the Board of Commissioners and the Board of Directors to present their accountability report on their task implementation and performance to the Shareholders.
3. The GMOS gives sanction/validation upon the Annual Report, RKAP, and RJPP in punctual manner.

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Good Corporate Governance

4. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan oleh RUPS, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan (acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut ternyata (tergambar) dalam laporan tahunan termasuk laporan keuangan serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Pemegang Saham memiliki mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi.
6. Pemegang Saham memiliki mekanisme penilaian kinerja Perseroan dan penilaian kinerja masing-masing Komisaris dan Direksi.
7. Pemegang saham tidak diperkenankan mencampuri kegiatan operasional Perseroan yang menjadi tanggung jawab Direksi.

Hak – Hak :

1. Menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS.
2. Memperoleh penjelasan lengkap dan informasi yang akurat berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS.
3. Memperoleh informasi material mengenai Perseroan secara tepat waktu dan teratur.
4. Menerima pembagian dari keuntungan Perseroan dalam bentuk deviden dan pembagian keuntungan lainnya.

4. The approval for the Annual Report, including financial report validation by the GMOS, indicates an acquit et de charge for the two Boards' members on their management and control activities performed during the passing year, to the extent that such performance is best illustrated in the annual report, which includes executive and financial summaries, and in compliance with the applicable provisions.
5. The Shareholders have a special mechanism for the Board of Commissioners and the Board of Directors assignment and removal.
6. The Shareholders have a special mechanism for performance evaluation of either the corporate or the Board of Commissioners and the Board of Directors.
7. The Shareholders may not interfere with the corporate operational activities for which the Board of Directors is responsible.

The Rights:

1. To attend and vote in the GMOS.
2. To obtain complete explanation and accurate information with respect to the implementation of the GMOS.
3. To obtain material information with respect to the company in punctual and periodic manner.
4. To receive shared corporate profit in the form of dividend as well as other types of profit distribution.

B. KOMISARIS

Pengertian :

Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroan.

Umum :

1. Anggota Komisaris diangkat berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, memahami masalah masalah manajemen Perseroan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
2. Sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari anggota Komisaris berasal dari luar Perseroan yang bebas sehingga diharapkan dapat membangun peningkatan profesionalisme di Perseroan.
3. Komposisi Dewan Komisaris seyogyanya mencerminkan berbagai keahlian yang saling mendukung pelaksanaan tugas Komisaris. Apabila diperlukan, Komisaris dapat membentuk komite-komite atau mendatangkan staf ahli yang diperlukan untuk membantu tugasnya atas beban Perseroan.
4. Komisaris memiliki Sekretaris Komisaris yang dapat menjalankan fungsi kesekretariatan secara memadai.

B. THE BOARD OF COMMISSIONERS

Definition:

The Board of Commissioners is the company organ assigned to provide control and recommendation for the Board of Directors in the execution of company management.

General:

1. The members of the Board of Commissioners are appointed in the considerations of integrity, dedication, understanding on the company management issues in relation to any management functions, having excellent knowledge of the company business field, and being able to dedicate sufficient time to carry out their tasks.
2. No less than 20% (twenty percent) of the Board members come from independent persons outside the Company that an improved professionalism within the Company can be expected.
3. The Board of Commissioners should reflect a broad extent of expertise for mutual support in their task implementation. When necessary, the Board of Commissioners may either form committees or introduce expert staff as required to facilitate their tasks at the company expenses.
4. The Board of Commissioners has the Board of Commissioners' Secretary to carry out satisfactorily administrative functions.

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Good Corporate Governance

- Untuk membantu tugas-tugas pengawasan Perseroan, Komisaris wajib membentuk Komite Audit.

Tugas dan Tanggung Jawab :

- Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan.
- Komisaris berhak memperoleh informasi Perseroan secara tepat waktu dan lengkap.
- Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
- Komisaris harus memantau efektivitas pelaksanaan GCG yang diterapkan Perseroan.

C. DIREKSI

Pengertian :

Direksi adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Umum :

- Anggota Direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku

- In order to help the company control activities, the Board of Commissioners shall introduce an Audit Committee.

Tasks and Responsibilities:

- The Board of Commissioners in good faith and full responsibility is to carry out their tasks for the best interests of the Company.
- The Board of Commissioners reserves the rights to obtain information with respect to the company in punctual and complete manner.
- In performing their tasks, the Board of Commissioners must comply with the articles of association as well as applicable laws and must realize such principles as professionalism, efficiency, transparency, independency, accountability, responsibility and fairness.
- The Board of Commissioners must monitor the effectiveness of the GCG implementation by the Company.

C. THE BOARD OF DIRECTORS

Definition:

The Board of Directors is the company organ responsible for the company management for the best interests of the Company while acting as its representatives whether inside or outside the court.

General:

- The Board members are appointed in considerations of their expertise, integrity, leadership, experience, good attitude

yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perseroan.

- Komposisi Direksi harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen dalam arti tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugasnya secara mandiri dan kritis.
- Paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah anggota Direksi harus berasal dari kalangan di luar Perseroan yang bebas dari pengaruh anggota Komisaris dan anggota Direksi lainnya serta Pemegang Saham.
- Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
- Pendalaman pengetahuan sebagai bagian dari program peningkatan kompetensi bagi tiap anggota Direksi sangat penting untuk menjamin agar Direksi tetap mengikuti perkembangan baru dalam industri jasa konstruksi.

Tugas dan Tanggung Jawab :

- Direksi bertugas untuk mengelola Perseroan dan wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham.

and eminent dedication for the company progress and development.

- The Board must be such composed that an effective, appropriate and quick decision making can be realized in addition to independence in that every action is free of interests which may alter their ability to carry out their tasks in an independent and critical manner.
- No less than 20% (twenty percent) of the Board members come from outside the company circle to ensure freedom of influences by the members of the Board of Commissioners, fellow members of the Board of Directors, and the Shareholders.
- The job and authority distribution of each member is determined by the GMOS. In respect of the GMOS does not determine such job and authority distribution, it shall thus be determined based on the resolution of the Board of Directors.
- Intensified know-how as part of the competence improvement program for each member is highly essential to ensure that the Board is kept updated with the new development in the construction service industry.

Tasks and Responsibilities:

- The Board of Directors is to undertake the company management and account for their task implementation to the Shareholders.

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Good Corporate Governance

- Direksi dalam mengurus Perseroan melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh RUPS sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar.
- Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran dan perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan Perseroan.
- Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dan secara tanggung renteng bertanggung jawab atas keputusan Direksi.
- Direksi wajib membantu dan memberi dukungan sepenuhnya kepada SPI dalam melaksanakan tugasnya, serta melakukan tindak lanjut atas hasil temuan SPI.

D. Komite Audit

Pengertian :

Komite Audit adalah organ pendukung yang dibentuk Komisaris untuk membantu dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Perseroan. Salah seorang anggota Komite adalah anggota Komisaris yang sekaligus berkedudukan sebagai Ketua Komite.

- In carrying out the company management activities, the Board is to perform as guided by the GMOS to the extent that no laws and/or articles of association are violated.
- Each of the Board members in good faith and full responsibility is to perform their tasks for the best interests of the Company and in compliance with the applicable laws and regulations.
- In implementing their task, the Board members dedicate all efforts, thoughts and attentions fully on their tasks and liabilities as well as achievement of the company objectives.
- Each of the Board members takes full and personal responsibility if found to be at fault or negligence in their performance and is severally responsible for the Board's decision making.
- The Board facilitates and fully supports the SPI in carrying out their tasks and takes follow-up actions upon the SPI findings.

D. Audit Committee

Definition:

The Audit Committee serves as a supporting organ introduced by the Board of Commissioners to assist in the company management control function. One member of this Committee is of the Board of Commissioners to act as a committee chairman.

Tugas Pokok dan Fungsi :

- Komite Audit bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dalam melaksanakan tugasnya.
- Komite Audit bertugas membantu Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas Auditor Eksternal dan Auditor Internal (SPI).
- Komite Audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggungjawab langsung kepada Komisaris.
- Anggota Komite Audit harus memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan dan di bidang-bidang lainnya yang dianggap perlu sehingga dapat melaksanakan fungsinya secara optimal.
- Ruang lingkup tugas, wewenang, dan tanggung jawab Komite Audit akan diuraikan lebih rinci dalam Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter).

E. SATUAN PENGAWASAN INTERN (SPI)

Pengertian :

Satuan Pengawasan Intern merupakan aparat pengawas intern Perseroan yang bertanggungjawab kepada Direktur Utama.

Main Task and Function:

- The Audit Committee works as a team to assist the Board of Commissioners' task implementation.
- The Audit Committee assists the Board of Commissioners in ensuring an effective internal control system and effective task implementation either External or Internal Auditor (SPI).
- The Audit Committee is independent in its task implementation and reporting and be responsible directly to the Board of Commissioners.
- The Audit Committee must reflect good integrity and knowledge in addition to sufficient work experience in the field of control/audit and other specialties as deemed necessary in order to perform its function optimally.
- The scope of work, authority and responsibility of Audit Committee is described in more details in the Audit Committee Charter.

E. INTERNAL CONTROL UNIT (SPI)

Definition:

The Internal Control Unit comprises the company control apparatus responsible to the President Director.

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Good Corporate Governance

Tugas Pokok dan Fungsi :

1. SPI bertugas membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan intern keuangan dan pemeriksaan operasional Perseroan serta menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada Perseroan serta memberikan saran-saran perbaikan.
2. SPI memberdayakan diri sebagai strategic business partner bagi Direksi dengan memberikan masukan masukan dan pertimbangan terhadap hal-hal strategis yang dihadapi Perseroan.
3. SPI didukung oleh personil dengan kualitas, kompetensi, dan kuantitas yang memadai untuk pelaksanaan tugasnya.
4. Untuk menjaga kualitas hasil audit, SPI bekerja secara independen sesuai dengan Standar Profesi Auditor Internal dan Pedoman Kerja SPI.
5. SPI wajib menyampaikan laporan hasil pemeriksaan dan pekerjaan lainnya kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Komite Audit/Komisaris dan pihak-pihak lain yang dianggap tepat.
6. Personil SPI senantiasa mengembangkan keahlian dan pengetahuan guna menjamin kualitas auditnya.
7. Kedudukan, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban SPI dituangkan dalam internal Audit Charter (Piagam Audit SPI).

Main Task and Function:

1. The SPI assists the President Director in the internal audit of company financial and operational and in the assessment of company control, management and implementation and gives recommendations for improvement.
2. The SPI empowers itself as a strategic business partner for the Board of Directors by providing feedback and considerations with respect to strategic issues dealt with by the Company.
3. The SPI is supported by personnel with adequate quality, competence and quantity to perform their tasks.
4. To maintain the quality audit result, the SPI will work independently subject to the Internal Auditor Professional Standard as well as the SPI Work Guidelines.
5. The SPI submits the audit result as well as other report and deliveries to the President Director with a carbon copy to the Audit Committee/Board of Commissioners and other concerned parties as deemed appropriate.
6. The SPI personnel at all time develops their expertise and knowledge to ensure a quality audit.
7. The position, authority, responsibility and accountability of SPI are specified in the Internal Audit Charter.

F. AUDITOR EKSTERNAL

Pengertian :

Auditor Eksternal adalah pihak yang independen dan profesional yang melakukan audit keuangan atas laporan keuangan Perseroan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran, ketaat-azasan dan kesesuaian laporan keuangan Perseroan dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas Pokok dan Fungsi :

1. Auditor Eksternal dapat juga melakukan audit non keuangan, seperti audit khusus, audit mutu, audit investigasi, dsb.
2. Untuk menjaga independensinya, maka :
 - Auditor Eksternal bertanggungjawab kepada Pemegang Saham
 - Auditor Eksternal harus bebas dari pengaruh dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Komisaris, Direksi, dan pihak yang berkepentingan di Perseroan (stakeholders).
 - Auditor Eksternal tidak boleh memberikan jasa lain di luar audit selama periode audit.
 - Auditor Eksternal tidak boleh mempunyai kepentingan keuangan yang material baik langsung maupun tidak langsung dan hubungan bisnis dengan Perseroan.
3. Audit oleh Auditor Eksternal dilakukan sesuai dengan standar audit dan kode etik profesi.

F. EXTERNAL AUDITOR

Definition:

External Auditor is an independent and professional outside party performing audit on the corporate financial report to provide opinions as to the objectivity, compliance and suitability of such report with the Indonesian Financial Accounting Standard as well as applicable laws and regulations.

Main Task and Function:

1. The External Auditor also performs audits for non-financial aspects such as special, quality and investigation audits, etc.
2. To ensure their independence:
 - The External Auditor reports to the Stakeholders
 - The External Auditor must be free of interference and have no conflict of interests with such entities as the Board of Commissioners, the Board of Directors and related stakeholders.
 - The External Auditor provides no other services than audit during the audit period.
 - The External Auditor may not have any material financial interest and business relationship to the Company either directly or not.
3. An audit by any External Auditor shall be carried out in accordance with the audit standard and professional code of conduct.

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Good Corporate Governance

- Auditor Eksternal harus memberitahu Direksi dan atau Komisaris melalui Komite Audit bila menemukan kejadian atau indikasi pelanggaran di dalam Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memberitahukan kepada Pemegang Saham dan atau instansi pemerintah sebagai regulator/pengawas selambat-lambatnya tiga hari kerja jika ditemukan adanya pelanggaran dan hal-hal yang dapat membahayakan keadaan keuangan Perseroan dan kepentingan publik lainnya.
- Kecuali disyaratkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Auditor Eksternal harus merahasiakan informasi yang diperoleh sewaktu melaksanakan tugasnya

G. SEKRETARIS PERSEROAN

Pengertian :

Sekretaris Perseroan merupakan penghubung (liaison officer) antara Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham serta wakil Perseroan dalam berhubungan dengan regulator, lembaga atau asosiasi lain yang berkaitan dengan Perseroan.

- Sekretaris Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi serta bertanggungjawab kepada Direksi.
- Sekretaris Perseroan harus memiliki kualifikasi akademis yang memadai agar dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.
- Sekretaris Perseroan harus mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang mendukung pelaksanaan fungsinya.

- The External Auditor must notify the Board of Directors and/or Commissioners through the Audit Committee upon finding either event or indication of breach in the Company to any applicable laws and regulations.
- Notify the Shareholders and/or the public regulator/inspector within no later than three business days upon finding of violation and issues harming the company financial status as well as other public interests.
- Except otherwise required in the articles of association and applicable laws, the External Auditor must keep confidential information obtained during performing their audit tasks.

G. CORPORATE SECRETARY

Definition:

The corporate secretary serves as a liaison officer between the Board of Directors, the Board of Commissioners, and Shareholders as well as corporate representatives in dealing with the regulators and other institutions or associations with respect to the Company.

- The corporate secretary is appointed and dismissed by and be responsible to the Board of Directors.
- The corporate secretary must have adequate academic qualification in order to perform well in fulfilling his/her task and responsibility.
- The corporate secretary must have supporting experience and knowledge in order to perform his/her function.

- Sekretaris Perseroan mempunyai tugas menatausahakan serta menyimpan dokumen Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi maupun RUPS.
- Sekretaris Perseroan harus memastikan bahwa Perseroan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan yang berlaku sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG dan wajib memberikan informasi yang berkaitan dengan tugasnya kepada Direksi.
- Sekretaris Perseroan bertanggungjawab atas pengelolaan informasi Perseroan.

PROSES TATA KELOLA PERUSAHAAN

A. PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KOMISARIS DAN DIREKSI

- Pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi dilakukan oleh RUPS melalui proses yang transparan.
- Mekanisme uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dilakukan secara transparan, profesional, mandiri, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi.
- Komisaris dan Direksi yang telah

- The corporate secretary is to carry out the corporate administration and document storage, including but not limited to the List of Shareholders, Special List, and minutes of the Board of Directors and GMOS meetings.
- The corporate secretary must ensure that the Company complies with applicable rules on the transparency underlying the application of GCG principles and must provide information with respect to his/her tasks to the Board of Directors.
- The corporate secretary is responsible for the management of company information.

CORPORATE GOVERNANCE PROCESS

A. APPOINTMENT AND DISCHARGE OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

- The appointment and discharge of the Board of Commissioners and the Board of Directors is to be carried out by GMOS through a transparent process.
- The fit and proper test mechanism must take into consideration the principles of transparency, professionalism, independence and accountability.
- The candidate member of the Board of Directors, upon notification of having passed the fit and proper test, must sign a management contract prior to his/her official inauguration.
- The Board of Commissioners and the Board of Directors whose official period has expired may be considered for reappointment for next official period subject to the evaluation of their

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Good Corporate Governance

menyelesaikan masa jabatannya dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali selama satu kali masa jabatan berdasarkan penilaian kinerja pada periode sebelumnya.

5. Komisaris yang diangkat harus menyusun Term of Reference (TOR) yang memuat rencana kerja, sasaran/target yang ingin dicapai dan mengkomunikasikannya kepada Pemegang Saham.
6. Komisaris dan Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
7. Bagi anggota Komisaris dan/atau Direksi yang berhenti sebelum ataupun setelah masa jabatannya berakhir harus menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya dan menyampaikannya kepada Pemegang Saham/RUPS untuk dimintakan pengesahannya.

B. PROGRAM PENGENALAN PERSEROAN

1. Komisaris dan/atau Direksi yang baru wajib diberikan program pengenalan mengenai Perseroan yang bersangkutan.
2. Tanggungjawab untuk mengadakan program pengenalan Komisaris yang baru berada pada Komisaris Utama.
3. Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan Direksi yang baru berada pada Direktur Utama.
4. Program pengenalan meliputi:

performance during the preceding period.

5. The selected Board of Commissioners must prepare Term of Reference (TOR) containing their work plan, target and communicate it to the Shareholders.
6. The Board of Commissioners and Board of Directors may from time to time be discharged based on the GMOS Resolutions by stating the reasons.
7. Any member(s) of the Board of Commissioners and/or Board of Directors that resigns at an earlier stage of their official period must prepare their implementation report to submit to the Shareholders/GMOS for validation as required.

B. COMPANY INTRODUCTION PROGRAM

1. Newly assigned Board of Commissioners and/or Board of Directors is to be provided with the related company introduction program.
2. The responsibility for the implementation of company introduction program to the newly assigned Board of Commissioners is assumed by the Chief Commissioner.
3. The President Director is responsible for carrying out an introductory program to the newly assigned Board of Directors.
4. The Company Introduction Program includes:

- Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perseroan.
- Gambaran mengenai Perseroan.
- Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit.
- Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Komisaris dan Direksi.

C. RJPP, RKAP, dan SCI

1. Direksi wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP) dengan disetujui Komisaris, dan disahkan oleh RUPS.
2. Direksi wajib mengirimkan usulan RKAP kepada Komisaris dan Pemegang Saham untuk dimintakan pengesahan kepada RUPS Tahunan selambat-lambatnya 60 hari sebelum tahun buku baru mulai berlaku.
3. Komisaris memberikan masukan-masukan pada saat penyusunan RJPP dan RKAP, serta melakukan pembahasan bersama-sama dengan Direksi sebelum memberikan persetujuannya.
4. RUPS Tahunan mengesahkan RKAP tahun buku berikutnya yang diadakan selambat-lambatnya pada hari ke-30 bulan pertama setelah tahun buku baru dimulai.
5. Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan RJPP dan RKAP serta melaksanakan evaluasi dan pengendaliannya..

- Adaptation of GCG principles by the Company.
- Description about the Company.
- Description about the delegated authority, internal and external audit, internal control system and policy, including Audit Committee.
- Description about the tasks and responsibilities of the Board of Commissioners and Board of Directors.

C. RJPP, RKAP, AND SCI

1. The Board of Directors must prepare the Company Work Plan and Budget (RKAP) and Company Long-Term Plan (RJPP) to be approved by the Board of Commissioners and validated by the GMOS.
2. The Board of Directors must submit the proposed RKAP to the Board of Commissioners and Shareholders for validation by the Annual GMOS by no later than 60 days prior to the new fiscal year becomes effective.
3. The Board of Commissioners is to give feedback and recommendations during the RJPP and RKAP preparation, and shall enter into a discussion with the Board of Directors before any approval is given.
4. The Annual GMOS must validate the next fiscal year's RKAP by no later than the 30th day of the first month of the new fiscal year.
5. The Board of Directors must be responsible for the execution of RJPP and RKAP as well as their evaluation and control.

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Good Corporate Governance

6. Setiap perubahan RKAP harus disetujui oleh RUPS, kecuali ditentukan lain dalam keputusan RUPS.
7. Komisaris memantau pelaksanaan RKAP dan kesesuaiannya dengan RJPP, serta memberikan masukan-masukan dalam upaya pencapaiannya.
8. Perjanjian Penunjukan Anggota Direksi (Statement of Corporate Intent/SCI) ditandatangani oleh anggota Direksi yang bersangkutan dan kuasa Pemegang Saham pada saat penunjukan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi, yang memuat persyaratan penunjukan dan pemberhentian termasuk peran dan tanggung jawab

D. KONFLIK KEPENTINGAN

1. Konflik kepentingan adalah situasi dimana seseorang karena kedudukan atau wewenang yang dimiliki di Perseroan, mempunyai kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas yang diamanatkan oleh Perseroan secara objektif. Konflik kepentingan menimbulkan adanya perbedaan antara kepentingan ekonomis pribadi atau keluarga dengan kepentingan ekonomis Perseroan.
2. Pemegang Saham tidak diperkenankan mencampuri kegiatan operasional Perseroan yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Komisaris dilarang memegang jabatan rangkap sebagai anggota Direksi pada

6. Any amendment of RKAP must be approved by the GMOS, except otherwise provided for in the GMOS Resolutions.
7. The Board of Commissioners must monitor the execution of RKAP and its compatibility with RJPP in addition to providing feedback and recommendations for achievements.
8. The Statement of Corporate Intent/SCI is to be ratified by the respective members of the Board of Directors and Shareholder representatives by the time the respective member is assigned as the member of the Board of Directors, and shall contain the requirements for assignment and discharge including their roles and responsibilities.

D. CONFLICT OF INTERESTS

1. Conflict of interests represents a situation in which a person for his/her position or authority in the Company shows personal interests affecting the objective implementation of the tasks assigned by the Company. It creates variation between personal economic interests and that of the Company.
2. The Shareholders may not interfere with the corporate operational activities for which the Board of Directors is responsible as stated in the Articles of Association and applicable laws and regulation.
3. The Board of Commissioners is forbidden to take concurrent membership in any other State or Regional Owned Enterprise,

BUMN, BUMD, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

4. Komisaris dan Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain.
5. Komisaris tidak boleh mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuan untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis dalam hubungan satu sama lain dan terhadap Direksi.
6. Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagai anggota Direksi pada BUMN, BUMD, badan usaha milik swasta, jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/ lembaga pemerintah pusat dan daerah, serta jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, kecuali persetujuan RUPS.
7. Komisaris dan Direksi dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perseroan yang bersangkutan, selain gaji dan fasilitas yang diterimanya sebagai Direksi dan Komisaris, yang ditentukan oleh RUPS.
8. Antara para anggota Direksi maupun anggota Komisaris dan antara anggota Komisaris dengan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar).

or any private enterprise, and other official position that may cause conflict of interests.

4. The Board of Commissioners and the Board of Directors report to the Company on their shareholding or that of their relatives in the Company or any other Company.
5. The Board of Commissioners may not have interests which may alter their ability to carry out their tasks in an independent and critical manner in the relationship with each other and with the Board of Directors.
6. The Board of Commissioners may not take concurrent membership of the Board of Directors in any other State or Regional Owned Enterprise, any private enterprise, other structural or functional position in either central or regional government instance, and other official position that may create conflict of interests, except approved by GMOS.
7. The Board of Commissioners and Board of Directors may not deal with transaction with conflict of interests and take personal advantages from the company activities other than remuneration and allowances they earn from being the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors as determined by GMOS.
8. Between the members either the Board of Directors or the Board of Commissioners and vice versa may exist up to the third degree, either straight or to the side line as well as related by marriage (son/ daughter in law or brother/sister in law) are disallowed having the blood relatives.

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Good Corporate Governance

9. Jajaran/Karyawan PT Brantas Abipraya tidak boleh merangkap jabatan lain pada usaha swasta yang dapat menimbulkan benturan kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan Perseroan.
10. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan berbenturan dengan kepentingan anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris, maka yang berhak mewakili Perseroan adalah :
 - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan yang ditunjuk oleh anggota Direksi lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
 - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan Perseroan dengan Perseroan.
11. Dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan dan tidak ada satupun anggota Dewan Komisaris, maka Perseroan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS.

9. PT Brantas Abipraya employees are disallowed taking concurrent assignment in any private enterprise that may create conflict of interests, whether directly or not, with the company interests.
10. In any event that the company interests should conflict with that of the members of Board of Directors and/or the members of Board of Commissioners, those eligible to represent the Company shall be:
 - a. Other members of the Board of Directors having no conflict of interests with the Company as appointed by the rest of the Board of Directors members that have no conflict of interests.
 - b. The Board of Commissioners in the event that all of the Board of Directors members have conflict of interests with the Company; or
 - c. Any other party appointed by the GMOS in the event that all members of the Board of Directors or the Board of Commissioners have conflict of interests with the Company.
11. In the event that all of the members of the Board of Directors have conflict of interests with the Company but none of the members of the Board of Directors does, the Company, thus, shall be represented by other parties appointed by the GMOS.

E. RISK MANAGEMENT

1. The risk assessment comprises a set of actions taken by the Board of Directors in order to identify, analyze, and assess

rangka identifikasi, analisis, dan menilai risiko yang dihadapi Perseroan untuk mencapai sasaran usaha yang ditetapkan.

2. Proses analisis risiko meliputi estimasi atas signifikansi dampak yang akan timbul, penilaian mengenai tingkat kemungkinan terjadinya risiko dan penetapan langkah yang diperlukan untuk mengatasi risiko tersebut.
3. Direksi melakukan identifikasi dan kajian terhadap potensi risiko yang dihadapi Perseroan.
4. Direksi menetapkan strategi dan kebijakan penanganan pengelolaan risiko serta melakukan pengawasan atas pelaksanaannya.
5. Direksi mengungkapkan kebijakan yang diterapkan Perseroan menyangkut pengelolaan risiko dalam Laporan Tahunan.
6. Direksi menyusun pedoman penanganan masalah dengan stakeholders yang berkaitan dengan pengelolaan jasa konstruksi dan jasa lainnya, misalnya proses tender dan hubungan dengan mitra kerja.
7. Direksi memberikan informasi hasil analisis risiko yang dilakukan kepada Komisaris sesuai dengan tingkat kebutuhan.
8. Komisaris memantau pelaksanaan pengelolaan risiko Perseroan dan memberikan masukan untuk perbaikan.
9. Dalam melaksanakan tugasnya SPI juga melakukan kajian terhadap kecukupan pengelolaan risiko yang diterapkan Perseroan sebagai bahan kajian risiko kepada Direksi.

the risk the Company may come across in achieving the determined business targets.

2. The process includes estimating the significance of impact that may arise, assessment on the risk event likelihood and determining the required steps to overcome such risk.
3. The Board of Directors shall conduct identification and review on the potential risk for the Company.
4. The Board of Directors is to determine the risk management strategy and policy and supervise their implementation.
5. The Board of Directors must elaborate the policy applied by the Company with respect to the risk management in the Annual Report.
6. The Board of Directors must prepare the guidelines for problem solving with the stakeholders with respect to the management of construction and other services, i.e. bidding process and relation with partners.
7. The Board of Directors must provide the Board of Commissioners with the result of risk analysis carried out in accordance with the requirement level.
8. The Board of Commissioners monitors the risk analysis implementation
9. The Company is to give recommendations for improvement.

E. MANAJEMEN RISIKO

1. Penilaian risiko merupakan suatu rangkaian tindakan yang dilaksanakan Direksi dalam

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Good Corporate Governance

F. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Semua keputusan dalam rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan jika tidak dicapai kata sepakat maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak/voting.
2. Jika terdapat pendapat yang berbeda dalam rapat (dissenting opinion) harus didokumentasikan dalam notulen rapat.
3. Setiap keputusan yang diambil harus memperhatikan kepentingan stakeholders Perseroan, risiko yang melekat, dan kewenangan yang dimiliki oleh setiap pengambil keputusan.
4. Hak mengemukakan pendapat dijunjung tinggi dalam upaya memberikan masukan peningkatan kinerja Perseroan.
5. Keputusan-keputusan yang mengikat dapat pula diambil tanpa diadakan rapat Komisaris/Direksi, sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
6. Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi harus konsisten dalam menjalankan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan.

G. MEDIA KOMUNIKASI DAN INFORMASI

1. Pemegang Saham, Komisaris, dan stakeholders lainnya berhak memperoleh informasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu mengenai Perseroan secara proporsional.

F. DECISION MAKING

1. All decisions in any meeting are made through consultation for consensus and when agreement cannot be reached, it is to be made by voting.
2. Any event of dissenting opinions in a meeting should be documented in the minutes of meeting.
3. Each decision must be made by taking into account the best interests of the stakeholders, key risks, and authority held by each of the decision maker.
4. The right for opinion is highly upheld to ensure a provision of feedback for the improvement of company performance.
5. Binding decisions may also be made without the Board of Commissioners/the Board of Directors holding any meeting, provided that all of the Board members approve the method used and the materials on which the decision is made.
6. The Shareholders and the Board of Commissioners and the Board of Directors must show consistency in applying the decisions that have been made.

G. COMMUNICATION AND INFORMATION MEDIA

1. The Shareholders, the Board of Commissioners, and other stakeholders reserve the right to proportionally obtain complete, accurate, and punctual information with respect to the Company.

2. Direksi bertanggungjawab untuk memastikan agar informasi mengenai Perseroan diberikan kepada Komisaris dan Pemegang Saham secara lengkap, akurat, dan tepat waktu.
3. Direksi melakukan komunikasi secara efektif dengan unit kerja, sesama Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham melalui media komunikasi yang tepat dan efisien.
4. Direksi menetapkan kebijakan mengenai pengelolaan informasi termasuk klasifikasi kerahasiaan informasi.
5. Sekretaris Perseroan memastikan informasi yang dikelola valid, lengkap, akurat, tepat waktu dan relevan dalam membantu pengambilan keputusan.
6. Perseroan senantiasa mengoptimalkan penggunaan media komunikasi dan informasi yang tersedia.

H. PENDELEGASIAN WEWENANG

1. Direksi mendelegasikan sebagian wewenang pengelolaan Perseroan kepada jajaran di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan pertimbangan untuk menunjang kelancaran tugas dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas.
2. Kepala unit kerja harus melaksanakan wewenang yang didelegasikan tersebut dengan penuh tanggung jawab dan memberikan laporan pelaksanaannya secara berkala kepada Direksi.

2. The Board of Directors is responsible to ensure the provision of complete, accurate and punctual information with respect to the Company for the Shareholders.
3. The Board of Directors establishes effective communication with the working units, fellow Board of Directors, the Board of Commissioners, and Shareholders through appropriate and efficient media.
4. The Board of Directors determines the policy on information management including confidentiality classification
5. The corporate secretary ensures that valid, complete, accurate, punctual and relevant information is managed in order to facilitate the decision making.
6. The Company at all time optimizes the use of available media of communication and information.

H. DELEGATION OF AUTHORITY

1. The Board of Directors delegates part of company management authorities to the ranks below subject to applicable laws and regulations in consideration of supporting an accelerated task implementation while improving efficiency and effectiveness.
2. The head of working unit must carry out such delegated authority in full responsibility and the report of which must be provided for the Board of Directors on a regular basis.
3. The delegation of the authority must be

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Good Corporate Governance

3. Pendelegasian wewenang dikaji secara periodik untuk disesuaikan dengan tuntutan perkembangan Perseroan.
4. Pendelegasian wewenang yang dilakukan tidak melepaskan tanggung jawab Direksi.

I. PENGELOLAAN KEUANGAN

1. Keuangan Perseroan harus dikelola secara Professional dengan mempertimbangkan risiko serta menggunakan prinsip kehati-hatian.
2. Direksi bertanggung jawab untuk :
 - Menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
 - Meningkatkan pendapatan bersih Perseroan dengan meningkatkan efisiensi penggunaan dana, meminimalkan biaya dan meningkatkan penjualan jasa Perseroan.
3. Penyusunan anggaran dilakukan melalui koordinasi antar unit untuk mensinergikan usulan anggaran setiap unit.
4. Penetapan anggaran harus mempertimbangkan kebutuhan, sumber daya Perseroan, keterbatasan keterbatasan, serta analisis peluang pasar terhadap kemungkinan pencapaiannya (realistis).
5. Evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran dan analisis terhadap variance yang terjadi dilakukan secara berkala di masing-masing unit dan/atau Perseroan secara menyeluruh.

reviewed on a periodic basis for adjustment with the company development demand.

4. The delegation of the authority must not waive the Board of Directors' responsibility.

I. FINANCIAL MANAGEMENT

1. The corporate financial must be managed in such a professional manner taking into account any potential risks while utilizing the principles of precaution.
2. The Board of Directors is responsible for:
 - The preparation of financial report in accordance with the national accounting standard as applicable.
 - The increase of net profit of the Company by improving efficiency in the use of budget, reducing cost, and improving the sale of services offered by the Company.
3. The budget preparation through coordination between units to synergize the financial plan proposed by each unit.
4. The budget decision must take into consideration the company needs, resources, limitations, and realistic market analysis.
5. The evaluation of budget implementation and analysis of arising variances are carried out on a periodic basis both in respective unit and throughout the company.
6. The Company determines a clear policy with respect to the delegation of authority

6. Perseroan menetapkan kebijakan yang jelas dalam hal pelimpahan wewenang pemberian otorisasi terhadap pengeluaran uang.
7. Kegiatan Perseroan dilaksanakan dengan mengacu kepada anggaran yang telah ditetapkan.
8. Kegiatan Perseroan diluar anggaran yang telah ditetapkan harus dilaporkan kepada Komisaris.
9. Setiap unit kerja harus mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan di unit kerjanya masing-masing.
10. Pemantauan pengelolaan keuangan oleh Direksi dilakukan oleh Komisaris.

J. SUKSESI MANAJEMEN

1. Direksi menetapkan persyaratan jabatan dan proses seleksi untuk Kepala Biro / Divisi / Wilayah / Cabang dan jabatan lain dibawahnya sesuai dengan kebutuhan Perseroan dalam menjalankan strategi.
2. Penetapan untuk jabatan satu tingkat dibawah Direksi harus dilaporkan kepada Komisaris.
3. Direksi menetapkan program pengembangan kemampuan karyawan Perseroan baik fungsional maupun struktural secara transparan.
4. Komisaris memantau pengisian formasi jabatan satu tingkat dibawah Direksi dalam upaya menjangkau dan mengusulkan calon anggota Direksi kepada RUPS.

and authorization of expenditures.

7. The company activities are carried out with reference to the agreed budget.
8. The company activities excluded in the agreed budget must be reported to the Board of Commissioners.
9. Each working unit is responsible for their respective financial management.
10. The Board of Commissioners is to monitor the financial management by the Board of Directors.

J. MANAGEMENT SUCCESSION

1. The Board of Directors defines job requirements as well as selection process for Heads of Bureau/Division/Regional/Branch and other respective subordinate offices as required by the Company in carrying out its strategy.
2. The discharge of any one-level subordinate office must be reported to the Board of Commissioners.
3. The Board of Directors defines the employee capacity building program for both functional and structural lines in a transparent manner.
4. The Commissioner monitors the staffing formation one level below the Board of Directors in an attempt to select and propose membership candidate of the Board of Directors to the GMOS.

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Good Corporate Governance

5. Penempatan dalam jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai kompetensi, prestasi kerja dan syarat-syarat objektif.

K. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN

1. Direksi menetapkan dan menjalankan program Perseroan yang terkait dengan tanggung jawab sosial Perseroan secara periodik dan melaporkannya kepada Komisaris serta Pemegang Saham.
2. Direksi harus memastikan bahwa Perseroan melaksanakan tanggung jawab sosialnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Komisaris memantau dan memberikan masukan terhadap pelaksanaan program Perseroan yang terkait dengan tanggung jawab sosial Perseroan.
4. Pelaksanaan program Perseroan yang terkait dengan tanggung jawab sosial Perseroan dimuat dalam Laporan Tahunan Perseroan.
5. Direksi wajib memastikan bahwa aset-aset dan lokasi usaha serta fasilitas Perseroan lainnya, memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan pelestarian lingkungan, kesehatan, dan keselamatan kerja.

L. PENGENDALIAN INTERNAL

1. Direksi harus menetapkan Sistem Pengendalian Internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perseroan.
2. SPI melakukan penelaahan terhadap

5. The office deployment is done by taking into consideration competence-based professionalism, work achievements, and objective requirements.

K. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

1. The Board of Directors is to define and carry out the programs with respect to the corporate social responsibility on a periodic basis and provide related report to the Board of Commissioners and Shareholders.
2. The Board of Directors must ensure that the Company has conducted its social responsibility in accordance with applicable laws and regulations.
3. The Board of Commissioners is to monitor and provide feedback to the program implementation with respect to the corporate social responsibility.
4. The program implementation with respect to the corporate social responsibilities to be included in the company annual report.
5. The Board of Directors must ensure that the company assets and business locations and other facilities are in compliance with the applicable laws and regulations with respect to conservation and occupational health and safety.

L. INTERNAL CONTROL

1. The Company is to create an effective internal control system to safeguard the company investments and assets.
2. SPI is to study an adequacy of the company

kecukupan sistem pengendalian internal Perseroan termasuk dalam penyusunan Laporan Keuangan Perseroan.

3. Sistem Pengendalian Internal antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - Lingkungan pengendalian internal.
 - Pengkajian dan pengelolaan risiko usaha.
 - Aktivitas pengendalian.
 - Sistem informasi dan komunikasi.
 - Monitoring.
4. Direksi menindaklanjuti laporan hasil audit yang dilaksanakan SPI maupun Auditor Eksternal dan melaporkan perkembangan tindak lanjut tersebut kepada Komisaris.
5. Komisaris memantau perkembangan tindak lanjut atas laporan hasil audit SPI maupun Auditor Eksternal.
6. Komisaris memberikan penilaian dan masukan terhadap laporan hasil audit SPI dan Auditor Eksternal yang mencakup materi laporan, sasaran audit, ruang lingkup audit.
7. Komisaris mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dan tim manajemen dalam menjalankan peraturan perundang-undangan.

M. PELAPORAN

1. Dalam waktu lima bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan yang

internal control over system including that in the preparation of the company financial statement.

3. The Internal Control System includes such issues as the following:
 - Internal Control Environment
 - Business risk analysis and management.
 - Control activities
 - Information and communication system.
 - Monitoring.
4. The Board of Directors must follow up the audit reports submitted by either SPI or External Auditor and report the follow-up progress to the Board of Commissioners.
5. The Board of Commissioners is to monitor the follow-up actions for either SPI or External Auditor's report.
6. The Board of Commissioners must provide evaluation and feedback against the audit reports submitted by either SPI or External Auditor which include the report materials, audit targets, and scope of auditing work.
7. The Board of Commissioners is to supervise and monitor the Board of Directors and management team's compliance with the laws and regulations.

M. REPORTING

1. Within five months after the closing of current fiscal year, the Board of Directors must submit an annual report signed by all of the members of the Board of Directors.

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Good Corporate Governance

telah ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan.

2. Direksi wajib mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan secara objektif.
3. Laporan Tahunan disamping memuat hal-hal yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, juga memuat mengenai perkembangan dan upaya Perseroan dalam penerapan GCG.
4. Komisaris wajib membahas laporan tahunan secara bersama-sama dengan Direksi, sebelum menyetujui dan menyampaikannya kepada RUPS.
5. Dengan ditandatangani bersama laporan tahunan, semua anggota Direksi dan Komisaris bertanggung jawab atas isi laporan tahunan dimaksud.
6. Komisaris menyampaikan laporan pelaksanaan kerja Komisaris yang telah dilakukan dan program kerja Komisaris untuk periode selanjutnya kepada Pemegang Saham.
7. Komisaris menyampaikan laporan penilaian kinerja masing-masing Direksi kepada Pemegang Saham.
8. Direksi menyampaikan laporan khusus kepada Komisaris dan Pemegang Saham setiap ada kejadian penting dan/atau atas permintaan Komisaris/ Pemegang Saham.

and the Board of Commissioners to the GMOS for validation purpose.

2. The Board of Directors must disclose material information in the company annual and financial statement in accordance with applicable laws and regulations in such a timely, accurate, clear-cut and objective manner.
3. The annual report must not only contain issues determined by applicable laws and regulations, but also that with respect to the corporate progress and actions in the implementation of GCG.
4. The Board of Commissioners must discuss the annual report with the Board of Directors before any approval and submission to the GMOS.
5. Upon mutual ratification of the annual report, all of the members of both Boards are responsible for the content of the said annual report.
6. The Board of Commissioners must submit their program implementation reports which also include the program for next period to the Shareholders.
7. The Board of Commissioners must submit the performance evaluation report of the Board of Directors to the Shareholders.
8. The Board of Directors must submit their special reports to the Board of Commissioners and Shareholders in any event of special occasion and/or as requested by the Board of Commissioners and Shareholders.
9. The Board of Directors must submit their

9. Direksi menyampaikan Laporan Manajemen setiap triwulan kepada Komisaris paling lambat satu bulan setelah triwulan berakhir.
10. Direksi menetapkan mekanisme penyampaian laporan pertanggungjawaban setiap unit kerja dalam suatu sistem pengendalian internal yang memadai.

N. RUPS, RAPAT LAINNYA dan RISALAH RAPAT

1. RUPS Tahunan diselenggarakan sebanyak dua kali, yaitu selambat-lambatnya pada hari ketiga puluh bulan pertama dan dalam bulan Juni setelah penutupan tahun buku.
2. RUPS Luar Biasa diadakan setiap saat, jika dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Komisaris dan/atau Pemegang Saham.
3. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan untuk kepentingan Perseroan berwenang menyelenggarakan RUPS lainnya.
4. Rapat Komisaris dan Rapat Direksi harus diadakan secara berkala, yaitu sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan.
5. Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi dilaksanakan tiga bulan sekali. Dalam kondisi tertentu, Rapat Gabungan dapat diadakan diluar jadwal tersebut untuk membahas hal-hal penting dan mendesak yang memerlukan persetujuan Komisaris. Risalah rapat dibuat oleh Sekretaris Dewan Komisaris.

management reports on quarterly basis to the Board of Commissioners by no later than one month since the closing of the last quarter.

10. The Board of Directors defines an accountability report submission mechanism for each working unit in an adequate internal control system.

N. GMOS, OTHER MEETINGS AND MINUTES OF MEETING

1. Annual GMOS is conducted two times, i.e. no later than the thirtieth day of the first month and in June after the fiscal year closing.
2. Extraordinary GMOS is conducted when deemed necessary by the Board of Commissioners and/or the Board of Directors and/or the Shareholders.
3. The Board of Directors organizes Annual GMOS and for the company benefit is authorized to hold another GMOS.
4. Each Board meets on a periodic basis, i.e. at least once in a month.
5. A joint meeting of the two Boards is to be held once in every three months. On a special condition, joint meeting may occur outside the above schedules in order to discuss urgent issues for which the Board of Commissioners' approval is required. The minutes of meeting must be made by the Board of Commissioners' Secretary.

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Good Corporate Governance

- Risalah rapat harus dibuat untuk setiap rapat dan dalam risalah rapat tersebut harus dicantumkan pendapat yang berbeda (dissenting comments) dengan apa yang diputuskan dalam rapat (bila ada).
- Sekretaris Perseroan mendokumentasikan risalah Rapat Direksi maupun RUPS dan menyediakannya bila diminta oleh Pemegang Saham, Komisaris dan/atau Direksi.

O. PENILAIAN KINERJA

- Pemegang Saham menilai kinerja Perseroan, Komisaris dan Direksi melalui mekanisme RUPS.
- Komisaris menetapkan indikator penilaian kinerja untuk masing-masing Direksi dan menginformasikannya kepada Direksi yang bersangkutan dan Pemegang Saham.
- Komisaris menyusun rencana kerja dan target kerja setiap awal tahun, melakukan evaluasi sendiri (self assessment) atas pencapaiannya.
- Komisaris melaporkan kepada Pemegang Saham apabila terjadi gejala kemunduran kinerja Perseroan.
- Direksi menetapkan tolok ukur kinerja masing-masing unit kerja untuk mendukung kinerja Perseroan.
- Penilaian kinerja terhadap Divisi/Biro/ Wilayah/Cabang dilakukan setiap tahun dan secara transparan.
- Komisaris meminta/mendapatkan laporan kinerja teknologi informasi dari Direksi.

- Minutes must be made for each meeting in which dissenting comments over what have been decided in the meeting, if any, shall be specified.
- The corporate secretary documents the minutes of either the Board of Directors meeting or GMOS and makes them available upon request by the Shareholders and the Board of Commissioners and/or Directors.

O. PERFORMANCE EVALUATION

- The Shareholders evaluate the performance of the Company and the two Boards through the GMOS.
- The Board of Commissioners defines the performance evaluation indicators for each of the members of the Board of Directors and informs them to the concerned BoD as well as Shareholders.
- The Board of Commissioners is to prepare the work plan and work target in the beginning of each year, and carry out a self-assessment on their achievements.
- The Board of Commissioners must report to the Shareholders in any event of performance backward symptom of the Company.
- The Board of Directors defines the performance benchmarks for each working unit in favor of the corporate performance.
- The performance evaluation for the Heads of Division/Bureau/Regional/Branch is done every year in a transparent manner.
- The Board of Commissioners may obtain information technology performance report from the Board of Directors.

- Komisaris menilai pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan manajemen risiko.

P. PROSES PENUNJUKAN DAN PERAN AUDITOR EKSTERNAL

- Auditor Eksternal harus ditunjuk oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh Komisaris.
- Komisaris wajib menyampaikan kepada RUPS menyangkut alasan pencalonan dan besarnya honorarium/ imbal jasa yang diusulkan untuk Auditor Eksternal Perseroan.
- Direksi dapat mengusulkan calon-calon Auditor Eksternal kepada Pemegang Saham melalui Komisaris.
- Auditor Eksternal melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk memberikan pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan secara independen dan profesional.
- Perseroan harus menyediakan bagi Auditor Eksternal semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan.
- Auditor Eksternal menyampaikan laporan hasil audit kepada Direksi dan Komisaris secara tepat waktu.

Q. MEKANISME KERJA KOMITE AUDIT, SPI, DAN AUDITOR EKSTERNAL

- Komite Audit bertugas membantu Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas Auditor Eksternal dan Auditor Internall (SPI).

- The Board of Commissioners is to evaluate the Board of Directors' accountability in the implementation of risk management.

P. SELECTION PROCESS AND ROLE OF EXTERNAL AUDITOR

- The External Auditor is selected by GMOS from the candidates proposed by the Board of Commissioners.
- The Board of Commissioners presents to the GMOS on the selection rationales and proposed amount of honorary of the company External Auditor.
- The Board of Directors may propose any candidate for External Auditor to the Shareholders through the Board of Commissioners.
- The External Auditor is to perform audit of the company financial statement to provide opinions on the objectiveness of the financial statement presentation in an independent and professional manner.
- The Company must provide the External Auditor with the entire accounting records as well as supporting data as required.
- The External Auditor submits the audit report to the two Boards in a punctual manner.

Q. PERFORMANCE MECHANISM OF AUDIT COMMITTEE, SPI, AND EXTERNAL AUDITOR

- The Audit Committee assists the Board of Commissioners in ensuring an effective internal control system and effective task implementation either External or Internal Auditor (SPI).

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Good Corporate Governance

2. Auditor Eksternal harus memberitahu Direksi dan atau Komisaris melalui Komite Audit bila menemukan kejadian atau indikasi pelanggaran di dalam Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Komisaris memantau perkembangan tindak lanjut atas laporan hasil audit SPI maupun Auditor Eksternal.
4. Komite Audit melakukan penilaian atas proses penunjukan pemenang tender Auditor Eksternal yang dilakukan oleh panitia tender.

R. BUDAYA DAN ETIKA KERJA

1. Direksi wajib membuat suatu pedoman tentang perilaku etis (code of conduct) yang memuat nilai-nilai etika berusaha.
2. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh Perseroan harus mendukung visi, misi, tujuan dan strategi Perseroan serta harus diterapkan terlebih dahulu oleh jajaran pimpinan Perseroan untuk selanjutnya meresap kedalam jajaran Perseroan.
3. Setiap insan Perseroan wajib menjunjung tinggi nilai-nilai etika yang dibangun dalam Perseroan.
4. Budaya kerja dibangun untuk menjaga berlangsungnya lingkungan kerja yang profesional, jujur, terbuka, peduli, dan tanggap terhadap setiap kegiatan Perseroan serta kepentingan pihak stakeholders.
5. Budaya kerja dikembangkan untuk memotivasi karyawan dalam bekerja.
6. Seluruh insan Perseroan harus menerapkan

2. The External Auditor must notify the Board of Directors and/or Commissioners through the Audit Committee upon finding either event or indication of breach in the Company to any applicable laws and regulations.
3. The Board of Commissioners is to monitor the follow-up actions for either SPI or External Auditor's report.
4. The Audit Committee evaluates the process of award of External Auditor selection carried out by the bid committee.

R. CULTURE AND CODE OF CONDUCT

1. The Board of Directors prepares guidance for the code of conduct containing ethical principles of business.
2. The cultural values adopted by the Company must be in favor of its vision, mission, objective and strategy and must first be exercised by the company leaders to inspire the entire corporation.
3. Each of the company personnel must uphold the core values developed within the Company.
4. The working culture is developed to preserve a professional, fair, transparent, prudent and responsive environment to any of the company activities as well as stakeholder's benefits.
5. The working culture is developed to motivate the employees in their daily tasks.
6. All company personnel must exercise the

budaya kerja dan sikap mental dasar Perseroan secara konsisten dan melakukan evaluasi secara periodik.

7. Anggota Komisaris, Direksi, dan karyawan Perseroan dilarang untuk memberikan, atau menerima baik langsung ataupun tidak langsung sesuatu yang berharga kepada pelanggan atau seorang pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pemberian atau penerimaan suatu tanda terima kasih dalam kegiatan usaha, seperti hadiah, sumbangan atau entertainment tidak boleh dilakukan pada suatu keadaan yang dapat dianggap sebagai perbuatan yang tidak patut.
9. Direksi menetapkan kebijakan tentang batas maksimal suatu tanda terima kasih yang diterimanya sebagaimana tersebut pada butir 8 di atas.

S. PEMANTAUAN KETAATAN GCG

1. Perseroan harus secara aktif mengungkapkan sejauh mana pelaksanaan prinsip GCG dan masalah yang dihadapi.
2. Pemegang Saham berpartisipasi dalam melaksanakan penerapan GCG sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.
3. Direksi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, dan prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas,

company working culture and key mental attitude in a consistent manner and evaluate them on a periodic basis.

7. The two Boards' members and the employees are prohibited offering or accepting explicitly or implicitly anything of value to and from any customer or government official to influence or as a return for what has been done or any other actions as provided in applicable laws and regulations.
8. In no way such an offering or acceptance to show gratitude in any business activity, i.e. gift, donation or entertainment should be done in any circumstance likely to be considered inappropriate.
9. The Board of Directors determines policies on a maximum limit of acceptable expression of gratitude as stated in point 8 above.

S. MONITORING GCG COMPLIANCE

1. The Company must dynamically reveal the extent to which the GCG principles have been adapted as well as the problems encountered.
2. The Shareholders participate in the GCG implementation in agreement with their authorities and responsibilities.
3. The Board of Directors in carrying out their tasks must adapt the principles of professionalism and efficiency as well as that of GCG, i.e. transparency,

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Good Corporate Governance

pertanggungjawaban, kemandirian, serta kewajaran.

4. Tim GCG yang dibentuk Direksi memastikan ketaatan terhadap aturan GCG dan secara berkala melaporkannya kepada Direksi dan Komisaris
5. SPI melakukan penilaian terhadap pelaksanaan penerapan GCG secara periodik dan melaporkan hasilnya kepada Direksi dan Komisaris.
6. Komisaris memantau efektivitas pelaksanaan praktik-praktik GCG yang diterapkan Perseroan dan melaporkannya kepada Pemegang Saham.

ORGAN PERSEROAN

A. HUBUNGAN ANTAR ORGAN PERSEROAN

Brantas meyakini bahwa hubungan yang wajar antar Organ Perseroan sangat berpengaruh positif terhadap keberhasilan pengelolaan Perseroan dan implementasi GCG. Dengan demikian, Brantas secara tegas memisahkan fungsi dan tugas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris dan Direksi sebagai Organ Perseroan.

Brantas mendorong Organ Perseroan agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tugas dilandasi oleh itikad baik dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya

accountability, responsibility, independency, and fairness.

4. The GCG team introduced by the Board of Directors must ensure compliance with the GCG rules and report the same on a periodic basis to the Board of Commissioners and the Board of Directors.
5. SPI must carry out evaluation to the GCG implementation on a periodic basis and report the same on a periodic basis to the Board of Commissioners and the Board of Directors.
6. The Board of Commissioners is to monitor the effectiveness of the GCG practices applied by the Company and report the same to the Shareholders.

COMPANY ORGAN

A. RELATIONSHIP BETWEEN COMPANY ORGANS

Brantas believes that a fair relationship between the company organs will give a positive influence to a successful company management and GCG implementation. Hence, Brantas clearly distributes the tasks and functions between the three company organs of General Meeting of Shareholders (GMOS), the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Brantas also encourages the company organs to show a good faith at all time in their decision making and tasks performance abiding by the applicable laws and regulations with awareness of both company responsibility to the

tanggungjawab perseroan terhadap pihak yang berkepentingan (stakeholder) maupun pelestarian lingkungan.

PT. Brantas Abipraya akan mendorong hubungan yang wajar antar Organ Perseroan. Masing-masing Organ Perseroan selalu menghormati dan bertindak sesuai fungsi dan peranan masing-masing, berhubungan atas dasar prinsip kesetaraan dan saling menghargai.

B. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

RUPS merupakan wadah bagi pemegang saham dalam mempengaruhi Perseroan. RUPS merupakan forum bagi Komisaris dan Direksi dalam melaporkan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas serta kinerjanya kepada Pemegang Saham. Agenda yang dibahas didalam RUPS antara lain adalah :

1. Penetapan arah dan strategi jangka pendek, jangka panjang Perseroan,
2. Pertanggungjawaban Direksi / Komisaris
3. Penilaian kinerja operasional dan keuangan,
4. Penetapan anggota Komisaris dan Direksi
5. Penetapan remunerasi Komisaris dan Direksi
6. Agenda lain yang diusulkan oleh Pemegang Saham/Dekom/Direksi.

stakeholder and environmental conservation.

PT. Brantas Abipraya encourages a fair relationship between the company organs. Each of the company organs must at all time show a mutual respect and take any action according to their respective functions and roles, deal with each other on the principles of equality and mutual consideration.

B. GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMOS)

The GMOS serves as a forum for the Shareholders to influence the Company. The GMOS also serves as a forum for the Board of Commissioners and the Board of Directors to present their accountability reports on their task implementation and performance to the Shareholders. The agenda of discussion during the GMOS will include:

1. Definition of both short and long-term direction and strategy of the Company,
2. Accountability of the two Boards
3. Operational and financial performance evaluation,
4. Introduction of members of the two Boards
5. Introduction of remunerations of the two Boards
6. Other agenda as proposed by the Shareholders and the two Boards.

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Good Corporate Governance

Rapat Umum Pemegang Saham terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. Brantas berkewajiban untuk memberikan penjelasan yang lengkap dan informasi yang akurat kepada setiap Pemegang Saham berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS. Berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS :

1. Perseroan memberikan panggilan kepada Pemegang Saham, memberikan informasi mengenai agenda RUPS, termasuk usulan yang diajukan oleh Direksi;
2. Pemegang Saham mendapatkan penjelasan mengenai hal-hal lain dalam agenda RUPS yang diberikan sebelum dan / atau pada saat RUPS berlangsung;
3. Perseroan menjamin keputusan RUPS yang diambil melalui prosedur yang transparan dan adil;
4. Perseroan memberikan risalah RUPS bagi setiap Pemegang Saham jika diminta. Risalah RUPS yang dibuat akan memuat pendapat yang mendukung maupun yang tidak mendukung terhadap keputusan yang dibuat;
5. Perseroan mengungkapkan kepada Pemegang Saham sistem penentuan gaji dan fasilitas bagi setiap anggota Komisaris dan Direksi serta rincian mengenai gaji dan tunjangan yang diterima oleh anggota Komisaris dan Direksi.

The GMOS comprises the Annual GMOS and Extraordinary GMOS. Brantas is obliged to provide complete explanation and accurate information for each of the Shareholder with respect to the GMOS implementation. In relation to the GMOS implementation:

1. The Company issues invitation to the Shareholders, provide information as to the GMOS agenda, including recommendations proposed by the Board of Directors;
2. The Shareholders is explained on additional issues to the GMOS agenda given beforehand and/or during the GMOS implementation;
3. The Company ensures that GMOS Resolutions are agreed through a transparent and fair process;
4. The Company provides minutes of the GMOS for each of the Shareholder upon request. Minutes of the GMOS should contain opinions in favor of as well as opinions against the resolution reached;
5. The Company provides the explanation for the Shareholders as to the judgment system of remuneration and facility given to each of the member of the Board of Commissioners and the Board of Directors along with a detailed summary of their take home pay.

C. THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners in carrying out their tasks is obliged to:

- Memberikan pendapat dan saran kepada Pemegang Saham saat RUPS mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang diusulkan Direksi
- Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, melaporkan dengan segera kepada Pemegang Saham apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan atau hal-hal lain yang dipandang perlu untuk segera mendapat perhatian Pemegang Saham.
- Selalu berpegang teguh kepada Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komisaris dapat menggunakan saran profesional yang mandiri dan / atau membentuk Komite Khusus atas biaya Perseroan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh Komisaris sendiri.

Implementasi pelaksanaan tugas Komisaris Brantas antara lain :

1. Komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberi nasehat kepada Direksi terhadap rencana pengembangan Perseroan, rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan, pelaksanaan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Komisaris melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;

- Give opinion and recommendations to the GMOS on the Company Work Plan and Budget proposed by the Board of Directors.
- Keep informed on the company activity progress, immediately report to the Shareholders in any event of decreased performance of the Company or any other issues considered in need of attention of the Shareholders.
- Adhere at all time to the Articles of Association as well as applicable laws and regulations. The Board of Commissioners may make use of any independent professional advice and/ or establish a Special Committee at the company expenses in agreement with the procedures determined by the Board of Commissioners.

The task implementation of the Board of Commissioners at Brantas will include:

1. The Board of Commissioners provides control over the company management activities carried out by the Board of Directors and recommendation for the same including the development plan, long-term plan, work plan and company annual budget, implementation of Articles of Association and the GMOS Decisions as well as applicable laws and regulations.
2. The Board of Commissioners carries out their tasks, authorities and responsibilities in conformity to the provisions set forth in both Articles of Association and GMOS resolutions;

C. KOMISARIS

Komisaris dalam menjalankan tugasnya berkewajiban :

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Good Corporate Governance



3. Komisaris bertugas melaksanakan kepentingan perseroan dengan memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham dan bertanggung jawab kepada RUPS;
4. Komisaris bertugas meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tersebut (sepanjang Komisaris setuju terhadap isi materi laporan tahunan);
5. Komisaris memantau ketaatan Perseroan terhadap peraturan yang berlaku (compliance);
6. Komisaris melakukan evaluasi terhadap kemajuan penerapan praktik good corporate governance.

Kriteria Anggota Komisaris

Brantas menyadari sepenuhnya bahwa Pemegang Saham memiliki kewenangan penuh untuk mengangkat Komisaris. Namun demikian, untuk menjamin efektifitas tugas Dewan maupun anggota Komisaris, maka Perseroan perlu menetapkan kebijakan tentang kriteria anggota Komisaris yang sesuai kebutuhan. Brantas menetapkan kriteria komisaris antara lain sbb:

1. Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit;
2. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana yang merugikan keuangan negara dalam kurun waktu lima tahun sebelum pengangkatannya;

3. The Board of Commissioners implements the corporate interests by taking into account the Shareholders interest while being responsible to the GMOS;
4. The Board of Commissioners studies and reviews the annual report prepared by the Board of Directors and then signs it (pending approval of material content of the report);
5. The Board of Commissioners monitors the corporate compliance;
6. The Board of Commissioners evaluates the implementation progress of good corporate governance.

Criteria for the Board of Commissioners Membership

At Brantas, it is well-recognized that the Shareholders hold a full authority to assign the membership of the Board of Commissioner. Nevertheless, to ensure an effective task implementation of the Board of Commissioners and its members, the Company needs to determine a policy regarding suitable criteria of the membership of the Board of Commissioners. At Brantas, such criteria are determined as follows:

1. Able to conduct legal action and never pronounced of bankruptcy or being fault to have caused bankruptcy of any company;
2. Never penalized due to any crime causing loss of state finance within a period of five years prior to their assignments;

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Good Corporate Governance

3. Tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dengan anggota komisaris lain dan atau dengan anggota direksi sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar);
4. Tidak boleh merangkap jabatan lain pada usaha swasta yang dapat menimbulkan perbenturan kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan Perseroan, kecuali dengan ijin dari RUPS dan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;
5. Memiliki integritas pribadi dan dedikasi;
6. Memahami manajemen Perseroan yang berkaitan dengan strategi bisnis usaha Perseroan;
7. Memiliki pemahaman mengenai industri konstruksi;
8. Memiliki latar belakang pendidikan formal dan informal yang relevan dengan bisnis perseroan;
9. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
10. Mampu bekerja sama sebagai dewan.

Komisaris Perseroan harus dapat bekerja sama dengan anggota Komisaris lainnya dan dengan Direksi dengan tetap berpedoman pada tanggung jawab masing-masing. Bagi anggota Komisaris yang baru diangkat perlu diberikan program pengenalan berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke fasilitas Perseroan, kunjungan ke kantor wilayah dan kantor cabang atau program lainnya. Pengadaan program pengenalan ini merupakan tanggung

3. No blood relatives between the members of either the Board of Directors or the Board of Commissioners and vice versa is allowed up to the third degree, either straight or to the side line as well as related by marriage (son/daughter in law or brother/sister in law);
4. No concurrent assignment in any private enterprise that may create conflict of interests, whether directly or not, with the company interests is allowed, except otherwise approved by the GMOS in accordance with applicable laws and regulations;
5. Dedicated personality with integrity;
6. Have good knowledge of company management relating to various business strategies of the Company;
7. Have good knowledge of construction industry;
8. Have both formal and informal education background relevant with the Company's business field;
9. Dedicate sufficient time in their task implementation;
10. Able to cooperate as a board member.

The member must be able to cooperate with fellow members of the Board of Commissioners and the Board of Directors while taking into account their respective responsibilities. Newly assigned members must be provided with an introductory program comprising presentation, meeting, a visit to company facility as well as branch or regional offices, and other similar programs. Such introductory program will be the responsibility of Chief Commissioner. On

jawab Komisaris Utama. Perseroan akan secara teratur mengadakan program pembelajaran yang berkelanjutan bagi Komisaris dengan agenda dan materi sesuai kebutuhan Komisaris.

Komisaris Independen

Meskipun Brantas belum menetapkan Komisaris Independen, namun Brantas menyadari pentingnya keberadaan Komisaris dari kalangan di luar yang independen. Selain persyaratan umum Komisaris tersebut di atas, Komisaris Independen harus memenuhi kriteria sbb. :

- a. Tidak memiliki keterkaitan finansial, baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan atau Perseroan yang menyediakan jasa dan produk kepada Brantas dan afiliasinya;
- b. Tidak bekerja kepada pemerintah termasuk departemen, lembaga dan kemiliteran dalam kurun waktu tiga tahun terakhir;
- c. Tidak menjabat sebagai Direksi di Perseroan yang terafiliasi dengan Brantas;
- d. Tidak bekerja di Brantas atau afiliasinya dalam kurun waktu tiga tahun terakhir;
- e. Bebas dari kepentingan dan aktifitas bisnis atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan anggota Komisaris independen untuk bertindak atau perfikir secara bebas.

Rapat Komisaris

Komisaris mengadakan rapat sekurang-kurangnya satu kali sebulan. Rapat Komisaris terdiri dari rapat internal Komisaris dan atau

a regular basis, the Company also conducts a sustainable training program for the Commissioners with suitable agenda and materials.

Independent Commissioner

In fact, no independent commissioner has yet to be designated, Brantas, however, realizes the significance of one from independent external entity. In addition to the above general requirements, independent commissioner must meet these criteria:

- a. Have no financial relation, both directly and indirectly, with the Company or with other Companies supplying their products and services for Brantas and its affiliates;
- b. Have no employment relationship with the government including the ministry, instance and military in the last three years;
- c. Have no concurrent position as Director in any company affiliated with Brantas;
- d. Have no employment in Brantas or its affiliates in the last three years;
- e. Free of other business interests, activities, or relationship that may impede or delay the members from independence of action and thought.

The Board of Commissioners Meeting

The Board of Commissioners convenes a meeting at least once in a month. This

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Good Corporate Governance

rapat koordinasi dengan Direksi. Komisaris juga dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu apabila dipandang perlu oleh Komisaris Utama atau atas usul sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota Komisaris atau atas permintaan Direksi atau atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham yang memiliki jumlah saham minimal 10% dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

Rapat Komisaris membicarakan berbagai permasalahan bisnis Perseroan serta evaluasi terhadap kinerja Perseroan, atau pengelolaan Perseroan. Undangan rapat Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama atau salah satu Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama secara tertulis selambat-lambatnya tujuh hari sebelum terselenggaranya rapat. Undangan rapat dibuat mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat serta disertai bahan-bahan rapat undangan tersebut tidak disyaratkan apabila semua anggota hadir dalam rapat.

Rapat Komisaris adalah sah apabila dilakukan di wilayah Indonesia dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Komisaris. Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Komisaris lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu. Kuasa tersebut diartikan mempunyai semua wewenang pemberi kuasa kecuali disebutkan lain. Seorang anggota Komisaris hanya dapat mewakili seorang anggota Komisaris lainnya.

Seluruh Rapat Komisaris dibuatkan risalah rapat mencakup catatan atas segala sesuatu yang

meeting may comprise an internal meeting and coordination meeting with the Board of Directors. The Board of Commissioners may also hold meeting from time to time as deemed necessary by the Chief Commissioner or upon recommendation of no less than 1/3 (one thirds) of total members or upon request by the Board of Directors or upon request in writing by the Shareholders having at least 10% shares by specifying the issues to be discussed.

This meeting discusses various problems and evaluation with respect to either company performance or company management. The meeting invitation is issued by Chief Commissioner or one of the members assigned by the Chief Commissioner in writing by no later than seven days prior to the organization of meeting. The meeting invitation must specify the agenda, dates, time and venue of meeting while attaching related materials, no invitation will be needed should all of the members attend the meeting.

This meeting is considered valid if organized within any Indonesian jurisdiction and the decisions is so considered if attended or represented by more than 1/2 (a half) of the total members of the Board of Commissioners. A member can only be represented by another fellow member based on a written authority specifically issued for the purpose. Such authority means to hold a full authority of the endorser except otherwise specified. A member can only represent another fellow member.

To every Commissioner meeting, the minutes can be made to include records on any

dibicarakan, argumentasi yang dikemukakan, keputusan yang diambil, serta pernyataan keberatan terhadap keputusan tersebut bila ada. Risalah tersebut ditandatangani oleh Ketua Rapat Komisaris dan oleh salah seorang anggota Komisaris yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir. Salinan risalah tersebut berhak diterima oleh seluruh anggota Komisaris, walaupun yang bersangkutan tidak hadir dalam rapat.

Risalah rapat yang telah selesai dibuat harus dikirimkan selambat-lambatnya satu minggu setelah rapat. Revisi dan keberatan oleh peserta rapat atas risalah dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengiriman. Jika dalam jangka waktu tersebut tidak ada tanggapan, maka disimpulkan risalah rapat tersebut sudah disetujui seluruh anggota Komisaris.

PT. Brantas Abipraya mengikuti prinsip GCG dalam praktik rapat Komisaris yang meliputi antara lain :

1. Setiap anggota Komisaris memiliki kesepakatan dan hak suara yang sama dalam mengemukakan pendapat. Tidak ada pihak yang mendominasi jalannya rapat;
2. Keputusan Rapat Komisaris diambil atas dasar musyawarah mufakat, jika tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak;
3. Seorang anggota Komisaris berhak mengeluarkan satu suara untuk anggota Komisaris lain yang diwakilinya, apabila pengambilan keputusan dilakukan melalui suara terbanyak;

discussed topics, arguments proposed, decisions made, and statements of objection against such decisions, if any. The minutes will be signed by the meeting chairman and one of the Board members as appointed by and among those present in the meeting. A copy of the minutes of meeting must be distributed to all of the members of the Board of Commissioners, although the concerned may have not attended the meeting.

The minutes must be submitted by no later than one subsequent week. Revisions and objections by the meeting participants on the minutes can be submitted within a period of 14 (fourteen days) since the date of submission. In the event that within such period no response has been given, it can be concluded that the minutes have been agreed by the whole members of the Board of Commissioners.

PT. Brantas Abipraya follows the GCG principles in organizing the commissioners meeting, among others:

1. Each member reserves equal agreement and voting rights in expressing their opinions. No one should dominate the meeting;
2. The decision is made through deliberation for consensus, should no agreement be reached, it will be made by voting;
3. A member may take another vote in place of another member that he/she represented, if a decision is to be made by voting;

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Good Corporate Governance

- Rapat Komisaris dapat mengundang Direksi dan/atau pegawai Perseroan untuk memintai keterangan berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

Kinerja Komisaris

Kinerja Komisaris dan anggota Komisaris akan dievaluasi setiap tahun oleh Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kinerja Komisaris ditentukan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang terdapat dalam peraturan perundangan yang berlaku serta Anggaran Dasar Perseroan. Kriteria evaluasi formal disampaikan secara terbuka kepada Komisaris sejak pengangkatannya.

Hasil evaluasi terhadap kinerja Komisaris secara keseluruhan dan kinerja masing-masing anggota Komisaris secara individual akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam skema kompensasi dan pemberian insentif bagi Komisaris. Hasil evaluasi kinerja masing-masing anggota Komisaris secara individual merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi Pemegang Saham untuk menunjuk kembali anggota Komisaris yang bersangkutan. Hasil evaluasi kinerja Komisaris baik selaku Dewan maupun individu merupakan sarana penilaian serta peningkatan efektifitas Komisaris.

- The Commissioner meeting may also involve the Board of Directors and/or employees for inquiries with respect to the issues to be discussed.

The Commissioner Performance

The performance of the Board of Commissioners and its members will be evaluated on an annual basis by the Shareholders through General Meeting of Shareholders (GMOS). The commissioner performance is measured by tasks, authority and responsibility as specified in the Articles of Association and laws applicable and regulations. The formal evaluation criteria must be openly addressed to the commissioners since their assignment.

The performance evaluation result either in overall or by individual member becomes an inseparable part of the compensation and incentive scheme for the commissioner. The performance evaluation result by individual member also underlies the Shareholders consideration to reassign the concerned member. The performance evaluation result either for the overall Board or individual member adds to an assessment tool for improved commissioner effectiveness.

Hubungan kerja Komisaris dengan Direksi

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan, Komisaris menyelenggarakan pertemuan secara teratur dengan Direksi (rapat koordinasi) untuk membicarakan masalah Perseroan. Diluar pertemuan rutin tersebut, Komisaris berhak mengadakan pertemuan dengan Direksi apabila dibutuhkan. Dalam setiap pertemuan, informasi bagi Komisaris disiapkan dan diberikan secara tertulis oleh Direksi sebelum pertemuan sehingga memungkinkan Komisaris untuk mendalami permasalahan yang akan dibahas. Bila perlu Direksi dapat membantu membuat ringkasan permasalahan yang akan dibahas sepanjang tidak mempengaruhi esensi informasi.

Komisaris berhak meminta penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan kepada Direksi dan Direksi wajib memberikan penjelasan. Komisaris berhak memasuki bangunan-bangunan dan halaman-halaman atau tempat-tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa dokumen untuk keperluan verifikasi. Pelaksanaan hak Komisaris ini dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak boleh mengganggu pelaksanaan kegiatan operasional Perseroan.

Komite-komite di bawah Komisaris

Komisaris berhak mendapatkan saran profesional yang independen atas beban perseroan untuk hal-hal yang menjadi tanggung jawab profesional Komisaris agar dapat menjalankan tugasnya secara

The working relationship with the Board of Commissioners

As for the professional relationship of the Commissioners with the Directors in their implementation of controlling tasks, the Commissioners held coordination meetings with the Directors on a regular basis to discuss the corporate issues. Regardless, the Commissioners reserve the rights to hold the meeting with the Directors if considered necessary. In each meeting, the information for the Commissioners is prepared and provided in writing by the BoD before the meeting to enable the Commissioners to grasp the issues to be discussed. If necessary, the BoD may provide assistance by making summary of the issues to be discussed to the extent that it will not affect any essential information.

The Commissioners reserve the right to require explanation with respect to any issue as required from the BoD and the BoD must provide such explanation. The Commissioners reserve the right to enter any indoor or outdoor space or other premises used or controlled by the Company and reserve the right to inspect any documentation for a verification purpose. The exercise of these rights will be carried out in such a manner that they may not interfere with the company operational activities.

Committees under the Commissioner

The Commissioners reserve the right to obtain an independent professional advice at the company expenses with respect to issues for which they are professionally responsible to enable an effective task implementation.

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Good Corporate Governance

efektif. Apabila diperlukan Komisaris berhak membentuk komite-komite sebagai alat bantu dalam menjalankan tugasnya. Komite-komite tersebut bertanggung jawab membantu Komisaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta membantu merumuskan kebijakan Komisaris sesuai ruang lingkup tugas komite yang bersangkutan.

Penetapan kebijakan tetap menjadi kewenangan Komisaris kecuali untuk hal-hal yang didelegasikan dalam Surat Keputusan Komisaris. Komite-komite tersebut diketuai oleh salah seorang anggota Komisaris. Komite-komite yang dapat dibentuk oleh Komisaris antara lain Komite Audit, Komite Risiko Usaha, Komite Nominasi serta Komite Remunerasi.

Komite Audit bertugas membantu Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan audit internal.

Komite Risiko Usaha/Asuransi bertugas melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko usaha dan jenis serta jumlah asuransi yang ditutup oleh Perseroan dalam hubungannya dengan risiko usaha.

Komite Nominasi bertugas menyusun kriteria seleksi dan prosedur nominasi bagi anggota Komisaris, Direksi serta eksekutif puncak lainnya, membuat sistem penilaian dan memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Komisaris dan Direksi Perseroan. Komite Remunerasi bertugas menyusun sistem penggajian dan pemberian tunjangan bagi Komisaris, Direksi dan pegawai serta rekomendasi tentang :

If necessary the Commissioners reserve the right to form committees to facilitate their task implementation. These committees are responsible for assisting the Commissioners in their tasks and responsibility implementation, and helps in the formulation of policies in accordance with the scope of work of the concerned committee.

The policy making must remain the Commissioners' authority except for the matters as delegated in the Resolution of Commissioners. These committees will be chaired by one member of the Board of Commissioners. The committees that can be established by the Commissioners are among others Audit Committee, Business Risk Committee, Nomination Committee, and Remuneration Committee.

The Audit Committee assists the Board of Commissioners in ensuring an effective internal control system and effective task implementation of either external or Internal Auditor.

The Business Risk/Insurance must carry out assessment on a periodic basis and give recommendations with respect to the business risk and type and number of assurance paid by the Company with respect to the business risk.

The nomination committee prepares a selection criteria and nomination procedure for the member of the Commissioners, BoD, and other top executives, defines assessment system and gives recommendations with respect to the number of members of the Commissioners and BoD. The remuneration committee defines the remuneration and allowance system for the Commissioners, BoD, and employees and gives recommendations with respect to:

1. Penilaian terhadap sistem remunerasi bagi Komisaris, Direksi dan pegawai tersebut;
2. Sistem pensiun; dan
3. Sistem kompensasi serta manfaat-manfaat lain yang didapatkan pegawai apabila Perseroan melakukan perampingan pegawai.

Komite-komite tersebut atau komite-komite lainnya dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan Perseroan serta disahkan dengan Surat Keputusan Komisaris. Komite ini dapat bersifat permanen atau sementara tergantung kebutuhan.

D. DIREKSI

Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan pengurusan Perseroan demi sebesar-besarnya kepentingan Perseroan. Direksi akan mengelola bisnis dan urusan perseroan dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan dengan aktivitas Perseroan. Direksi akan bertindak secara cermat, berhati-hati dan dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting yang relevan dalam pelaksanaan tugasnya. Direksi akan menggunakan wewenang yang dimiliki semata-mata untuk kepentingan Perseroan.

Direksi memiliki tugas dan wewenang antara lain memimpin dan mengurus perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas Perseroan. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya

1. Evaluation to such remuneration system for the Commissioners, BoD, and employees;
2. Pension system; and
3. Compensation system and other benefits for the employees if the Company should consider a layoff.

These committees or that of others can be established as required by the Company and will be validated through a Resolution of Commissioners. This committee may be of either permanent or temporary nature according to the needs.

D. THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors in good faith and full responsibility performs the company management for the best interests of the Company. The Board of Directors manages the company business and dealings by keeping in mind balanced interests of the parties concerned with the company activities. The Board of Directors takes careful and cautious actions while taking into account various keys and relevant aspects in their task implementation. The Board of Directors makes use of authority given to them solely for the best interests of the Company.

The Board of Directors' job description includes leading and managing the Company in line with the company purposes and objectives and continuing to improve efficiency and effectiveness of the Company. The Board of Directors is fully responsible in their task

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Good Corporate Governance

untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya, menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.

Kriteria Anggota Direksi

Brantas menyadari sepenuhnya bahwa Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham memiliki kewenangan penuh untuk mengangkat Direksi. Namun demikian, untuk menjamin Dewan maupun anggota Direksi yang memiliki kinerja sesuai yang diharapkan, maka Perseroan perlu menetapkan kebijakan tentang kriteria anggota Direksi sesuai kebutuhan.

Program pengenalan yang diberikan kepada anggota Direksi, antara lain meliputi :

1. Direksi yang baru wajib diberikan program pengenalan mengenai Perseroan yang bersangkutan.
2. Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan Direksi yang baru berada pada Direktur Utama.
3. Tugas dan tanggung jawab Komisaris dan Direksi;
4. Program pengenalan meliputi:
 - Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perseroan.
 - Gambaran mengenai Perseroan.
 - Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit.

implementation for the best interests of the Company to achieve its purpose and objectives, to control, nurture and look after the company wealth.

Criteria for the Board of Directors Membership

Brantas fully recognizes that the Shareholders through the General Meeting of Shareholders hold full authority to assign the membership of the Board of Directors. Nevertheless, to ensure an effective task implementation of both the Board of Directors and its members, the Company requires determining a policy regarding suitable criteria of membership of the Board of Directors.

An introductory program given to the members of the Board of Directors includes:

1. Newly assigned Board of Directors must be provided with the related company introduction program.
2. The President Director is responsible for carrying out an introductory program to the newly assigned Board of Directors.
3. Tasks and responsibilities of the Board of Commissioners and the Board of Directors.
4. The Company Introduction Program includes:
 - Adaptation of the GCG principles by the Company.
 - Description about the Company.
 - Description about the delegated authority, internal and external audit, internal control system and policy, including Audit Committee.

- Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Komisaris dan Direksi.

Rapat Direksi

Rapat Direksi diselenggarakan minimal 1 (satu) bulan sekali atau apabila dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Komisaris atau Pemegang Saham yang memiliki jumlah saham minimal 10% dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan. Dalam rapat Direksi dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perseroan sesuai dengan tugas, kewenangan serta kewajibannya, pembuatan keputusan yang dianggap perlu dan juga membuat evaluasi bisnis Perseroan.

Semua keputusan dalam rapat Direksi diambil dengan musyawarah untuk mufakat. Jika hal tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak. Setiap anggota Direksi berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk anggota Direksi yang diwakilinya. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul tersebut dianggap ditolak, kecuali mengenai diri orang akan ditentukan dengan pemungutan suara secara tertutup. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang dapat menggambarkan jalannya rapat

- Description about the tasks and responsibilities of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

The Board of Directors Meeting

The BoD meeting is held at least once in every month or as deemed necessary by one or more members of the Board of Directors or upon request in writing by the one or more members of the Board of Commissioners or Shareholders having at least 10% shares by specifying the issues to be discussed. The BoD meeting discusses issues with respect to the Company according to their tasks, authorities and responsibilities, decision making as deemed necessary, and preparation of the company business evaluation.

Any decision is made through deliberation for consensus. Should no agreement be reached, it is thus to be made by voting. Each member is entitled to have 1 (one) vote and another additional 1 (one) vote for any member whom he/she represented. In the event that the voting came to an even result, the proposed decision must, thus, be voided, voting that relates to any person must be done in private. Any blank or invalid vote must be considered nonexistence and not counted in determining the final votes resulted in the meeting.

To every BoD meeting, the minutes can be made to describe the whole process, arguments

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Good Corporate Governance

secara utuh, argumentasi yang dikemukakan kesimpulan yang diambil serta pernyataan keberatan pendapat jika ada. Setiap anggota Direksi berhak menerima salinan risalah rapat Direksi, meskipun yang bersangkutan tidak hadir dalam rapat tersebut. Keberatan dan usul revisi terhadap risalah rapat disampaikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengiriman. Jika dalam jangka waktu tersebut tidak ada tanggapan, maka risalah rapat tersebut sudah disetujui seluruh anggota Direksi.

Kebijakan Menggunakan Saran Profesional

Brantas memiliki kebijakan yang memungkinkan Direksi memperoleh saran profesional yang independen dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar direksi dapat melaksanakan tugasnya dengan baik untuk kepentingan Perseroan, Brantas memperbolehkan Direksi untuk mendapatkan saran profesional atas beban Perseroan.

E. SEKRETARIS KORPORAT

Perseroan menyadari sepenuhnya pentingnya hubungan yang baik antara organ perseroan (RUPS, Komisaris dan Direksi) dan hubungan antara Perseroan dan stakeholders. Untuk melaksanakan tugas tersebut Perseroan menunjuk seorang Sekretaris Korporat. Secara struktural Sekretaris Korporat bertanggung jawab kepada Direksi dan memiliki kewenangan yang memadai.

proposed, conclusions made, and statements of objection, if any. Each member is entitled to a copy of the minutes of the meeting, although the concerned member may have not attended the meeting. Objections and proposed revision on the minutes can be submitted within a period of 14 (fourteen days) since the date of submission. In the event that within such period no response has been given, it can thus be agreed by the whole members.

Policy of Using Professional Advice

Brantas entails policy enabling the Board of Directors to obtain any independent professional advice in their implementation of tasks and responsibilities in accordance with applicable laws and regulations. In order to perform well in their tasks implementation for the company interests, Brantas allows the Board of Directors to obtain independent professional advice at the company expenses.

E. CORPORATE SECRETARY

Good relationship between the company organs (GMOS, Commissioners, and BoD) is well-recognized by the Company, and so is that between the Company and the Stakeholders. To exercise this, the Company will assign a Corporate Secretary. Structurally, the Corporate Secretary is responsible to the Board of Directors and have sufficient authority.

STANDAR AKUNTANSI, PENGENDALIAN INTERNAL DAN EKSTERNAL

A. STANDAR AKUNTANSI

Brantas memastikan bahwa semua kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan akuntansi selalu merujuk dan memenuhi ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). PSAK tersebut mewajibkan Perseroan menyajikan Laporan Keuangan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, perubahan ekuitas dan arus kas dan pengungkapan lainnya dalam catatan atas laporan keuangan. Untuk hal-hal yang belum diatur dalam PSAK, pengungkapan yang dilakukan Perseroan senantiasa mempertimbangkan aspek relevansinya terhadap kebutuhan pengguna laporan keuangan dan dapat diandalkan.

Penyajian laporan keuangan (neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas) pada setiap tahun buku, dilakukan Brantas untuk memenuhi kepentingan semua pihak yang terkait dengan Perseroan Brantas memiliki komitmen untuk mengungkapkan laporan tersebut secara adil dan transparan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

B. SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Sistem Pengendalian Internal Keuangan diberlakukan untuk memberikan jaminan kebenaran informasi keuangan, efektivitas dan efisiensi proses pengelolaan Perseroan serta kepatuhan kepada perundang-undangan yang terkait.

Sedangkan menyangkut hubungan kerja antara SPI (Satuan Pengawas Intern) dengan Komite

ACCOUNTING STANDARD, INTERNAL AND EXTERNAL CONTROL

A. ACCOUNTING STANDARD

Brantas ensures that all policies and regulations with regards to accountancy at all time refer and are in compliance with the provisions set forth in the Statement of Financial Accounting Standard (PSAK). PSAK requires any Company to present their Financial Statements as objective as possible in terms of financial status and performance, changes in equity, and cash flow as well as other disclosures to record in the financial statement. For the issues not provided for in the PSAK, the company disclosure must always take into account its reliability and relevance with the need of the report users.

The financial report presentation (balance sheet, profit-loss statement, cash flow, and change in equity) in each fiscal year is given by Brantas to satisfy the needs of all related parties. Brantas commits to the disclosure of such reports in a fair and transparent manner according to applicable provisions.

B. INTERNAL CONTROL SYSTEM

This financial control is made applicable to ensure accuracy of financial information, effective and efficient process of company management and compliance with applicable laws.

In the meantime, the professional relationship between the SPI (Internal Control Unit) and the

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Good Corporate Governance

Audit antara lain meliputi :

1. Komite Audit mengevaluasi independensi, objektivitas dan efektivitas SPI
2. Komite Audit memonitor ketaatan terhadap Kode Etik Profesi Auditor
3. Komite Audit memberi pertimbangan kepada Komisaris tentang perubahan / pengangkatan dan pemberhentian Kepala SPI

C. AUDIT EKSTERNAL

Dalam hubungannya dengan Auditor Eksternal, Perseroan menetapkan kebijakan-kebijakan sebagai berikut :

1. Merupakan kewenangan RUPS untuk menunjuk Auditor Eksternal dari calon yang diajukan oleh Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit;
2. Komite Audit melalui Komisaris wajib menyampaikan kepada RUPS alasan pencalonan Auditor Eksternal tersebut;
3. Auditor Eksternal tersebut harus bebas dari pengaruh Komisaris, Direksi dan pihak yang berkepentingan di Perseroan;
4. Perseroan wajib menyediakan bagi Auditor Eksternal semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan sehingga memungkinkan Auditor Eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaatannya, dan kesesuaian laporan keuangan Perseroan dengan standar akuntansi keuangan Indonesia;

Audit Committee includes as follows:

1. The Audit Committee evaluated the SPI's independency, objectivity and effectiveness
2. The Audit Committee monitors compliance with the Auditor's Professional Code of Conduct
3. The Audit Committee provides considerations to the Board of Commissioners as to the modification / assignment and discharge of SPI Chairman

C. EXTERNAL AUDITOR

In connection with the External Auditor, the Company determined such policies as the following:

1. It is GMOS authority to take any External Auditor out of candidates proposed by the Board of Commissioners as recommended by the Audit Committee;
2. The Audit Committee through the Board of Commissioners presents to the GMOS the rationales of such External Auditor nomination;
3. The said External Auditor must be free of the Commissioners, Directors, and other concerned company personnel's influences;
4. The Company is responsible for providing the External Auditor with every accounting record as well as supporting data as required to enable them to express their opinions as to fairness, compliance, and agreement of the corporate financial report with Indonesian Accounting Standard;

5. Penunjukan Auditor Eksternal dibatasi untuk maksimum 3 tahun buku berturut-turut oleh KAP & Partner yang sama

PENUTUP

1. Code of Corporate Governance ini disusun dengan memperhatikan antara lain UU Nomor 40 Tahun 2007, UU Nomor 18 Tahun 1999, UU Nomor 19 Tahun 2003, PP 12 Tahun 1998, Keputusan Menteri BUMN Nomor : KEP-117/MBU/2002, KEP-101/MBU/2002, dan KEP-103/MBU/2002, serta Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan-peraturan lainnya. Code of Corporate Governance ini hanya memuat hal-hal penting yang akan menjadi acuan dalam tata kelola Perseroan. Hal-hal lain yang tidak dimuat dalam Code ini tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku.
2. Code of Corporate Governance ini ditelaah dan dimutakhirkan secara berkala untuk disesuaikan dengan fungsi, tanggung jawab, dan wewenang organ-organ Perseroan serta perubahan lingkungan Perseroan.
3. Setiap perubahan terhadap Code of Corporate Governance harus disetujui oleh Direksi dan Komisaris.
4. Setiap pegawai dapat menyampaikan laporan tertulis mengenai dugaan pelanggaran terhadap penerapan Good Corporate Governance melalui Tim CG atau media lain yang ditetapkan / disediakan Perseroan untuk kepentingan tersebut.

5. The assignment of the External Auditor must be limited to 3 consecutive fiscal years by the same Public Accounting and Partner.

CONCLUSION

1. This Code of Corporate Governance is prepared by taking into account among others the Law Number 40 of 2007, Law Number 18 of 1999, Law Number 19 of 2003, Government Regulation Number 12 of 1998, Ministerial Decrees of SOE Numbers: KEP-117/MBU/2002, KEP-101/MBU/2002, and KEP-103/MBU/2002, as well as the Articles of Association and other related regulations. This Code of Corporate Governance contains only primary issues to serve as references throughout the corporate governance. Other issues not provided for in this Code shall remain to refer to relevant and applicable laws and regulations
2. This Code of Corporate Governance is reviewed and updated on a periodic basis to match the function, responsibility, and authority of the company organs as well as change in the company environment.
3. Any modification to this Code of Corporate Governance must be approved by the Board of Directors and the Board of Commissioners.
4. Each employee may submit report in writing with respect to alleged violation to the implementation of Good Corporate Governance through GCG team or other media as required / made available by the Company for such purpose.

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Good Corporate Governance

- Code of Corporate Governance ini dinyatakan berlaku efektif sejak ditetapkan oleh Komisaris dan Direksi.
- Code of Corporate Governance ini didistribusikan kepada seluruh pejabat Perseroan dengan mengacu kepada mekanisme distribusi dokumen Perseroan

ETIKA PERUSAHAAN

Dengan adanya Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor Kep-117/MMBU/ 2002 tentang Penerapan Praktik GCG pada BUMN, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar PT. Brantas Abipraya, Visi dan Misi Perseroan serta praktik-praktik terbaik GCG, diperlukan pula Pedoman Etika dan Perilaku (Code of Conduct). Ini merupakan penjabaran dari kaidah-kaidah GCG dan sebagai dasar serta acuan dalam pengelolaan Perseroan.

A. INTEGRITAS DALAM AKTIVITAS BISNIS dan PEKERJAAN

Perseroan menerapkan standar etika dalam melakukan seluruh aktivitas bisnis berdasarkan prinsip-prinsip good corporate governance. Brantas menjalankan operasional bisnis dengan lingkup kegiatan usaha utama di bidang konstruksi dan rancang bangun antara lain meliputi : (1) pekerjaan sipil umum; (2) pekerjaan bangunan gedung; (3) pekerjaan mekanikal dan elektrikal dan lain-lain. Brantas juga melakukan diversifikasi usaha

- This Code of Corporate Governance is effective since its determination by the Board of Commissioners and Board of Directors.
- This Code of Corporate Governance is distributed to all of the company officials with reference to the company document distribution mechanism.

COMPANY CODE OF CONDUCT

Given the Ministerial Decree of State-Owned Enterprise (SOE) Number Kep-117/MMBU/ 2002 on the Implementation of GCG Practice in SOE, the Law Number 40 of 2007 regarding Limited Liability Company, Articles of Association of PT. Brantas Abipraya, company vision and mission as well as GCG best practices, a Code of Conduct is also required thereto. This comprises a description of GCG principles and becomes the basis and reference for the company management.

A. INTEGRITY IN BUSINESS ACTIVITY AND WORK

The Company applies an ethical standard in carrying out the entire business activities based on the principles of good corporate governance. Brantas' business operations are delivered with construction and design as its main business field, which includes among other things: (1) general civil works; (2) building construction works; (3) mechanical and electrical works, and etc.

Brantas also diversifies its business to include other areas closely related to the corporate



B. MANAJEMEN RISIKO

Brantas menyadari bahwa jalannya operasional Perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko, baik risiko yang berada di bawah kendali maupun risiko yang berada di luar kendali Perseroan. Oleh karena itu Brantas menyadari akan pentingnya pengelolaan risiko Perseroan secara terintegrasi, optimal dan berkesinambungan.

Manajemen Risiko di Brantas antar lain meliputi :

- Perseroan melakukan identifikasi risiko dengan seksama, baik risiko yang berada di bawah kendali Perseroan maupun risiko yang berada di luar kendali Perseroan;

B. RISK MANAGEMENT

Brantas realizes that no company operation is free from risks, both within and beyond the control of the Company. Therefore, Brantas realizes the significance of company risk management in an integrated, optimized and sustainable manner.

At Brantas, the Risk Management includes:

- The Company carefully identifies risks, both within and beyond its control;

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Good Corporate Governance

2. Perseroan melakukan penanganan terhadap berbagai risiko berdasarkan skala prioritas dan sumber daya yang dimiliki;
3. Perseroan mengungkapkan risiko dan penanganannya dalam Laporan Tahunan.

2. The Company deals with various risks based on priorities and resources at hand;
3. The Company discloses such risks along with methods through which they are managed in the Annual Report.

C. HUBUNGAN DENGAN PEMEGANG SAHAM

Brantas akan memperlakukan Pemegang Saham secara adil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemegang Saham yang memiliki saham dengan klasifikasi yang sama akan mendapatkan perlakuan yang setara dan dapat menggunakan hak-haknya sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap Pemegang Saham berhak mengeluarkan suara sesuai dengan klasifikasi dan jumlah saham yang dimilikinya. Setiap pemegang saham berhak memperoleh informasi material yang lengkap dan akurat mengenai Perseroan, kecuali untuk informasi di mana Direksi memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk tidak memberikannya.

D. HUBUNGAN DENGAN PEMBERI PEKERJAAN (KLIEN)

Perseroan menempatkan Pemberi Pekerjaan (klien) sebagai mitra bisnis yang akan membantu pencapaian kinerja Perseroan. Kebijakan yang dijalankan Perseroan menjamin hubungan kerja sama secara umum dengan Pemilik Pekerjaan dilakukan secara profesional dan memenuhi prinsip kesetaraan. Perseroan menyediakan informasi material

C. RELATIONSHIP WITH THE SHAREHOLDERS

The Shareholders are treated by Brantas in a fair manner in accordance with applicable laws and regulations. The Shareholders having share of similar classification are also treated equally and are able to exercise their rights in accordance with the Articles of Association as well as applicable laws and regulations.

Each Shareholder reserves the right to vote in agreement with their classification and volumes of shares. Each Shareholder reserves the right to obtain complete and accurate material information with respect to the Company, except for information where the Board of Directors are responsibly justified not to disclose them.

TD. RELATIONSHIP WITH THE CLIENT

The Company considers the client as a business partner that helps in the company performance achievements. The company policies ensure that the cooperative relationship with the Client is in overall done in a professional manner while following the principle of equality. The Company provides any necessary material

yang diperlukan tentang Perseroan secara benar, akurat dan tepat waktu sebagai dasar pengambilan keputusan bagi calon Pemberi Pekerjaan (klien) dalam berhubungan dengan Perseroan.

Perseroan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya selalu mengutamakan kualitas pekerjaan dan kepuasan Pemberi Pekerjaan (Klien) sejak dari perencanaan pekerjaan sampai pekerjaan selesai. Perseroan melakukan survei kepuasan yang dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali pada Pemberi Pekerjaan (Klien) pada proyek-proyek, yang telah selesai untuk mengetahui kepuasan Pemberi Pekerjaan (Klien) dari tahun ke tahun.

E. SISTEM PEMASARAN

Brantas melakukan pemasaran secara konsisten dengan program peningkatan kepuasan Pemberi Pekerjaan (klien) dari tahun ke tahun. Brantas selalu berupaya memberikan alternatif solusi kepada Pelanggan berdasarkan prinsip saling menguntungkan. Brantas memiliki sistem informasi yang tangguh yang memungkinkan pengambilan keputusan secara tepat dan cepat, sehingga kesempatan dalam memperoleh berbagai jenis pekerjaan atau proyek yang menguntungkan dapat dilakukan secara terintegrasi pada tingkat Perseroan.

Berbagai informasi pasar dari berbagai sumber daya (departemen/instansi, konsultan, hubungan individual dan lain-lain) dikelola secara optimal oleh Perseroan dalam

information with respect to the Company in a proper, accurate and punctual manner to base the decision making by the Client in dealing with the Company.

The Company in carrying out its business activities at all time gives priority to quality work and the Client's satisfaction from the planning to the completion of any work. The Company has a satisfaction survey conducted at least once in every year to the Client against the completed projects to find out the client satisfaction year after year.

E. MARKETING SYSTEM

Brantas conducts a consistent marketing under the Client satisfaction improvement program year after year. Brantas as at all time strives to provide alternative solutions to the client based on the principle of mutual benefits. Brantas has a strong information system that allows accurate and quick decision-making that the opportunity to acquire different types of favorable jobs or projects can be found integrated at the company level.

A variety of market information from various resources (departments/agencies, consultants, individual relationship, etc.) are optimally managed by the Company in order to obtain

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Good Corporate Governance

memperoleh berbagai jenis pekerjaan atau proyek yang saling menguntungkan dapat dilakukan secara teintegrasi pada tingkat Perseroan.

Brantas menyadari bahwa persaingan dalam Jasa Konstruksi cukup tajam dengan banyaknya perusahaan sejenis dan masuknya kontraktor asing akibat globalisasi, maka Brantas selalu melihat kemampuan perusahaan pesaing dan melihat pertumbuhan usaha dengan membandingkan kinerja tahun-tahun sebelumnya. Brantas menghargai prinsip-prinsip persaingan yang sehat dalam aktivitas bisnis.

F. HUBUNGAN DENGAN PENGGUNA AKHIR

Brantas selalu berusaha untuk memberikan pelayanan dengan kualitas terbaik kepada pengguna akhir produk Brantas. Brantas akan selalu berusaha meningkatkan kualitas produknya, dengan menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000 (yang merupakan peningkatan dari Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:1994 dan Sistem Manajemen Mutu ISO 9002:1994), ISO 18001:2007 (OHSAS), SMK3, ISO 14001:2004 (Sistem Manajemen Lingkungan) . Untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pengguna, Perseroan melakukan berbagai pendekatan seperti :

1. Perseroan melakukan sertifikasi ISO 9001 : 2000 untuk sistem manajemen mutu; ISO 18001:2007 (OHSAS); SMK3; ISO 14001:2004 (Sistem Manajemen Lingkungan)
2. Perseroan memberikan layanan purna jual yang sesuai.

various types of work and projects of mutual benefit that they can be performed at the company level.

Brantas realizes a sufficiently tight competition in the Construction Services with many companies of similar nature and the influx of foreign contractors due to globalization, Brantas at all time observes the competitors' ability and the business growth by comparing the performance of previous years. Brantas respects the principles of fair competition in business activity.

F. RELATIONSHIP WITH END USERS

Brantas always strives to deliver best quality service to the end user of its products. Brantas at all time makes efforts to improve the quality of its products by applying the Quality Management System of ISO 9001:1994 and that of ISO 9002:1994), ISO 18001:2007 (OHSAS), SMK3, ISO 14001:2004 (Environmental Management System). In order to provide the best services to the users, the Company carried out a series of approaches as follows:

1. Certification for ISO 9001: 2000 for quality management system; ISO 18001:2007 (OHSAS); SMK3; ISO 14001:2004 (Environmental Management System)
2. Provision of appropriate after sales services.

G. HUBUNGAN DENGAN REKANAN

Brantas menjalin kerjasama dengan mitra kerja dilandasi etikat baik dan saling menguntungkan yang dituangkan dalam kesepakatan secara tertulis, serta mematuhi setiap kesepakatan yang telah di tuangkan dalam kontrak kerjasama.

Brantas bertindak adil dengan memberikan kesempatan yang sama pada seluruh rekanan yang memiliki kualifikasi yang sama tanpa diskriminasi. Pertimbangan pemberian pekerjaan didasarkan atas kriteria yang antara lain meliputi :

1. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial dalam bidang usaha yang dapat dibuktikan dengan kualifikasi yang dikeluarkan asosiasi yang bersangkutan;
2. Memiliki sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
3. Memiliki track record yang baik;
4. Tidak pernah membuat pernyataan yang tidak benar tentang kualifikasi yang dimilikinya;
5. Kerjasama yang saling menguntungkan. Namun Brantas dalam melaksanakan fungsinya sebagai good corporate citizen mempunyai komitmen untuk membina rekanan ekonomi lemah untuk berkembang secara bertahap melalui proses kualifikasi yang ditentukan oleh Perseroan.

G. RELATIONSHIP WITH PARTNERS;

Brantas enters into cooperation with partners based on a mutual benefit and good faith as specified in a written agreement while abiding by any agreement established in the form of contract.

Brantas exercises fairness by giving an equal opportunity to all partners with similar qualifications rather than discrimination. Any award of contract is carried out in consideration of the following criteria hereof:

1. Have the technical and managerial expertise, experience in similar field of business as evidenced with qualifications issued by relevant association;
2. Have resources required for the job implementation;
3. Have excellent track record;
4. Never made untrue statement of qualification;
5. Cooperation for mutual benefits. However, Brantas in performing its functions as a good corporate citizen committed to fostering small enterprise partners in order to enable them to eventually grow through a qualification process determined by the Company.

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Good Corporate Governance

H. SISTEM PENGADAAN DAN KONTRAK PEKERJAAN

Brantas menerapkan proses pengadaan sesuai good corporate governance dengan menjunjung prinsip-prinsip keterbukaan, efisiensi biaya, kompetitif, fairness sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Brantas mematuhi etika proses pengadaan dalam proses pengadaan barang dan jasa antara lain :

1. Melaksanakan tugas pengadaan barang dan jasa dengan tertib dan disertai tanggung jawab
2. Bekerja secara profesional, mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa.
3. Tidak mencampuri tugas dan kewenangan yang diberikan kepada tim pengadaan baik langsung maupun tidak langsung. Kontrak Pekerjaan antara Perseroan dengan rekaman memuat kesanggupan rekanan untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, dan hak rekanan mendapatkan seluruh haknya berdasar kewajiban yang telah dilaksanakan sesuai yang disepakati dalam kontrak serta sanksi atas tidak dipenuhinya kewajiban masing-masing.

H. PROCUREMENT AND CONTRACTING SYSTEM

Brantas applies appropriate procurement process in compliance with the good corporate governance while upholding the principles of transparency, cost efficiency, competitiveness, and fairness in accordance with applicable laws and regulations. Brantas also complies with ethical process during the procurement of goods and services including among others:

1. Carry out the procurement tasks in an orderly and responsible manner
2. Exercise honest professionalism and independency, and keep confidential the procurement documents as it should prevent irregularities during the procurement of goods and services.
3. In no case interfere with the tasks and responsibilities given to the procurement team, both directly and indirectly. Contract between the Company and the partner includes the partner's ability to perform their obligations in accordance with the terms agreed upon, and the partner's exercise of its rights with reference to the obligations that have been made as agreed in the contract as well as sanctions for non-fulfillment of respective obligations.

I. SISTEM PENGADAAN DAN KONTRAK PEKERJAAN

Pegawai Brantas terdiri atas Pegawai tetap (KKWT) yang dikelompokkan Tenaga Organik (TO), Tenaga Bulanan (TB) dan Pegawai Tidak Tetap (KKWTT) yang terdiri dari Tenaga Harian (TH) dan Tenaga Honorer (TR). Terhadap klasifikasi pegawai tersebut, Perseroan mempunyai komitmen untuk memperlakukan seluruh pegawai sesuai dengan hak dan kewajibannya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajiban Karyawan ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan. Kontrak atau perjanjian antara perusahaan dengan karyawan dibuat secara tertulis dengan memuat hak dan kewajiban setiap pihak secara jelas.

Perusahaan mempunyai wewenang dalam menerima, mengangkat, menempatkan dan memberhentikan karyawan serta memberikan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perseroan menetapkan beberapa kebijakan mengenai pegawai dan hubungan industrial antara lain :

1. Melakukan penataan pekerjaan dengan baik sehingga memotivasi dan memberdayakan pegawai;
2. Mengusahakan agar remunerasi yang diterima pegawai, secara umum

I. PROCUREMENT AND CONTRACTING SYSTEM

Brantas personnel consists of Full-time employees (KKWT) grouped into: Organic Staff (TO), Monthly Staff (TB) and Part-time employees (KKWTT) consisting of Daily Staff (TH) and Honorary Workers (TR). To such classification of the employee, the Company is committed to treating all employees in accordance with the rights and obligations set out in applicable laws and regulations.

The appointment, dismissal, status, rights and obligations of employees are defined through employment agreements in accordance with the labor laws and regulations. Contract agreement between the Company and employee is made in writing clearly indicating the rights and obligations of each party.

The Company has the authority to recruit, assign, post and dismiss any employee and give disciplinary action in accordance with applicable regulations.

The Company defines a series of policies regarding employee and industrial relations, which include as follows:

1. To carry out work reorganization in order to motivate and empower the employees;
2. To seek that the employee's remuneration will generally follow any applicable rules while comparable and

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Good Corporate Governance

mengikuti peraturan serta sebanding dan kompetitif dengan industri sejenis;

3. Memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang sejalan dengan kompetensi dan kebutuhan perseroan;
4. Meningkatkan disiplin pegawai agar mematuhi aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan;
5. Menerapkan reward dan punishment secara adil sesuai prestasi atau tingkat kesalahan pegawai;
6. Memberikan hak kepada pegawai untuk berserikat sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
7. Menempatkan PKB sebagai komitmen Perseroan
8. Memberikan kondisi kerja yang baik dan aman bagi pegawai
9. Memberikan hak-hak purna bakti sesuai ketentuan yang berlaku.

Brantas menyadari sepenuhnya adanya perubahan lingkungan bisnis yang dinamis. Untuk itu segenap jajaran Brantas baik Komisaris, Direksi, dan pegawai akan selalu berusaha untuk menjalin kemitraan agar saling mendukung dalam mencapai tujuan dan kemajuan bersama. Brantas akan selalu berusaha meningkatkan mutu manajemen dan kualitas pegawai sehingga dapat bekerja secara efisien dan efektif.

competitive with similar industries;

3. To provide opportunities for employees to participate in education and training according to their competencies as well as company needs;
4. To improve the employee's discipline in order to realize compliance with the established rules and policies;
5. To apply fair reward and punishment according to employee's achievements or fault;
6. To provide the employees with their right of association subject to applicable laws and regulations;
7. To respect the PKB as the company commitment;
8. To provide favorable and safe working conditions for the employees;
9. To provide severance rights in accordance with applicable regulations.

Brantas is fully aware of dynamic changes in business environment. Therefore, all company organs at Brantas, whether the Board of Commissioners, the Board of Directors, or employees at all time seeks to establish partnerships for mutual support in achieving the company goals and progress. Brantas also strives at all time to improve the quality of management as well as employees for efficient and effective task implementation.

J. KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA PEGAWAI

Brantas senantiasa mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Perseroan menyadari bahwa pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja secara optimal sangat penting bagi keberhasilan jangka panjang.

Brantas menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Oleh karena itu Perseroan akan memastikan bahwa lokasi usaha serta fasilitas, sarana dan prasarana Perseroan lainnya, memenuhi peraturan perundangundangan yang berlaku berkenaan dengan kesehatan dan keselamatan kerja.

Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pegawai diusahakan Perseroan dengan cara antara lain :

1. Melaksanakan berbagai implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK-3) sesuai dengan peraturan yang berlaku secara konsisten dalam upaya memberikan perlindungan optimal pada pegawai Perseroan dari hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan pegawai;
2. Mengupayakan perbaikan berkelanjutan atas berbagai infrastruktur yang berkaitan dengan K3;
3. Memperoleh beberapa sertifikasi yang berhubungan dengan K3 (SMK-3 untuk beberapa proyek, Zero Accident Award);
4. Menyertakan partisipasi Pegawai sebagai bagian dari upaya peningkatan pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja.

J. OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

Brantas has at all time prioritized occupational health and safety. The Company realizes that an optimized occupational health and safety is a key to long-term success.

Brantas provides its employees with safe and healthy working environment. Therefore, the Company ensures that its business location and facilities, as well as other facilities and infrastructure comply with the relevant rules and regulations.

Such occupational health and safety is sought by the Company by way of among others:

1. Conducting a series of Occupational Health and Safety Management System (SMK-3) in accordance with applicable laws and regulations in a consistent manner in order to provide optimal protection for the employees from various threats;
2. Making efforts to refurbish numerous K3-related infrastructures on a sustainable basis;
3. Obtaining a series of K3-related certifications (SMK-3 for a number of projects, Zero Accident Award);
4. Involving the employees in the efforts to improve the implementation of occupational health and safety.

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Good Corporate Governance

K. PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Brantas menjalankan operasi Perseroan dengan mematuhi hukum maupun praktik standar industri konstruksi yang berlaku serta kebijakan dan standar sistem manajemen lingkungan dalam rangka perhatiannya terhadap perlindungan kelestarian lingkungan Brantas selalu mengevaluasi kebijakan tentang lingkungan Dalam menjalankan pekerjaan setiap pegawai melakukan identifikasi, kontrol dan menghindari atau meminimalkan penggunaan bahan-bahan yang memberikan dampak negatif pada lingkungan serta mengurangi limbah Sistem manajemen lingkungan akan dilakukan peningkatan secara berkelanjutan.

L. HUBUNGAN DENGAN MASYARAKAT

Brantas sangat menyadari bahwa di manapun Perseroan beroperasi selalu berhubungan dengan masyarakat sekitar yang memiliki karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu Brantas mempunyai komitmen bahwa hubungan baik serta pengembangan masyarakat sekitar merupakan landasan pokok bagi keberhasilan jangka panjang Perseroan.

Dalam hubungan dan kemitraan dengan masyarakat sekitar, Brantas akan senantiasa menerapkan berbagai prinsip antara lain :

1. Beradaptasi dengan perkembangan nilai-nilai budaya luhur masyarakat sekitar.
2. Berpartisipasi aktif dalam membantu pengembangan masyarakat sebagai rasa tanggung jawab sosial Perseroan.

K. ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

Brantas performs the corporate operations according to the applicable law and acceptable practice of construction industry standards as well as the environmental management policies and standards that reflect its concerns to the conservation. Brantas at all time evaluates its policy with respect to environment. In carrying out their tasks, each employee must identify, control and avoid or minimize the use of hazardous materials while reducing wastes. The environment management system must be given improvement in a sustainable manner.

L. RELATIONSHIP WITH COMMUNITY;

Brantas is exceptionally aware that the company operation constantly deals with the communities with diverse characteristics. Therefore, Brantas commits that good relationship and development of surrounding community is a basic foundation for long-term company success.

As for the relationship and partnership with the communities, Brantas continues applying various principles such as:

1. Adapting to the development of cultural core values in the society.
2. Active participation in facilitating the community development as the corporate social responsibility.

M. HUBUNGAN DENGAN MASYARAKAT

Brantas memiliki kebijakan yang mengharuskan Komisaris, Direksi, dan Pegawai yang mewakili Perseroan dalam setiap urusan Pemerintah dan politik, untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur keterlibatan Perseroan dalam urusan publik.

Brantas mengakui hak setiap orang untuk menyalurkan aspirasi politik sesuai dengan keyakinannya Oleh karena itu Perseroan tidak memperbolehkan seorngpun melakukan pemaksaan kepada orang lain sehingga membatasi hak individu yang bersangkutan untuk menyalurkan aspirasi politiknya.

Brantas memiliki kebijakan untuk meminta agar pegawai yang aktif dalam politik sebagai pengurus politik dan/atau menjadi calon legeslatip salah satu partai politik dalam pemilu untuk mengundurkan diri dari Perseroan sebagai mana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sesuai Surat Edaran Kementerian BUMN nomor : SE 15/MBU/2008 tanggal 31 Juli 2008.

Brantas melarang pemberian sumbangan untuk partai politik manapun sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang. Praktik yang diterapkan Brantas dalam kaitannya dengan keterlibatan dengan politik diantaranya menyatakan Perseroan tidak akan memberikan dana, aset atau fasilitas Perseroan untuk kepentingan partai politik, seorang atau lebih calon anggota legeslatif, eksekutif dan yudikatif kecuali dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

M. RELATIONSHIP WITH COMMUNITY

Brantas' policy requires its Boards of Commissioners and BoD and employees representing the Company in any government and political affairs to abide by the laws and regulations governing company involvement in public affairs.

Brantas recognizes everyone's right of political aspirations according to their beliefs. Therefore, it allows no one to force each other by limiting the individual rights to channel their political aspirations.

Brantas' policy also requires any employee involved in politics, being whether political organizer and/or legislative candidate for any political party to resign from the Company as provided for in applicable laws and regulations and in accordance with Circular of Minister of SOE number: SE 15/MBU/2008 dated 31 July 2008.

Brantas prohibits donations to any political party as provided by law. Brantas' practices in relation to the political engagement demonstrate that no fund, asset or facility shall be provided by the Company for the benefit of any political party, one or more incumbents for legislative, executive and judicative unless conducted in accordance with applicable laws and regulations.

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Good Corporate Governance

N. PERNYATAAN PALSU, KLAIM PALSU DAN KONSPIRASI

Setiap pihak di dalam Perseroan, yang berkaitan dengan proyek mulai penyiapan proposal, negosiasi dan administrasi termasuk akuntansi untuk biaya dan kewajiban, kajian serta penulisan laporan, harus menyadari pentingnya membuat pernyataan (lisan maupun tertulis) yang akurat dan klaim yang benar kepada Direksi, Komisaris, Pemegang Saham, Pemerintah maupun pihak lain.

O. ETIKA BERUSAHA DAN ANTI KORUPSI

Dalam rangka mewujudkan komitmen perusahaan menjadi good corporate citizen, Brantas mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh semua pihak dalam menciptakan iklim bisnis yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Oleh karena itu Brantas akan senantiasa berupaya untuk menerapkan etika berusaha yang dilandasi nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip bisnis yang berlaku secara umum.

Dalam melaksanakan prinsip tersebut di atas, Brantas melarang anggota Komisaris, Direksi dan Pegawai untuk menerima sesuatu yang berharga baik langsung maupun tidak langsung, yang patut diduga merupakan penyuapan atas tugas / jabatan yang menjadi kewenangannya. Brantas membuat suatu pedoman tentang perilaku etis, yang memuat nilai-nilai etika berusaha.

N. FAKE STATEMENT, FAKE CLAIM AND CONSPIRACY

Any corporate entity involved in any project from the proposal, negotiation to administration that includes accounting for costs and liabilities, report study and writing must be aware of the importance of accurate and honest statement (oral or written) to the Board of Directors and Commissioners, Shareholders, Government and other related parties.

O. BUSINESS ETHICS AND ANTI CORRUPTION

In order to realize the company commitment to being a good corporate citizen, Brantas supported any effort made by all entities to create a business that is free from corruption, collusion and nepotism (KKN). Therefore, Brantas has made any effort at all time to adapt business ethics based on the company values as well as commonly accepted business principles.

In favor of the above principles, Brantas prohibits commissioners, directors and employees from receiving anything of value, directly or indirectly, suspected to be of bribery in relation to their authorities. Brantas shall prepare guidance for the code of conduct containing ethical principles of business.

P. HUBUNGAN DENGAN PEJABAT NEGARA

Adalah kebijakan Perseroan untuk mengembangkan dan memelihara hubungan baik dan komunikasi efektif dengan setiap pejabat negara yang memiliki wewenang pada bidang operasi Perseroan dalam batas toleransi yang diperbolehkan oleh hukum.

Setiap kontak dengan pejabat Pemerintah harus dipelihara sebagai hubungan yang bersifat objektif dan wajar (armslength) dan harus dihindari terjadinya penyimpangan.

Perlakuan terhadap pejabat negara harus dilakukan dalam koridor hukum yang berlaku, dengan cara yang etis dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Q. DATA PERUSAHAAN DAN KERAHASIAAN INFORMASI

Setiap pejabat yang mempunyai kewenangan harus menyampaikan informasi yang relevan kepada auditor dan bekerjasama sepenuhnya dengan auditor internal dan auditor eksternal dalam proses audit kepatuhan atau penyidikan lainnya.

Brantas memiliki kebijakan untuk melarang setiap anggota Komisaris, anggota Direksi, Auditor Internal, Auditor Eksternal, Komite Audit dan Pegawai mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia mengenai Perseroan atau pelanggan ke luar Perseroan baik selama masa kerja atau sesudahnya. Mengingat bahwa pengungkapan informasi rahasia tersebut akan merugikan Perseroan atau pelanggan dan memberikan keuntungan kepada pihak lain, maka pengungkapan pemberian informasi rahasia menurut keperluannya harus melalui

P. RELATIONSHIP WITH STATE OFFICIAL;

It is the company policy to develop and maintain good relationships and effective communications with any state officials having authority in the corporate area of specialty within a tolerated limit the law shall approve.

Any contact with Government officials must be preserved as arm's length relationship and any irregularities that may arise from which must be avoided.

The dealing with any state official should be done according to applicable law, in such an ethical manner while not conflicting with applicable laws and regulations.

Q. CORPORATE DATA AND CONFIDENTIAL INFORMATION

Any authorized staff must provide relevant information to and fully cooperate with either internal or external auditor during a compliance audit or any other investigation.

At Brantas, it is prohibited for any member of the Board of Commissioners, the Board of Directors, Internal Auditors, External Auditors, Audit Committee and Employee to disclose the company confidential information or customers to any outside party either during or after their employment. Given that such disclosure may be detrimental to the Company or its customers while at the same time providing benefits to other party, thus, a prior approval of the Board of Directors shall be required.

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Good Corporate Governance

R. KETERBUKAAN INFORMASI

Perseroan akan mengungkapkan informasi penting yang relevan dalam Laporan kepada pihak-pihak yang berwenang (Laporan Tahunan, Laporan Semesteran dan lain-lain) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tepat waktu, akurat, jelas dan objektif.

Perseroan akan selalu berusaha untuk memelopori dan mengambil inisiatif dalam mengungkapkan informasi keuangan dan non keuangan penting bagi pengambilan keputusan pemilik modal, kreditur dan pihak berkepentingan lainnya baik pengungkapan yang bersifat wajib maupun yang bersifat sukarela. Pengungkapan informasi tersebut, oleh Brantas dilakukan melalui Laporan Tahunan maupun media lain yang dianggap perlu.

S. PENYELEWENGAN

Perseroan menetapkan kebijakan untuk melarang setiap bentuk penyelewengan dan senantiasa menerapkan prosedur yang wajib diikuti berkaitan dengan temuan, pengakuan, pelaporan, penyelidikan dan penyidikan terhadap kecurigaan adanya penyelewengan.

Menurut Perseroan yang termasuk dengan penyelewengan adalah :

1. Ketidakhujuran;
2. Penggelapan;
3. Pemalsuan atau pengubahan surat berharga seperti cek Perseroan;
4. Penyalahgunaan asset yang dimiliki oleh Perseroan, Pegawai, Mitra Usaha atau

R. INFORMATION TRANSPARENCY

The Company discloses relevant material information in the report to any concerned authorities (Annual and Mid-Term Reports, and others) in accordance with applicable laws and regulation in a punctual, accurate, clear and objective manner.

The Company makes reasonable efforts to pioneer and takes initiative to disclose both financial and non-financial information for decision-making purpose of the Shareholders, creditors and other concerned parties through either mandatory or voluntary nature of disclosure. As for such disclosure, Brantas seeks to provide information through Annual Report and any other media as deemed necessary.

S. MANIPULATION

The Company defines a policy prohibiting any form of manipulation and at all time applies the procedures to be followed in relation to the discovery, recognition, reporting, inquiry and investigation on any suspicion of the manipulation.

According to the Company, any act categorized as the manipulation includes as follows:

1. Dishonesty;
2. Embezzlement;
3. Forgery or alteration of securities such as company checks;
4. Misuse of assets owned by the Company, Employee, Business Partner or

Rekanan;

5. Pengalihan kas, surat berharga atau asset Perseroan lain untuk penggunaan pribadi;
6. Penanganan dan pelaporan transaksi Perseroan yang dilakukan tidak sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku;
7. Pemalsuan atas catatan akuntansi Perseroan atau laporan keuangan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang merugikan Perseroan.

T. SOSIALISASI, IMPLEMENTASI DAN EVALUASI

Perseroan melakukan sosialisasi, implementasi dan evaluasi terhadap Panduan ini. Perseroan membentuk Tim yang diketuai oleh Sekretaris Korporat yang bertanggungjawab terhadap program sosialisasi, implementasi dan evaluasi Panduan Good Corporate Governance.

U. PELAPORAN PELANGGARAN PANDUAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Setiap anggota Komisaris, Direksi, Komite-Komite yang ada serta Pegawai dapat menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap Panduan Good Corporate Governance ini kepada Perseroan secara pribadi, melalui surat. Tim sebagai mana disebut butir T di atas akan menindaklanjuti informasi pelanggaran kode ini. Tim tersebut akan menyediakan Kotak Pengaduan untuk keperluan tersebut.

Partner;

5. Transfer of cash, securities or other company assets for personal use;
6. Handling and reporting of the company transactions conducted not according to procedures and applicable rules;
7. Forgery of company accounting records or financial statements for personal gain or other interests causing the company loss.

T. SOCIALIZATION, IMPLEMENTATION AND EVALUATION

The Company conducts socialization, implementation and evaluation of this Code. The Company forms a team chaired by Corporate Secretary responsible for the socialization, implementation and evaluation of the Good Corporate Governance guidelines.

U. REPORTING VIOLATION TO THE GOOD CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES

Any member of the Board of Commissioners, the Board of Directors, Committees and Employees may submit a report on any alleged violation of the Good Corporate Governance guidelines to the Company either in person or by mail. The team as referred to in point T must follow up the information as to violation of this Code. The team must make available a Complaint Desk for this purpose.



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

PT. Brantas Abipraya (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor konstruksi umum. Bidang usaha Perusahaan ini tidak hanya menangani proyek-proyek irigasi, tetapi juga telah melaksanakan proyek bergengsi yang terletak di dalam dan di luar negeri. Proyek tersebut, antara lain bendungan, terowongan, jalan dan jembatan, bandara, bangunan, pembangkit listrik, dan banyak lagi.

Sebagai entitas bisnis yang dikelola profesional, Perusahaan dituntut untuk mampu menjalankan seluruh kegiatan bisnis dan operasionalnya secara berkelanjutan. Karenanya menjadi penting bagi Perusahaan untuk tidak semata-mata mendapatkan keuntungan (profit), tetapi juga memberikan perhatian kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat (people) dan kelestarian lingkungan (planet).

Untuk itulah, konsep CSR yang diterapkan oleh Brantas didasari oleh tiga prinsip yang dikenal dengan istilah Triple Bottom Lines, atau dikenal dengan 3P (People, Profit, Planet) yaitu kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungannya (profit) bagi kepentingan pembangunan manusia (people) dan lingkungan (planet). Ini dilakukan agar keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan. Hal ini merupakan suatu konsep bahwa organisasi Brantas memiliki suatu tanggung jawab sosial terhadap pemegang saham, karyawan, konsumen, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Selain itu, juga memberikan

PT. Brantas Abipraya (Persero) is a State-Owned Enterprise (SOE) specialized in the general construction sector. The corporate business field deals with not only irrigation, but also other prestigious projects located inside and outside the country. The project covers among others dams, tunnels, roads and bridges, airports, buildings, power plants, and many more.

As a professionally managed business entity, the Company is required running the entire business activities and operations in a sustainable manner. Therefore, it becomes important for the company to achieve not only profit, but also improvement of social welfare (people) and natural conservation (planet).

For this reason, the CSR is applied by Brantas based on three principles known as Triple Bottom Lines, or also known as 3P (People, Profit, Planet), i.e. the corporate responsibility to set aside part of its profits for the benefit of human development (people) and environment (planet). This is done in order for the corporate existence to develop and progress. It constitutes a concept that Brantas organization has social responsibility to the shareholders, employees, customers, communities and the environment in all aspects of the company operations. In addition thereto, it also contributes to the economic development of the local community or society at large, along with the improvement

kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerjanya beserta seluruh keluarganya.

Aspek Ekonomi

Keberadaan proyek Brantas yang tersebar di berbagai wilayah di Tanah Air, secara langsung maupun tidak langsung memberikan manfaat terhadap perekonomian daerah dan masyarakat setempat. Manfaat secara langsung, antara lain diwujudkan melalui:

- Rekrutmen masyarakat setempat sebagai pekerja, sehingga mengurangi tingkat pengangguran di daerah masing-masing.
- Pembangunan infrastruktur yang ditujukan untuk perbaikan kualitas hidup masyarakat.
- Pemberian berbagai bantuan kepada masyarakat sekitar yang ditujukan untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat setempat.

1. Prioritaskan Pemasok Lokal

Kontribusi terhadap perekonomian di masing-masing daerah yang menjadi lokasi keberadaan proyek Brantas Abipraya juga diwujudkan Perusahaan melalui penyertaan perusahaan-perusahaan lokal sebagai pemasok. Baik untuk pengadaan barang maupun pelayanan jasa. Kebijakan Perusahaan ini membuka peluang tumbuhnya lapangan kerja guna menyuplai kebutuhan proyek yang sedang dikerjakan.

of living standards of its employees as well as their families.

The Economics

The existence of Brantas projects in various regions in the country whether directly or not, provides benefits to the local economy and communities. The direct benefit, among others, was realized through:

- Recruitment of indigenous people as workers, that unemployment rate can be reduced in respective area.
- Infrastructure development is aimed at improving the quality of public livelihood.
- Provision of a variety of assistance to the local communities is aimed at improving their welfare.

1. Prioritizing Local Suppliers

Contribution to economy in each region in which Brantas Abipraya projects are located, it is also realized through a participation of local companies as suppliers for the procurement of both goods and services. The company policy opens opportunities of the employment growth to supply the needs of the ongoing projects.

2. Utamakan Pekerja Lokal

Kebijakan dalam proses penerimaan tenaga kerja, Brantas tetap memberikan kesempatan kepada masyarakat di sekitar lokasi proyek yang sedang dikerjakan untuk dapat bekerja membantu pembangunan proyek tersebut. Hal ini secara langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar dan tentu saja juga menambah pengalaman masyarakat untuk bekerja dalam satu tim besar mengerjakan proyek yang berskala besar juga. Namun demikian, berkaitan tuntutan yang tinggi atas semua pekerja yang terlibat dalam proyek yang sedang dikerjakan, Perusahaan tetap melakukan seleksi ketat terhadap calon pekerja.

2. Prioritizing Local Workers

As for the company policy on recruitment process, Brantas continues giving opportunity to local members of the community to work for the ongoing projects in their respective areas in supporting the project development. This is created an open labor market for the local community and of course added to their experiences to be part of a large team dealing with some large-scale projects. However, as for a high demand of the workers to be involved in the ongoing projects, the Company conducts a high profile of selection process for prospective employees. Indirectly, the people involved in the project will be trained to work in such a professional and disciplined manner, which is of the basic company requirements. To the future, they will become internalized on how to deal with high standard of discipline at work, which can be an added value for their further lives.

Secara tidak langsung masyarakat yang terlibat dalam pekerjaan ini akan dilatih untuk bekerja secara profesional dan disiplin, yang menjadi tuntutan dasar dari Brantas. Dampak ke depan, masyarakat akan terinternalisasi bagaimana harus bekerja dengan standar disiplin yang tinggi dan dapat menjadi bekal dalam hidup mereka selanjutnya.

To a limited scope, the Company gives authority to the project leaders to recruit the workers particularly in support of the field operations. They are posted as security personnel, construction workers and helper. Obviously, during the selection process, the company policies for general recruitment should be considered while the monitoring is conducted by Head Office.

Secara terbatas Perusahaan memberikan kewenangan kepada pimpinan proyek, untuk melakukan rekrutmen tenaga kerja terutama yang bersifat untuk dukungan operasional lapangan. Di antaranya adalah tenaga pengamanan (security), tenaga tukang dan pembantu tukang. Tentu saja dalam pelaksanaan rekrutmen, tetap harus memperhatikan kebijakan penerimaan pegawai secara umum, proses seleksi dan monitoring tetap dijalankan oleh Kantor Pusat.

Adapun untuk proses rekrutmen terhadap tenaga kerja berkeahlian, dengan latar belakang pendidikan Sarjana (S1) dan Diploma (D III), dilakukan sepenuhnya oleh Kantor Pusat di Jakarta. Sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, proses penerimaan pegawai dilaksanakan secara terbuka dan sejak pendaftaran penerimaan telah dipublikasikan secara nasional.

Kesempatan kerja bagi masyarakat di sekitar lokasi proyek-proyek yang sedang dikerjakan, juga dilaksanakan melalui kebijakan Perusahaan yang mengharuskan mitra kerja maupun perusahaan pemasok lokal untuk menggunakan tenaga kerja lokal. Melalui kebijakan ini maka jumlah masyarakat lokal di sekitar proyek yang bisa merasakan manfaat langsung dengan menjadi tenaga kerja di masing-masing proyek juga bertambah banyak.

On the other hand, the recruitment of qualified staff with educational backgrounds of Bachelor (S1) and Diploma (D III) is entirely conducted by the Head Office in Jakarta. With reference to the principles of the good corporate governance, the hiring process is carried out in a transparent manner and was published throughout the nation since the registration phase.

The job opportunities for indigenous people in the surroundings of the ongoing projects are also given by taking into account the corporate policy that requires its partners and local suppliers to use local workforce. Given this policy, number of the local communities around projects which directly benefit from the projects also highly increase.

Given their involvement, both at Brantas project and under local partners' payroll, the local people gain their compensation or wage. Furthermore, such earned wages are utilized to satisfy their daily needs, so that their welfare becomes increasingly better.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

Dengan menjadi tenaga kerja, baik di proyek Brantas maupun pada perusahaan mitra kerja dan pemasok, maka warga setempat memperoleh imbal jasa pekerjaan atau upah. Selanjutnya upah yang didapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga kesejahteraan mereka menjadi lebih baik. Khusus untuk tenaga kerja di Brantas, pemberian imbal jasa pekerjaan didasarkan pada sistem remunerasi yang berlaku sesuai dengan Keputusan Direksi. Kebijakan itu dengan mempertimbangkan besaran upah minimum provinsi (UMP) yang ditetapkan Dewan Pengupahan setempat.

Adapun besaran upah yang diterima karyawan Perusahaan pada golongan terendah, baik di kantor pusat maupun yang bertugas di proyek, masih lebih besar dibanding dengan UMP 2011 yang ditetapkan Dewan Pengupahan setempat. Brantas Abipraya juga mewajibkan perusahaan penyedia tenaga kerja alihdaya (outsourcing) di lingkungan Perusahaan, untuk memberlakukan hal yang sama kepada para karyawannya. Dengan demikian dapat dipastikan, besaran upah yang diterima oleh mereka selama tahun 2011, minimal telah sama dengan UMP yang ditetapkan Dewan Pengupahan setempat.

3. Penyaluran Dana Kemitraan dan Program Bina Lingkungan

Landasan hukum dalam menjalankan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha

For those under the company payroll of Brantas, the compensation is based on the applicable remuneration system in accordance with the Decision of the Board of Directors. This policy takes into account the provincial minimum wage (UMP) established by the local remuneration council.

The amount of wages received by the employees of the lowest rank, both at head office and those assigned to a project, remains greater than 2011 UMP established by the local remuneration council. Brantas Abipraya also requires the outsourcing providers within the Company to apply the same to their employees. Thus, it can be ascertained that the amount of wage they earned during the year 2011 was at least equal to the minimum wage set forth by the local remuneration council.

3. Distribution of Partnership Fund and Environmental Development Program

The legal basis for the Partnership by SOE with Small Business and Community

Kecil dan Program Bina Lingkungan :

1. Peraturan Menteri BUMN nomor : Per-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
2. Keputusan Menteri Negara BUMN No.KEP-100/MBU/2002 tanggal 04 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara.
3. Rencana Kerja Anggaran (RKA) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun 2011 dan 2010.

Mitra Binaan yang dibina oleh Brantas adalah usaha kecil yang berbentuk usaha perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi dan mempunyai legalitas/surat ijin sebagai salah satu persyaratan administrasi. Tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Brantas, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara BUMN No : PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 antara lain sebagai berikut :

1. Membentuk unit Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan
2. Menyusun Standar Operating Procedure (SOP) untuk pelaksanaan PKBL

Development Program:

1. Ministerial Decree of SOE Number: Per-05/MBU/2007 dated April 27, 2007 on the Partnership by SOE with Small Business and Community Development Program.
2. Ministerial Decree of SOE No. KEP-100/MBU/2002 dated June 4, 2002 on Assessment of Soundness of State-Owned Enterprise.
3. Work Plan and Budget (RKA) for Partnership and Environmental Development Program of 2011 and 2010.

The partners developed by Brantas cover small business of individual persons, informal or formal business entities, including cooperation having adequate legality/permits that meets one of the administrative requirements. The main tasks and functions of the Partnership and Environmental Development Program Unit at Brantas, according to the Ministerial Decree of SOE Number: PER-05/MBU/2007 dated April 27, 2007 are as follows:

1. To establish Partnership and Environmental Development Program Unit
2. To prepare Standard Operating Procedure (SOP) for PKBL implementation

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 3. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PKBL 4. Melakukan evaluasi, seleksi dan penetapan calon Mitra Binaan 5. Menyiapkan dan menyalurkan dana Program Kemitraan kepada Mitra Binaan dan dana Program Bina Lingkungan kepada masyarakat 6. Melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap Mitra Binaan 7. Mengadministrasikan kegiatan pembinaan 8. Melakukan pembukuan atas program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan 9. Menyampaikan laporan pelaksanaan PKBL yang meliputi laporan berkala baik triwulanan maupun tahunan kepada Menteri BUMN. | <ol style="list-style-type: none"> 3. To prepare Work Plan and Budget (RKA) for PKBL 4. To conduct evaluation, selection, and award of development partner 5. To prepare and distribute the Partnership fund to the development partners and Environmental Development Program fund to the community 6. To provide monitoring and assistance to the development partner 7. To administer the development activities 8. To conduct bookkeeping of the Partnership and Environment Development Program 9. To submit the PKBL implementation report which includes periodic reports, either quarterly or annually to the Minister of SOE. |
|--|---|

Tugas pokok Bagian Bina Lingkungan adalah memberdayakan kondisi sosial masyarakat melalui bantuan :

1. Korban bencana alam
2. Pendidikan dan /pelatihan
3. Peningkatan kesehatan
4. Pengembangan sarana dan prasarana umum
5. Bantuan sarana peribadatan
6. Bantuan Pelestarian alam

The main tasks of the Environmental Development Division include strengthening the social condition through donations:

1. Natural disaster victims
2. Education and/or training
3. Health Improvement
4. Development of public facility and infrastructure
5. Religious facility donation
6. Natural conservation donation

Keberadaan Brantas Abipraya juga membawa manfaat tidak langsung bagi masyarakat sekitar. Manfaat tersebut diwujudkan Perusahaan melalui pelaksanaan Program Kemitraan. Program Kemitraan adalah program pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat, melalui pemberian pinjaman kemitraan untuk modal kerja dan investasi. Selain itu melalui Program Kemitraan, Perusahaan juga memberikan bantuan pembinaan berupa bantuan pelatihan manajemen usaha, bantuan pemasaran (promosi/pameran) dan lain-lain.

Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kompetensi usaha kecil yang dijalankan masyarakat, sehingga menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Melalui program ini maka setiap usaha kecil yang telah berkembang diharapkan juga bisa menyerap tenaga kerja dari masyarakat lokal, sehingga mereka mendapatkan penghasilan. Dengan demikian masyarakat sekitar yang tidak bisa bekerja di proyek Brantas Abipraya, tetap bisa merasakan manfaat dari kehadiran Perusahaan.

Pinjaman kemitraan kepada usaha kecil yang diberikan Perusahaan sifatnya non-komersial. Mekanisme penyalurannya dilakukan berdasarkan evaluasi atas persyaratan serta angsuran yang disesuaikan dengan kemampuan usaha. Efektivitas penyaluran dana kemitraan pada tahun 2011 sebesar Rp 210 juta

The existence of Brantas Abipraya also brings indirect benefit to the surrounding community. Such benefit is actualized by the Company through the implementation of Partnership Program. The Partnership Program aims at empowering and improving the public economy through partnership loans for working capital and investment. In addition thereto, through this program, the Company also gives assistance of business management coaching, marketing (promotion/exhibition) and others.

It also aims at improving the competence of small businesses, making them stronger and more independent. Through this program, each of them which have grown is also expected to absorb labor force from the local community for their own earnings. Thus, any member of the surrounding community not able to work in Brantas project remains to acquire benefit from the presence of the Company.

Partnership loans to small businesses given the Company a non-commercial nature. Distribution mechanism is based on an evaluation of the requirements as well as the installments are adjusted to the ability of business. Effectiveness of the partnership funds in 2011 amounted to USD 210 million or by 217% of RKA

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

atau sebesar 217% dari RKA 2012. Jumlah penyaluran dana kemitraan berdasarkan unit usaha dalam tahun 2012 sebanyak 6 unit, sesuai dengan RKA 2012.

Perkembangan mitra binaan dalam tahun 2012 mengalami kenaikan dalam pengembalian angsuran pinjaman. Total angsuran yang diterima sebesar Rp 484.500.000, sedangkan dalam tahun 2011 adalah sebesar Rp 210.000.000. Penerimaan angsuran di tahun 2012 sebesar 92,80 % dari total penerimaan RKA tahun 2012.

Besaran Dana Program Kemitraan yang disalurkan untuk kegiatan Program Kemitraan beserta jumlah PUKK selama tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut :

TAHUN	Jumlah Dana disalurkan (Rupiah)	Jumlah PUKK
2010	Rp 160 Juta	6 Perusahaan
2011	Rp 210 Juta	5 Perusahaan
2012	Rp 484,50 Juta	6 Perusahaan

2012. Number of partnership funds by business units in the year 2012 as many as 6 units, in accordance with the RKA 2012.

Partner in the development of construction in 2012 experienced an increase in loan installment refund. Total installment received Rp 484.5 million, whereas in 2011 is Rp 210 million. Installment receipt in the year 2012 as big as 92.80% of the total receipts RKA 2012.

Scale Partnerships Program funds channeled to activities with total PUKK Partnership Program for the last three years are as follows:

Aspek Sosial

Komitmen Perusahaan dalam pemenuhan aspek sosial terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial adalah keterlibatan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat di sekitar lokasi proyek konstruksi. Hal tersebut diwujudkan Perusahaan dalam bentuk pelaksanaan Program Bina Lingkungan, yakni program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat dan peningkatan kualitas hidup, yakni bantuan pendidikan berupa beasiswa, sunatan massal, bantuan kepada korban bencana.



Social Aspects

The company commitment in fulfilling the social aspects in relation to the social responsibility comprises its involvement in improving the community welfare, especially those in construction project surroundings. It is realized through an implementation of Environmental Development Program, i.e. a community empowerment, and improving life quality, i.e. educational aid of scholarships, mass circumcision and donations to disaster victims.



Pelaksanaan Program Bina Lingkungan sudah dijalankan cukup lama. Kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu tersebut mencakup kegiatan-kegiatan yang dapat dikategorikan dalam program strategis dan program responsif dalam bentuk pemberian bantuan yang sifatnya insidental, memenuhi kebutuhan sesaat, ataupun tanggap darurat.

Khusus untuk tahun 2012, dari semua objek bantuan Program Bina Lingkungan, Perusahaan memprioritaskan pemberian bantuan di

The Environmental Development Program has run quite for long. Activities conducted during this time include those categorized as strategic and responsive programs in the form of incidental aid to meet immediate needs, or emergency response.

Especially for the year 2012, of all the Environmental Development Program objects, the Company prioritized the provision

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

bidang pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat menjadi perhatian utama Perusahaan dalam pelaksanaan kegiatan Program Bina Lingkungan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan pendidikan merupakan salah satu pondasi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sepanjang tahun 2012, Perusahaan telah menyalurkan dana untuk bidang pendidikan dan pelatihan sebesar Rp 491 juta.

of education aid. Improving the public education quality becomes a major concern during the Environmental Development Program implementation. This is based on the consideration that education is one of foundations to improve public welfare. During the year 2012, the Company distributed funds for education and training worth Rp 491 million.

Uraian	RKAP Tahun 2012	Realisasi 2012	Realisasi 2011	Persentase terhadap		Description
				RKAP 2012	REALISASI 2011	
				%	%	
Pendidikan (Anak Asuh)	520,00	491,00	490,39	94,42	99,80	Education (Children Foster)
Kesehatan (Sunatan Massal)	75,00	108,33	-	144		Health
Bantuan Social: (Bencana Alam, Kesehatan, dan Lingkungan)	5,00	70,50	4,99	1.410	1.412	Social Aids

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

PER 31 DESEMBER 2012 DAN 2011



NOOR SALIM, NURSEHAN & SINARAHARDJA

DAFTAR ISI

	Halaman
I. SURAT PERNYATAAN DIREKSI	
II. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	
III. LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI	
1. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi	1 - 2
2. Laporan Laba (Rugi) Komprehensif Konsolidasi	3
3. Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasi	4
4. Laporan Arus Kas Konsolidasi	5
IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI	6 - 79
V. LAMPIRAN	
1. Laporan Keuangan Audited (Induk Perusahaan Saja) Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012 dan 2011	

I. SURAT PERNYATAAN DIREKSI



Persero

PT BRANTAS ABIPRAYA

Jl. D.I. Panjaitan Kav-14, Telp. (021) 8516290, Fax. (021) 8516095, Jakarta 13340
http://www.brantas-abipraya.com

Certified :
ISO 9001
OHSAS 18001
ISO 14001

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN BUKU 2012
PT. BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Bambang E. Marsono**
Alamat Kantor : Jl. D.I. Panjaitan Kav. 14 Cawang-Jakarta Timur
Alamat Domisili (sesuai KTP atau kartu identitas lain) : Jl. Cipinang Cempedak II No. 17/3 RT. 011 RW 006
Cipinang Cempedak - Jatinegara - Jakarta Timur
Nomor Telpn : 021-8516290
Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : **Sukarno Jososaputro**
Alamat Kantor : Jl. D.I. Panjaitan Kav. 14 Cawang Jakarta Timur
Alamat Domisili (sesuai KTP atau kartu identitas lain) : Jl. Flamboyan No. 7 Cibening - Bintara Jaya
Bekasi Barat
Nomor Telpn : 021-8516290
Jabatan : Direktur Keuangan & SDM

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Perusahaan;
2. Laporan Keuangan perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar ;
b. Laporan Keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas system pengendalian intern dalam perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 28 Pebruari 2013

Bambang E. Marsono
Direktur Utama

Sukarno Jososaputro
Direktur Keuangan & SDM

II.

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

No: 013-GA/NNS/II/2013

**Kepada Yth:
Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Brantas Abipraya (Persero)**

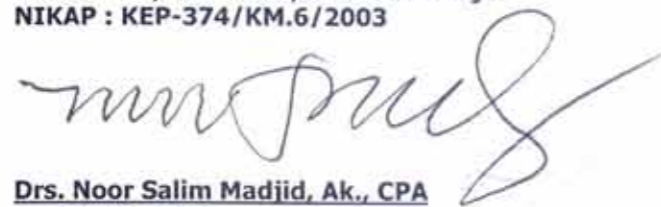
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan konsolidasi PT Brantas Abipraya (Persero) dan Entitas Anak per tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, serta laporan rugi laba komprehensif konsolidasi, laporan perubahan ekuitas konsolidasi dan laporan arus kas konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan konsolidasi adalah tanggung jawab manajemen perusahaan. Tanggung jawab kami adalah pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan konsolidasi berdasarkan audit kami. Kami tidak mengaudit laporan keuangan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012. Laporan keuangan tersebut diaudit oleh auditor independen lain dengan pendapat wajar tanpa pengecualian yang laporannya diserahkan kepada kami, dan pendapat kami sejauh berkaitan dengan jumlah-jumlah yang dilaporkan untuk entitas anak tersebut semata-mata hanya didasarkan atas laporan auditor independen lain tersebut.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa Laporan Keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian Laporan Keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami dan auditor independen lain tersebut memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, berdasarkan audit kami dan laporan auditor independen lain tersebut, Laporan Keuangan Konsolidasi yang kami sebut diatas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasi PT Brantas Abipraya (Persero) dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, hasil usaha konsolidasi, serta arus kas konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

**Kantor Akuntan Publik
Noor Salim, Nursehan, & Sinarahardja
NIKAP : KEP-374/KM.6/2003**



Drs. Noor Salim Madjid, Ak., CPA
NIAP: AP. 0616

Jakarta, 28 Februari 2013

III.

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASI
PER 31 DESEMBER 2012 DAN 2011

	Catatan	31-12-2012 (Rp.)	31-12-2011 (Rp.) (Disajikan Kembali)
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	3c,4,5	195,179,346,012	130,177,755,904
Piutang Usaha	3e,3g		
Pihak Yang Berelasi	3d,6,19,37	129,131,247,423	111,481,992,970
Pihak Ketiga	6	5,026,100,564	5,041,096,222
Piutang Lain-Lain	3e,3g		
Pihak Yang Berelasi	3d,7	1,200,306,934	-
Pihak Ketiga	7	9,673,858,221	12,092,398,654
Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja	8		
Pihak Yang Berelasi	3d,8	194,421,124,709	45,516,604,103
Pihak Ketiga	8	35,474,430,282	183,321,224
Persediaan	3h,9	24,201,265,150	31,057,815,057
Uang Muka	10	14,282,579,354	14,607,526,324
Beban Dibayar Dimuka	3m,11	15,049,295,883	29,904,619,524
Pajak Dibayar Dimuka	3n,12a	11,408,534,886	4,867,056,370
Jaminan	13	7,681,578,007	2,102,288,227
Total Aset Lancar		642,729,667,424	387,032,474,579
ASET TIDAK LANCAR			
Properti Investasi	3i,14	-	151,989,480,000
Aset Tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp. 78.487.691.891 dan Rp. 69.451.873.541	3j,3k,15,20	263,511,693,278	101,718,787,028
Aset Lain-Lain - setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp. 4.466.201.023	16	-	-
Beban Tangguhan	3p,17	3,733,552,271	-
Total Aset Tidak Lancar		267,245,245,549	253,708,267,028
JUMLAH ASET		909,974,912,974	640,740,741,607

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASI
PER 31 DESEMBER 2012 DAN 2011

	Catatan	31-12-2012 (Rp.)	31-12-2011 (Rp.) (Disajikan Kembali)
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Hutang Usaha	18		
Pihak Yang Berelasi	3d,4,37	-	6,082,983,992
Pihak Ketiga	4,18	235,288,094,565	118,749,066,464
Hutang Bank - Jatuh Tempo Satu Tahun	15,19,36	55,854,216,551	350,400,000
Hutang Non Bank	20	-	100,560,000,000
Hutang Lain-lain Pihak Yang Berelasi	21	78,161,100	-
Hutang Pajak	3n,12b	7,515,762,705	2,927,546,201
Uang Muka Pemberi Kerja - Jatuh Tempo Satu Tahun	4,22	85,401,031,535	20,590,299,993
Pendapatan Diterima Dimuka	3l,23	6,477,679,344	5,167,248,884
Beban Yang Masih Harus Dibayar	3m,24	24,499,783,993	11,266,757,872
Hutang Sewa Pembiayaan - Jatuh Tempo Satu Tahun	3j,4,15,25	9,433,066,341	7,048,575,738
Total Liabilitas Jangka Pendek		424,547,796,134	272,742,879,143
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	3o,26	10,968,966,747	9,600,069,532
Hutang Bank - Setelah Dikurangi Bagian Yang Jatuh Tempo Satu Tahun	4,15,19,36	221,090,729,604	136,761,131,211
Uang Muka Pemberi Kerja - Setelah Dikurangi Bagian Yang Jatuh Tempo Satu Tahun	22	31,235,638,551	55,569,939,429
Hutang Sewa Pembiayaan - Setelah Dikurangi Bagian Yang Jatuh Tempo Satu Tahun	3j,4,15,25	7,597,512,067	4,049,638,875
Total Liabilitas Jangka Panjang		270,892,846,969	205,980,779,047
EKUITAS			
Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk			
Modal Saham - nilai nominal Rp 1.000.000 per saham			
Modal dasar - 600.000 saham dan 40.000 saham per 31 Desember 2012 dan 2011			
Modal ditempatkan dan disetor 161.555 saham dan 10.000 saham per 31 Desember 2012 dan 2011	27	161,555,000,000	10,000,000,000
Penyertaan Modal Negara	14,27	-	151,554,480,000
Cadangan	3b,29	7,584,891,200	7,585,411,200
Saldo Laba (Rugi)		42,653,057,825	(7,642,807,897)
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		211,792,949,026	161,497,083,304
Kepentingan Non-Pengendali	4	2,741,320,845	520,000,113
Total Ekuitas		214,534,269,871	162,017,083,417
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		909,974,912,974	640,740,741,607

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang Merupakan Bagian yang Tidak Terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA (RUGI) KOMPREHENSIF KONSOLIDASI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011

	Catatan	2012 (Rp.)	2011 (Rp.) (Disajikan Kembali)
PENDAPATAN USAHA	3l,30	923,407,084,230	703,877,057,479
BEBAN LANGSUNG	3m,31	830,607,255,337	622,655,166,860
LABA KOTOR - SEBELUM BAGIAN LABA JOINT OPERATION		92,799,828,893	81,221,890,619
BAGIAN LABA JOINT OPERATION	3l,32	79,163,771,888	27,809,457,827
LABA KOTOR		171,963,600,781	109,031,348,446
BEBAN USAHA	3m,33		
Pegawai		34,477,233,655	27,334,941,706
Umum		12,961,755,596	11,611,670,886
Penyusutan		2,550,745,340	1,623,433,757
Pemasaran		2,299,506,290	2,969,553,404
Pengembangan		596,181,418	-
Jumlah Beban Usaha		52,885,422,299	43,539,599,753
LABA USAHA		119,078,178,482	65,491,748,693
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN			
Pendapatan Lain-Lain	34	10,845,967,735	19,707,285,870
Beban Lain-Lain	3m,35	17,673,594,798	6,446,168,664
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-Lain		(6,827,627,063)	13,261,117,206
LABA SEBELUM BEBAN BUNGA DAN PAJAK PENGHASILAN		112,250,551,419	78,752,865,899
BEBAN BUNGA	36	39,953,492,170	38,745,368,608
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		72,297,059,249	40,007,497,291
(BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN	12c		
Pajak Final		21,459,618,217	13,994,756,956
Pajak Kini		-	-
Pajak Tangguhan		-	-
		21,459,618,217	13,994,756,956
LABA TAHUN BERJALAN		50,837,441,032	26,012,740,335
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN		-	-
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik Entitas Induk		50,816,120,301	26,012,740,222
Kepentingan Non Pengendali		21,320,731	113
LABA TAHUN BERJALAN		50,837,441,032	26,012,740,335

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang Merupakan Bagian yang Tidak Terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011

	Modal Saham	Penyertaan Modal Negara	Cadangan	Saldo Laba (Rugi)	Jumlah Ekuitas Pemegang Saham	Kepentingan Non Pengendali atas Aset Bersih Entitas Anak Perusahaan	Jumlah Ekuitas
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Saldo Per 1 Januari 2011	10,000,000,000	151,554,480,000	7,585,411,200	(33,655,548,119)	135,484,343,082	-	135,484,343,082
Laba Bersih Komprehensif	-	-	-	26,012,740,221	26,012,740,222	113	26,012,740,335
Kepentingan Non-Pengendali	-	-	-	-	-	520,000,000	520,000,000
Saldo Per 31 Desember 2011	10,000,000,000	151,554,480,000	7,585,411,200	(7,642,807,897)	161,497,083,304	520,000,113	162,017,083,417
Modal Disetor	151,555,000,000	-	-	-	151,555,000,000	-	151,555,000,000
Penyertaan Modal Negara	-	(151,554,480,000)	-	-	(151,554,480,000)	-	(151,554,480,000)
Cadangan	-	-	(520,000)	-	(520,000)	-	(520,000)
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan	-	-	-	(520,254,578)	(520,254,578)	-	(520,254,578)
Laba Bersih Komprehensif	-	-	-	50,816,120,301	50,816,120,301	21,320,731	50,837,441,032
Kepentingan Non-Pengendali	-	-	-	-	-	2,200,000,000	2,200,000,000
Saldo Per 31 Desember 2012	161,555,000,000	-	7,584,891,200	42,653,057,825	211,792,949,026	2,741,320,845	214,534,269,871

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang Merupakan Bagian yang Tidak Terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011

	2012 (Rp)	2011 (Rp) (Disajikan Kembali)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan dari Pelanggan	984,936,597,324	721,686,067,888
Pembayaran Kepada:		
Pemasok, Subkontraktor, Direksi, Karyawan, JO dan Pihak Ketiga	(895,528,081,874)	(590,272,853,755)
<i>Kas yang diperoleh dari (digunakan untuk) Operasi</i>	<u>89,408,515,450</u>	<u>131,413,214,133</u>
Bunga Deposito dan Jasa Giro	1,593,644,256	1,001,536,865
Pembayaran Denda Pajak	(35,649,470)	-
Pembayaran Bunga	(39,953,492,170)	(38,745,368,608)
Pembayaran Pajak	(17,974,154,973)	(15,583,139,171)
Penerimaan Restitusi Pajak	23,644,827,842	12,956,711,088
Hasil Klaim dan Penerimaan (Pengeluaran) lainnya	(8,385,621,849)	(883,961,750)
<i>Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi</i>	<u>48,298,069,086</u>	<u>90,158,992,557</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pembelian Aset Tetap	(178,459,251,600)	(25,636,594,708)
Penjualan Aset Tetap	-	152,147,090
Pengurangan Property Investasi	151,989,480,000	-
Beban Tanggahan	(3,733,552,271)	-
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan	(520,254,578)	-
Kepentingan Non-Pengendali	2,221,320,732	520,000,113
<i>Kas Bersih (digunakan untuk) Aktivitas Investasi</i>	<u>(28,502,257,717)</u>	<u>(24,964,447,505)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
(Pembayaran) Penambahan Hutang Bank	139,833,414,944	(4,021,375,143)
(Pembayaran) Penambahan Hutang Non bank	(100,560,000,000)	100,450,000,000
(Pembayaran) Penambahan Surat Berharga Jangka Menengah	-	(100,000,000,000)
Penerimaan (Pembayaran) Hutang Sewa Pembiayaan	5,932,363,795	1,264,178,515
<i>Kas Bersih (digunakan) diperoleh dari Aktivitas Pendanaan</i>	<u>45,205,778,739</u>	<u>(2,307,196,628)</u>
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	65,001,590,107	62,887,348,424
SALDO KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN	130,177,755,904	67,290,407,480
SALDO KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN	<u>195,179,346,012</u>	<u>130,177,755,904</u>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang Merupakan Bagian yang Tidak Terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
(Induk Perusahaan Saja)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2012 DAN 2011

	31-12-2012 (Rp.)	31-12-2011 (Rp.) (Disajikan Kembali)
ASET		
Kas dan Setara Kas	185,804,148,033	129,552,744,555
Piutang Usaha		
Pihak Yang Berelasi	129,131,247,423	111,481,992,970
Pihak Ketiga	5,026,100,564	5,041,096,222
Piutang Lain-Lain		
Pihak Yang Berelasi	1,200,306,934	5,000,000
Pihak Ketiga	9,673,858,221	12,092,398,654
Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja		
Pihak Yang Berelasi	194,421,124,709	45,516,604,103
Pihak Ketiga	35,474,430,282	183,321,224
Persediaan	24,201,265,150	31,057,815,057
Uang Muka	14,282,579,354	14,607,526,324
Beban Dibayar Dimuka	15,049,295,883	29,904,619,524
Pajak Dibayar Dimuka	11,401,961,611	4,867,056,370
Jaminan	7,681,578,007	2,102,288,227
Penyertaan Anak Perusahaan	71,480,000,000	51,480,000,000
Properti Investasi	-	151,989,480,000
Aset Tetap - Nett	263,511,693,278	101,718,787,028
Aset Lain-Lain - Nett	-	-
JUMLAH ASET	<u>968,339,589,449</u>	<u>691,600,730,258</u>
LIABILITAS		
Hutang Usaha		
Pihak Yang Berelasi	-	6,082,983,992
Pihak Ketiga	235,288,094,565	118,749,066,464
Hutang Bank - Jatuh Tempo Satu Tahun	55,854,216,551	350,400,000
Hutang Non Bank	-	100,560,000,000
Hutang Pajak	7,478,384,705	2,927,546,201
Uang Muka Pemberi Kerja - Jatuh Tempo Satu Tahun	85,401,031,535	20,590,299,993
Pendapatan Diterima Dimuka	6,477,679,344	5,167,248,884
Beban Yang Masih Harus Dibayar	24,473,878,760	11,266,757,872
Hutang Sewa Pembiayaan - Jatuh Tempo Satu Tahun	9,433,066,341	7,048,575,738
Hutang Lain-lain		
Pihak Yang Berelasi	61,325,218,867	51,380,000,000
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	10,968,966,747	9,600,069,532
Hutang Bank - Setelah Dikurangi Bagian Yang Jatuh Tempo Satu Tahun	221,090,729,604	136,761,131,211
Uang Muka Pemberi Kerja - Setelah Dikurangi Bagian Yang Jatuh Tempo Satu Tahun	31,235,638,551	55,569,939,429
Hutang Sewa Pembiayaan - Setelah Dikurangi Bagian Yang Jatuh Tempo Satu Tahun	7,597,512,067	4,049,638,875
JUMLAH LIABILITAS	<u>756,624,417,637</u>	<u>530,103,658,191</u>
EKUITAS		
Modal Saham - nilai nominal Rp 1.000.000 per saham		
Modal dasar - 600.000 saham dan 40.000 saham per 31 Desember 2012 dan 2011		
Modal ditempatkan dan disetor 161.555 saham dan 10.000 saham per 31 Desember 2012 dan 2011	161,555,000,000	10,000,000,000
Penyertaan Modal Negara	-	151,554,480,000
Cadangan	7,584,891,200	7,585,411,200
Saldo Laba (Rugi)	42,575,280,611	(7,642,819,133)
JUMLAH EKUITAS	<u>211,715,171,811</u>	<u>161,497,072,067</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	<u>968,339,589,449</u>	<u>691,600,730,258</u>

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
(Induk Perusahaan Saja)
LAPORAN LABA (RUGI) KOMPREHENSIF
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011

	Catatan	2012 (Rp.)	2011 (Rp.)
PENDAPATAN USAHA	2l,26	923,407,084,230	703,877,057,479
BEBAN LANGSUNG	2m,27	830,607,255,337	622,655,166,860
LABA KOTOR - SEBELUM BAGIAN LABA JOINT OPERATION		92,799,828,893	81,221,890,619
BAGIAN LABA JOINT OPERATION LABA KOTOR	2l,28	79,163,771,888	27,809,457,827
		171,963,600,781	109,031,348,446
BEBAN USAHA	2m,29		
Pegawai		34,477,233,655	27,334,941,706
Umum		12,961,755,596	11,611,670,886
Penyusutan		2,550,745,340	1,623,433,757
Pemasaran		2,299,506,290	2,969,553,404
Pengembangan		596,181,418	-
Jumlah Beban Usaha		52,885,422,299	43,539,599,753
LABA USAHA		119,078,178,482	65,491,748,693
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN			
Pendapatan Lain-Lain	30	10,746,881,026	19,707,182,932
Beban Lain-Lain	2m,31	17,673,594,798	6,446,077,077
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-Lain		(6,926,713,772)	13,261,105,856
LABA SEBELUM BEBAN BUNGA DAN PAJAK PENGHASILAN		112,151,464,710	78,752,854,549
BEBAN BUNGA	32	39,953,492,170	38,745,368,608
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		72,197,972,540	40,007,485,941
(BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN	10c		
Pajak Final		21,459,618,217	13,994,756,956
Pajak Kini		-	-
Pajak Tangguhan		-	-
		21,459,618,217	13,994,756,956
LABA BERSIH		50,738,354,323	26,012,728,985

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
(Induk Perusahaan Saja)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011

	Modal Saham		Penyertaan Modal Negara		Cadangan	Saldo Laba (Rugi)	Jumlah Ekuitas
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)			
Saldo Per 1 Januari 2011	10,000,000,000	151,554,480,000	7,585,411,200	(33,655,548,119)	-	135,484,343,082	
Laba Bersih Komprehensif	-	-	-	26,012,728,985	-	26,012,728,985	
Saldo Per 31 Desember 2011	10,000,000,000	151,554,480,000	7,585,411,200	(7,642,819,134)	-	161,497,072,067	
Modal Disetor	151,555,000,000	-	-	-	-	151,555,000,000	
Penyertaan Modal Negara	-	(151,554,480,000)	-	-	-	(151,554,480,000)	
Cadangan	-	-	(520,000)	-	-	(520,000)	
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan	-	-	-	(520,254,578)	-	(520,254,578)	
Laba Bersih Komprehensif	-	-	-	50,738,354,323	-	50,738,354,323	
Saldo Per 31 Desember 2012	161,555,000,000	-	7,584,891,200	42,575,280,611	-	211,715,171,811	

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)

(Induk Perusahaan Saja)

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011

	2012 (Rp)	2011 (Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan dari Pelanggan	984,936,597,324	721,686,067,888
Pembayaran Kepada:		
Pemasok, Subkontraktor, Direksi, Karyawan, JO dan Pihak Ketiga	(896,212,138,855)	(590,277,865,103)
<i>Kas yang diperoleh dari (digunakan untuk) Operasi</i>	<u>88,724,458,469</u>	<u>131,408,202,785</u>
Bunga Deposito dan Jasa Giro	1,469,805,200	1,001,536,865
Pembayaran Denda Pajak	(35,649,470)	-
Pembayaran Bunga	(39,953,492,170)	(38,745,368,608)
Pembayaran Pajak	(17,974,154,973)	(15,583,139,171)
Penerimaan Restitusi Pajak	23,644,827,842	12,956,711,088
Hasil Klaim dan Penerimaan (Pengeluaran) lainnya	(8,410,362,847)	(883,961,638)
<i>Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi</i>	<u>47,465,432,050</u>	<u>90,153,981,321</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pembelian Aset Tetap	(178,459,251,600)	(25,636,594,708)
Penjualan Aset Tetap	-	152,147,090
Pengurangan Property Investasi	151,989,480,000	-
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan	(520,254,578)	-
Penyertaan Anak Perusahaan	(19,380,000,000)	(51,480,000,000)
<i>Kas Bersih (digunakan untuk) Aktivitas Investasi</i>	<u>(46,370,026,178)</u>	<u>(76,964,447,618)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
(Pembayaran) Penambahan Hutang Bank	139,833,414,944	(4,021,375,143)
(Pembayaran) Penambahan Hutang Non bank	(100,560,000,000)	100,450,000,000
(Pembayaran) Penambahan Hutang Penyertaan	9,950,218,867	51,380,000,000
(Pembayaran) Penambahan Surat Berharga Jangka Menengah	-	(100,000,000,000)
Penerimaan (Pembayaran) Hutang Sewa Pembiayaan	5,932,363,795	1,264,178,515
<i>Kas Bersih (digunakan) diperoleh dari Aktivitas Pendanaan</i>	<u>55,155,997,606</u>	<u>49,072,803,372</u>
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	56,251,403,478	62,262,337,075
SALDO KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN	129,552,744,555	67,290,407,480
SALDO KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN	<u>185,804,148,033</u>	<u>129,552,744,555</u>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang Merupakan Bagian yang Tidak Terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian



Kantor Pusat :

Jl. D.I. Panjaitan Kav. 14, Cawang,
Jakarta Timur 13340

Telpon : (021) 851 6290 - (Hunting)

Fax : (021) 851 6095

Email : bap@brantas-abipraya.com

Marketing : marketing@brantas-abipraya.com